



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
BALAI PENATAAN RUANG LAUT PADANG

JALAN PERTANIAN SUNGAI LAREH, KELURAHAN LUBUK MINTURUN, PADANG 25175

TELEPON (0751) 497052, FAKSIMILE (0751) 497053

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpspl.padang@kkp.go.id

Nomor : B.66/BPSPL.1/TU.140/I/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja
BPSPL Padang Tahun 2025

23 Januari 2026

Yth. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
di Jakarta Pusat

Dalam rangka upaya peningkatan akuntabilitas kinerja lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan kepada Ibu Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang Tahun 2025 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Ibu lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



DJPKRL
BIJAK MENGELOLA LAUT



Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja (LKj) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi mengenai capaian kinerja BPSPL Padang tahun 2025 melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama dengan hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Laporan ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja BPSPL Padang kepada para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025.

Di samping itu, laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Kritik, masukan, dan saran sangat kami harapkan untuk memperbaiki kekurangan laporan ini. Atas perhatian dan dukungan semua pihak diucapkan terima kasih.

Padang, 23 Januari 2026
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. Rahmat Irfansyah, M.Si.

Ringkasan Eksekutif

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSPL Padang secara proposional dan profesional berupaya mencapai hasil yang baik dengan mengutamakan transparansi dan keterbukaan pada setiap kegiatan dengan cara melaporkan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) yang disusun setiap triwulan. LKj Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2025 merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban atas pencapaian dari tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama periode tersebut, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai upaya dalam mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, BPSPL Padang menguraikan penjabaran visi misi yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPSPL Padang berpedoman pada sasaran strategis yang di turunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran 2025. Pada tahun 2025, terdapat sembilan sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja (IK) di lingkup BPSPL Padang dengan jangka waktu target bersifat triwulanan, semesteran, dan tahunan.

Lebih lanjut, dilakukan pengukuran capaian kinerja yang dilakukan setiap triwulannya untuk memperoleh gambaran konkret terkait aspek ketercapaian kinerja secara kuantitatif. Adapun pengukuran kinerja ini dilakukan dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh BPSPL Padang periode tahun 2025 adalah **114,62 (kategori istimewa)**. Berikut disampaikan capaian masing-masing indikator kinerja BPSPL Padang tahun 2025:

1. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan satu (1) Provinsi telah tercapai sebanyak lima (5) provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.
2. Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan lima (5) Orang telah tercapai sebanyak enam (6) orang masyarakat pemanfaat kawasan konservasi di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat.
3. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan 1 Kesepakatan telah tercapai sebanyak dua (2) kesepakatan yaitu usulan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Mifa Bersaudara dan Yayasan Fifi Laut Nusantara.
4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan tiga (3) Jenis telah tercapai sebanyak enam (6) jenis yaitu terubuk, belida, penyu, cetacean, dugong, dan buaya.
5. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan tiga (3) Jenis telah tercapai sebanyak tujuh (7) jenis yaitu hiu, pari, sidat, teripang, arwana, napoleon, dan karang.
6. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan dengan target tahunan 80 telah tercapai dengan nilai 96.
7. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan satu (1) Dokumen telah tercapai sebanyak satu (1) Dokumen.
8. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan dua (2) Dokumen telah tercapai dua (2) dokumen yaitu identifikasi/verifikasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut.

9. Nilai PM SAKIP BPSPL Padang dengan target tahunan 70 telah tercapai dengan nilai 94,15.
10. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Padang dengan target tahunan 89 telah tercapai dengan nilai 98,14.
11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL BPSPL Padang dengan target tahunan 71,5 telah tercapai dengan nilai 97,14.
12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang dengan target tahunan empat (4) Dokumen telah tercapai sesuai target empat (4) Dokumen.
13. Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang dengan target tahunan 80 telah tercapai dengan nilai 89,04.
14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang dengan target 95% telah tercapai dengan persentase 100%.
15. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Padang dengan target tahunan 100% telah tercapai dengan persentase 100%.
16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Padang dengan target tahunan 85 telah tercapai dengan nilai 90,40.
17. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Padang dengan target tahunan 80 telah tercapai dengan nilai 81,5.
18. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Padang dengan target 76% telah tercapai 100%.
19. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang dengan target tahunan 91 telah tercapai dengan nilai 100.

Berdasarkan uraian capaian tersebut, BPSPL Padang telah mencapai seluruh indikator kinerja yang dijadwalkan pada tahun 2025 dengan persentase $\geq 100\%$. Pencapaian tersebut juga didukung dengan adanya alokasi **pagu anggaran sejumlah Rp21.875.827.000,00** (Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, 57,7% bersumber dari Rupiah Murni sementara 42,3% bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hingga akhir tahun 2025, terdapat blokir terhadap anggaran tersebut sejumlah Rp 2.894.914.000 (Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah). Blokir tersebut merupakan blokir efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 (Kode Blokir A). Pada tahun 2025, realisasi anggaran **Rp18.739.962.530,00** (Delapan Belas Juta Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ratus Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan **persentase 85,67%**.

Upaya tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, yaitu berkoordinasi dengan Tim Kerja Program Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan sehubungan dengan indikator kinerja yang terdampak oleh blokir anggaran, telah ditindaklanjuti dengan tuntas. Sementara itu, rekomendasi untuk tahun mendatang adalah melaksanakan dialog kinerja sehubungan dengan adanya transformasi unit kerja BPSPL Padang menjadi Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel.....	xii
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	1
1.3 Perkembangan Lingkungan Kerja Strategis.....	4
1.4 Sistematika Penyajian Laporan	8
II. Perencanaan Kinerja	9
2.1. Rencana Strategis 2025 s.d. 2029	9
2.2. Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	9
2.3. Postur Anggaran 2025	13
III. Akuntabilitas Kinerja.....	16
3.1. Capaian Kinerja	16
IKU. 1. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Provinsi).....	18
A. Capaian Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah	18
B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	18
C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah	18
D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar	18
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	19
F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	19
G. Kegiatan Pendukung.....	19
IKU. 2. Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Orang).....	20
A. Capaian Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi	20
B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	20
C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah	20
D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar	20
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	21
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	21
G. Kegiatan Pendukung.....	21
IKU. 3. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	21

A. Capaian Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi	22
B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	22
C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah	23
D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan BPSPL Makassar	23
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	23
F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	23
G. Kegiatan Pendukung.....	23
IKU. 4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	26
A. Capaian Jenis Ikan Dilindungi yang Dilakukan Upaya Pengelolaannya.....	26
B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	26
C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah	27
D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar	27
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	27
F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
G. Kegiatan Pendukung.....	28
IKU. 5. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	35
A. Capaian Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan.....	35
B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.....	35
C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah	36
D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar	36
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	37
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
G. Kegiatan Pendukung.....	37
IKU. 6. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)	43
A. Capaian Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan	43
B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya	43
C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah	43
D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar	44
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	44
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
G. Kegiatan Pendukung.....	44

IKU. 7. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)	48
A. Capaian Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun	48
B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	49
C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah	49
D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar	49
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	49
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
G. Kegiatan Pendukung.....	49
IKU. 8. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)	52
A. Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut.....	53
B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	53
C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	53
D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar	53
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	54
F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
G. Kegiatan Pendukung.....	54
IKM. 9. Nilai PM SAKIP BPSPL Padang (Nilai).....	57
A. Capaian Nilai PM SAKIP BPSPL Padang	57
B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	58
C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah	58
D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar	58
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	59
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59
G. Kegiatan Pendukung.....	59
IKM. 10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA BPSPL Padang (Nilai).....	59
A. Capaian Nilai IKPA BPSPL Padang	60
B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	60
C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan target Rencana Jangka Menengah	62
D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar	62
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	62
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	63
G. Kegiatan Pendukung.....	63
IKM. 11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPKRL BPSPL Padang (Nilai)	63

A.	Capaian NKPA BPSPL Padang.....	63
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	64
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah	64
D.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar	65
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	65
F.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	65
G.	Kegiatan Pendukung.....	65
IKM. 12.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen).....	65
A.	Capaian Laporan SPIP yang Disusun	65
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	66
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah	66
D.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar	66
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	67
F.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	67
G.	Kegiatan Pendukung.....	67
IKM. 13.	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang (Indeks).....	67
A.	Capaian IP ASN BPSPL Padang.....	68
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	68
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah	69
D.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar	69
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	69
F.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	70
G.	Kegiatan Pendukung.....	70
IKM. 14.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang (%)	70
A.	Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja 70	
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	71
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah	71
D.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar	71
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	71
F.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	72
G.	Kegiatan Pendukung.....	72
IKM. 15.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Padang (%)	72
A.	Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK	72
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	72

C.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah	72
D.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar	73
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	73
F.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	73
G.	Kegiatan Pendukung.....	73
IKM. 16.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Padang (Nilai).....	73
A.	Capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM	73
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	74
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah	74
D.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar	75
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	75
F.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	75
G.	Kegiatan Pendukung.....	75
IKM. 17.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Padang (Nilai).....	75
A.	Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	76
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	76
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah	76
D.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar	76
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	77
F.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	77
G.	Kegiatan Pendukung.....	77
IKM. 18.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Padang (%) 77	
A.	Capaian Persentase RUP PBJ yang Diumumkan pada SIRUP.....	77
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	78
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah	78
D.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar	78
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	78
F.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	78
G.	Kegiatan Pendukung.....	78
IKM. 19.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang (Nilai)	78
A.	Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik	79
B.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	79
C.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	79
D.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar	79



E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	80
F.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	80
G.	Kegiatan Pendukung.....	80
3. 2.	Realisasi Anggaran.....	80
IV.	Penutup	83
4.1.	Kesimpulan.....	83
4.2.	Rekomendasi.....	84
4.3.	Tindak Lanjut Rekomendasi	84
LAMPIRAN		86

Daftar Gambar

Gambar 1. Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2025.....	2
Gambar 2. Struktur Organisasi BPSPL Padang.....	3
Gambar 3. Analisis SWOT Lingkungan Strategis BPSPL Padang.....	8
Gambar 5. NKO BPSPL Padang Tahun 2025	16
Gambar 6. Dokumentasi Pendampingan Teknis Penilaian EVIKA 2025.....	19
Gambar 7. Dokumentasi Pemberdayaan Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi	21
Gambar 8. Perbandingan Capaian Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi dengan Tahun Sebelumnya	23
Gambar 9. Dokumentasi Pembahasan Draft PKS dengan Yayasan Fifan Laut Nusantara	23
Gambar 10. Dokumentasi Koordinasi Kerja Sama di CSC BPSPL Padang.....	24
Gambar 11. Dokumentasi Pembahasan Bersama Yayasan Fifan Laut Nusantara	25
Gambar 12. Penyampaian Draf PKS Yayasan Fifan Laut Nusantara	25
Gambar 13. Perbandingan Capaian Jenis Ikan Dilindungi yang Dilakukan Upaya Pengelolaannya dengan Tahun Sebelumnya.....	27
Gambar 14. Status Eksploitasi Perikanan Berdasarkan Nilai SPR	28
Gambar 15. Pendataan Terubuk di Provinsi Riau	28
Gambar 16. SPR Terubuk Riau 2025	29
Gambar 17. Pendataan Terubuk di Provinsi Sumatra Utara.....	29
Gambar 18. SPR Terubuk Kabupaten Labuhan Batu 2025.....	30
Gambar 19. Pendataan Belida di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan	30
Gambar 20. Dokumentasi Pendataan Belida di Kabupaten Tebo, Jambi	31
Gambar 21. Dokumentasi Pendataan Penyu di Kabupaten Kepulauan Mentawai	32
Gambar 22. Dokumentasi Pendataan Penyu di Kabupaten Simeulue	32
Gambar 23. Penanganan Biota Laut Dilindungi	33
Gambar 24. Dokumentasi Penanganan Biota Laut Dilindungi	34
Gambar 25. Jumlah Kemuculan Buaya di Wilker BPSPL Padang Tahun 2025	34
Gambar 26. Penanganan Kemunculan Buaya di Wilayah Kerja BPSPL Padang.....	34
Gambar 27. Perbandingan Capaian Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan dengan Tahun Sebelumnya.....	36
Gambar 28. Perolehan PNPB BPSPL Padang Tahun 2025.....	38
Gambar 29. Pendataan Hiu dan Pari di PPS Lampulo, Banda Aceh	38
Gambar 30. Pendataan Hiu dan Pari di PPN Idi, Aceh Timur.....	38
Gambar 31. Pendataan Hiu dan Pari di Ujung Serangga, Aceh Barat Daya	39
Gambar 32. Pendataan Hiu dan Pari di Aceh Jaya	40
Gambar 33. Pendataan Hiu dan Pari di Aceh Barat.....	40
Gambar 34. Pendataan Hiu dan Pari di Sibolga.....	41
Gambar 35. Pendataan Hiu dan Pari di Kelurahan Kawal, Kabupaten Bintan	41
Gambar 36. Pendataan Hiu dan Pari di Pantai Penampar, Kabupaten Bengkalis.....	42
Gambar 37. Pendataan Sidat di Kabupaten Agam	42
Gambar 38. Piagam Penghargaan Petugas Pelayanan Terbaik Triwulan I 2025.....	44
Gambar 39. Piagam Penghargaan Petugas Pelayanan Terbaik Triwulan II 2025.....	45
Gambar 40. Piagam Penghargaan Petugas Pelayanan Terbaik Triwulan III 2025.....	45
Gambar 41. Piagam Penghargaan Petugas Pelayanan Terbaik Triwulan IV 2025	45
Gambar 42. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I 2025	46
Gambar 43. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II 2025	47
Gambar 44. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III 2025	48
Gambar 45. Dokumentasi Identifikasi Pemanfaatan Pulau Kecil di Nias Barat	50
Gambar 46. Dokumentasi Identifikasi Pemanfaatan Pulau Kecil di Kepulauan Mentawai	50
Gambar 47. Dokumentasi Identifikasi Pemanfaatan Pulau Kecil di Bintan.....	50

Gambar 48. Dokumentasi Identifikasi Pemanfaatan Pulau Kecil di Lingga	51
Gambar 49. Dokumentasi Identifikasi Pemanfaatan Pulau Kecil di Kepulauan Mentawai	51
Gambar 50. Dokumentasi Identifikasi Pemanfaatan Pulau Kecil di Simeulue	51
Gambar 51. Dokumentasi Identifikasi Pemanfaatan Pulau Kecil di Tanjung Jabung Timur.....	52
Gambar 52. Dokumentasi Identifikasi Pemanfaatan Pulau Kecil di Batam	52
Gambar 53. Dokumentasi Identifikasi Pemanfaatan Pulau Kecil di Pesisir Selatan	52
Gambar 54. Penilaian Teknis KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2025	54
Gambar 55. Penilaian Teknis yang Dilaksanakan oleh BPSPL Padang Tahun 2025.....	55
Gambar 56. Verifikasi Lapangan KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2025	55
Gambar 57. Identifikasi KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2025	56
Gambar 58. Pengendalian KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2025	56
Gambar 59. Perbandingan Nilai PM SAKIP dengan Tahun Sebelumnya	58
Gambar 60. Capaian IKPA Tahun 2025	60
Gambar 61. Perbandingan Capaian Nilai IKPA dengan Tahun Sebelumnya	62
Gambar 62. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025.....	64
Gambar 63. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Tahun Sebelumnya	64
Gambar 64. Perbandingan Laporan SPIP yang Disusun dengan Tahun Sebelumnya	66
Gambar 65. IP ASN Tahun 2025.....	68
Gambar 66. Perbandingan IP ASN dengan Tahun Sebelumnya	69
Gambar 67. Status Tindak Lanjut Hasil Pemantauan terhadap BPSPL Padang.....	71
Gambar 68. Perbandingan Nilai WBK dengan Tahun Sebelumnya	74
Gambar 69. Tampilan Website PPID BPSPL Padang.....	80
Gambar 70. Realisasi Anggaran Tahun 2025	81

Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang (Awal)	9
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	10
Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	10
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Final)	11
Tabel 5. Perubahan Indikator Kinerja Tahun 2025	12
Tabel 6. Rincian Blokir Efisiensi (I)	13
Tabel 7. Rincian Blokir Efisiensi Pasca Pergeseran Kode Blokir	14
Tabel 8. Perkembangan Rincian Blokir pada Juni 2025	14
Tabel 9. Perkembangan Rincian Blokir Pasca Penambahan PNBP	15
Tabel 10. Rincian Blokir Final	15
Tabel 11. Rincian Capaian Kinerja BPSPL Padang Tahun 2025	16
Tabel 12. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1	18
Tabel 13. Perbandingan Capaian Fasilitas Penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Daerah dengan BPSPL Makassar	18
Tabel 14. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2	20
Tabel 15. Perbandingan Capaian Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi Daerah dengan BPSPL Makassar	21
Tabel 16. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3	22
Tabel 17. Penyampaian Draf PKS PT Mifa Bersaudara	24
Tabel 18. Perbandingan Target dan Capaian IKU 4	26
Tabel 19. Rincian Capaian Jenis Ikan Dilindungi yang Dilakukan Upaya Pengelolaannya	26
Tabel 20. Tabulasi Data Pendaratan Penyu di Desa Betumonga, Kep. Mentawai	32
Tabel 21. Tabulasi Data Pendaratan Penyu di Pulau Salaut Besar, Kab. Simeulue	33
Tabel 22. Perbandingan Target dan Capaian IKU 5	35
Tabel 23. Rincian Capaian Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan	36
Tabel 24. Perbandingan Capaian Pengelolaan Jenis Ikan yang Dimanfaatkan dengan BPSPL Makassar	36
Tabel 25. Rekapitulasi Pelayanan Jenis Ikan yang Dimanfaatkan Tahun 2025	37
Tabel 26. Perbandingan Target dan Capaian IKU 6	43
Tabel 27. Perbandingan Capaian Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan dengan BPSPL Makassar	44
Tabel 28. Perbandingan Target dan Capaian IKU 7	49
Tabel 29. Perbandingan Capaian Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan BPSPL Makassar	49
Tabel 30. Perbandingan Target dan Capaian IKU 8	53
Tabel 31. Perbandingan Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut dengan BPSPL Makassar	53
Tabel 32. Perbandingan Target dan Capaian IKM 9	57
Tabel 33. Nilai AKIP BPSPL Padang 2025	57
Tabel 34. Perbandingan Nilai PM SAKIP dengan BPSPL Makassar	59
Tabel 35. Perbandingan Komponen Penilaian PM SAKIP	59
Tabel 36. Perbandingan Target dan Capaian IKM 10	60
Tabel 37. Perbandingan Indikator Penilaian IKPA Tahun 2020 s.d. 2025	61
Tabel 38. Perbandingan Nilai IKPA dengan BPSPL Makassar	62
Tabel 39. Perbandingan Komponen Penilaian IKPA	62
Tabel 40. Perbandingan Target dan Capaian IKM 11	63
Tabel 41. Perbandingan NKPA dengan BPSPL Makassar	65
Tabel 42. Perbandingan Komponen Penilaian NKPA	65
Tabel 43. Perbandingan Target dan Capaian IKM 12	66



Tabel 44. Perbandingan Laporan SPIP yang Dlsusun dengan BPSPL Makassar	66
Tabel 45. Perbandingan Target dan Capaian IKM 13	68
Tabel 46. Perbandingan IP ASN dengan BPSPL Makassar.....	69
Tabel 47. Perbandingan Penilaian Komponen IP ASN	69
Tabel 48. Perbandingan Target dan Capaian IKM 14	70
Tabel 49. Status Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan pada Tahun 2025.....	70
Tabel 50. Perbandingan Rekomendasi Hasil Pengawasan yang DImanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja dengan BPSPL Makassar.....	71
Tabel 51. Perbandingan Target dan Capaian IKM 15	72
Tabel 52. Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK dengan BPSPL Makassar	73
Tabel 53. Perbandingan Target dan Capaian IKM 16	74
Tabel 54. Perbandingan Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM dengan BPSPL Makassar.....	75
Tabel 55. Perbandingan Target dan Capaian IKM 17	76
Tabel 56. Capaian Nilai Pengawasan Internal Kearsipan BPSPL Padang.....	76
Tabel 57. Perbandingan Nilai Pengawasan Internal Kearsipan dengan BPSPL Makassar	76
Tabel 58. Perbandingan Penilaian Komponen Nilai Pengawasan Internal Kearsipan	77
Tabel 59. Perbandingan Target dan Capaian IKM 18	77
Tabel 60. Perbandingan Capaian Persentase RUP PBJ yang Diumumkan dengan BPSPL Makassar	78
Tabel 61. Perbandingan Target dan Capaian IKM 19	79
Tabel 62. Perbandingan Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan BPSPL Makassar	79
Tabel 63. Realisasi Anggaran BPSPL Padang Tahun 2025.....	81

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSPL Padang secara proposional dan profesional berupaya mencapai hasil yang baik dengan mengutamakan transparansi dan keterbukaan pada setiap kegiatan dengan cara melaporkan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) yang disusun setiap triwulan. LKj Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2025 merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban atas pencapaian dari tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama periode tersebut, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam penyajiannya, laporan ini dilengkapi dengan hasil capaian target dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan BPSPL Padang yang berpedoman pada sasaran strategis yang diturunkan dalam bentuk Indikator Kinerja (IK). Adapun hasil capaian kinerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana, prasarana, dan anggaran pendukung kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan BPSPL Padang.

1.2 Tugas dan Fungsi

BPSPL Padang sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) Kementerian Kelautan dan Perikanan, memiliki peran dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) yang berorientasi menyukseskan rencana pembangunan nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang termaktub dalam prioritas nasional yaitu lingkungan hidup, penanggulangan bencana yang dilaksanakan melalui konservasi dan pemanfaatan lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil disertai penguasaan dan pengelolaan risiko. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir adalah:

1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
2. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
3. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
4. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetic ikan;
5. pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
6. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
7. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
8. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
9. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BPSPL Padang memiliki wilayah kerja meliputi tujuh (7) Provinsi se-Sumatera yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup 60 Kabupaten/Kota Pesisir se-Sumatera. Selain itu, BPSPL Padang juga memiliki kantor wilayah kerja/satuan kerja (Satker) dan gerai pelayanan di Medan, Tanjungpinang, Pekanbaru, Banda Aceh, Jambi, Palembang, dan Batam.



Gambar 1. Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2025

Total Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BPSPL Padang pada tahun 2025 dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi adalah 60 orang, yang terdiri dari 37 orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 orang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), 8 orang berstatus P3K Paruh Waktu, dan 9 orang berstatus sebagai pegawai outsourcing. Lebih lanjut, mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tim Kerja lingkup BPSPL Padang terdiri dari empat tim, meliputi Perlindungan dan Pelestarian, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut, dan Dukungan Manajemen.

Dalam perkembangannya, pada tahun 2025 ini terdapat restrukturisasi organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menjadi dua Direktorat Jenderal yang berbeda, yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL). Dalam hal ini, pada tahun 2025, yang mana merupakan masa transisi, BPSPL Padang masih mendapat mandat penugasan dari kedua Direktorat Jenderal tersebut sebelum akhirnya bertransformasi menjadi unit kerja DJPRL, yaitu Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang.

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Dr. Rahmat Irfansyah, M.Si.
Kepala Balai

Fahrur Rozi, SH
Ka. Subbagian Umum

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 KRIS HANDOKO, A.Pi, MT PENGELOLA EKSPLOITASI LAUT DAN PESISIR AHLI MUDA	 MARIKAL KISMAL, S.E, M.Si ANALIS PENGELOLAAN JASA KELAUTAN AHLI MUDA	 HENDRISMAN, S.ST ANALIS PENGELOLAAN JASA KELAUTAN AHLI MUDA	 AFROZON, S.Sos ANALIS PENGELOLAAN JASA KELAUTAN AHLI MUDA	 LENNY MATETIA SITNAK, S.Pi, MSc ANALIS PENGELOLAAN JASA KELAUTAN AHLI MUDA	 HADI PRAYITNO, S.Kel, M.Si ANALIS PENGELOLAAN JASA KELAUTAN AHLI MUDA	 SUPRATRI, S.Si, M.Si PENGELOLA EKSPLOITASI LAUT DAN PESISIR AHLI MUDA	 FAUZI FATMAH, S.Kel ANALIS PENGELOLAAN JASA KELAUTAN AHLI MUDA	 RIZKI WALNUR, S.Kel ANALIS PENGELOLAAN JASA KELAUTAN AHLI MUDA	
 SUSAN FARHA YUDI, S.Si, MM ANALIS KONSERVASI AHLI PERTAMA	 TRY AL TANTO, S.Pi, M.Si ANALIS PENGELOLAAN JASA KELAUTAN AHLI MUDA	 NURIKA BB PWRE, S.Pi PENGELOLA EKSPLOITASI LAUT DAN PESISIR AHLI MUDA	 DINA ARTA PURNAMA, S.Si PENGELOLA EKSPLOITASI LAUT DAN PESISIR AHLI MUDA	 MUHAMMAD HUSNI, S.E, M.Si ANALIS PENGELOLAAN KELAUTAN AHLI MUDA	 WILLY FIL KORMALI, S.Si ANALIS PENGELOLAAN JASA KELAUTAN AHLI MUDA	 LUCKY DWI NANDA, S.Si ANALIS PENGADAAN AHLI PERTAMA	 WINDA EVIHERAN, S.Pi PENGELOLA EKSPLOITASI LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA	 LOWEHRAN ARISTON, S.Kel DAN PESISIR AHLI PERTAMA	 DINI ASMAN, S.Pi ANALIS PENGELOLAAN JASA KELAUTAN AHLI PERTAMA
 MALDI, S.Pi ANALIS PENGELOLAAN JASA KELAUTAN AHLI PERTAMA	 EVIHERU EVIHERAN, S.T ANALIS PENGELOLAAN JASA KELAUTAN AHLI PERTAMA	 ERI DONI, S.Pi ANALIS PENGELOLAAN JASA KELAUTAN AHLI PERTAMA	 TASHA MARY, S.Kel ANALIS PENGELOLAAN JASA KELAUTAN AHLI PERTAMA	 M. AFWAN SHADI VIHARYO, S.Si ANALIS PENGELOLAAN JASA KELAUTAN AHLI PERTAMA	 MASDADI HELMY SYAMSUL, S.Pi ANALIS PERENCANAAN AHLI PERTAMA	 DARNESA DORA WICAKAWINA, S.Kel ANALIS PERENCANAAN AHLI PERTAMA	 MUHAMMAD FERYUM, S.Si DAN PESISIR AHLI PERTAMA	 FADLY PRATAMA WELAYA, S.Pi DAN PESISIR AHLI PERTAMA	
 MELODY VIRGINIA, S.Kel PENGELOLA EKSPLOITASI LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA	 TRI NUR SULATMIKO, S.Kel PENGELOLA EKSPLOITASI LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA	 NUR FIDDAUS, S.Si PENGELOLA EKSPLOITASI LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA	 DINA SAN AFRIDA TANGSAN, S.T DAN PESISIR AHLI PERTAMA	 RIO FAJAR YULMAN, S.Kel PENGELOLA EKSPLOITASI LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA	 DARNAHAD KAMIL, S.Pi ANALIS PENGELOLAAN JASA KELAUTAN AHLI PERTAMA	 NURILA LELE FALDHANTI, S.Si PENGELOLA EKSPLOITASI LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA	 NELLY ANDIA, S.Si PENGELOLA EKSPLOITASI LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA	 ANANG RURANTO, S.Kel PENGELOLA EKSPLOITASI LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA	 AZZAMI BAYITO, S.Si PENGELOLA EKSPLOITASI LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA
 CINDI MARELA, S.Pi PENGELOLA EKSPLOITASI LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA	 FADEL MUHAMMAD, S.Kel PENGELOLA EKSPLOITASI LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA	 KETAN NURZAUHA KASWANTO, S.Pi PENGELOLA EKSPLOITASI LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA	 YULISTA NOVELIANA, S.Pi ANALIS PENGELOLAAN JASA KELAUTAN AHLI PERTAMA	 RIKA PERMATA SARI, S.Si ANALIS PENGELOLAAN JASA KELAUTAN AHLI PERTAMA	 NILA ELPHIRA, S.Si ANALIS PENGELOLAAN JASA KELAUTAN AHLI PERTAMA	 ANGGITA SHERYL TRIYANTI, S.Pi PENGELOLA EKSPLOITASI LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA	 LINTANG FAUZA IHSANI, S.Si ANALIS PENGELOLAAN JASA KELAUTAN AHLI PERTAMA	 METRO SWANDIKO, S.Si PENGELOLA EKSPLOITASI LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA	

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

 RICE MUHAMMAD RIZKAN, S.Si ANALIS KONSERVASI DAN REHABILITASI WILAYAH PESISIR	 HADE HAMBRATA, S.E ANALIS JASA KELAUTAN	 PODA BONARI PURNAWIDJANTA, S.Pi ANALIS PESISIR DAN PULAU - PULAU KEEL	 KABIR HIDAYAT, S.Si ANALIS KELAUTAN DAN PERIKANAN	 DWI MEGAPURNO KUSARI, S.Pi ANALIS KELAUTAN DAN PERIKANAN	 LEGITA MARIA RAMALIA, S.T ANALIS MONITORING, KUALITAS, DAN PELAKSIAN	 MUTIARA KOMANG SARI, S.T ANALIS MONITORING, KUALITAS, DAN PELAKSIAN	 HENRY TRISA PUTRA PENGAWAS KAWASAN APM TERAMPIL	 JULIO IKA PUTRI PENGAWAS KAWASAN APM TERAMPIL	 HENRY OLYVIA, S.Mi PENGAWAS KAWASAN APM TERAMPIL
--	---	---	--	---	---	---	--	--	---

SUB BAGIAN UMUM

PPNPN, PJLP & KONTRAK

 EKA FAJAR DINDA, S.TPi PENGAWAS KAWASAN APM PELAYANAN CITES	 M. YULINDA SATYA, S.Pi PENGAWAS KAWASAN APM PELAYANAN CITES	 SALMAN SIMATUPANG, S.Pi PENGAWAS KAWASAN APM PELAYANAN CITES	 ALVIA MASDINI, S.Pi PENGAWAS KAWASAN APM PELAYANAN CITES	 HERRY ASRIAL, A.Mi PENGAWAS KAWASAN APM PELAYANAN CITES	 CANTIKA HIDAYAT, S.Pi PENGAWAS KAWASAN APM PELAYANAN CITES	 RENGALYA RISMAR, S.Pi PENGAWAS KAWASAN APM PELAYANAN CITES	 SETYO BUDI, S.Pi PENGAWAS KAWASAN APM PELAYANAN CITES	 HADI ABDULLAH, S.Pi PENGAWAS KAWASAN APM PELAYANAN CITES	 REIMAN M. Satrio, S.Pi PENGAWAS KAWASAN APM PELAYANAN CITES
 SUDARMO, S.Pi PENGAWAS KAWASAN APM PELAYANAN CITES	 BURHAN, S.Pi PENGAWAS KAWASAN APM PELAYANAN CITES	 JONY EFFENDI, S.Pi PENGAWAS KAWASAN APM PELAYANAN CITES	 FIRDAUS KUSUMA, S.Pi PENGAWAS KAWASAN APM PELAYANAN CITES	 TONY JURNADI, S.Pi PENGAWAS KAWASAN APM PELAYANAN CITES	 ABDUL GANI, S.Pi PENGAWAS KAWASAN APM PELAYANAN CITES	 ANDRIE ALMUST, S.Pi PENGAWAS KAWASAN APM PELAYANAN CITES	 IWAN SYAHPUTRA, S.Pi PENGAWAS KAWASAN APM PELAYANAN CITES		

kkp.go.id/bpsplpadang

0811 7066 639

@bpsplpadang



Gambar 2. Struktur Organisasi BPSPL Padang

1.3 Perkembangan Lingkungan Kerja Strategis

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecilnya yang sangat potensial. Indonesia memiliki *megabiodiversity*, yang mencakup keanekaragaman genetic, spesies, dan ekosistem. Kondisi tersebut memberikan beragam manfaat melalui penyediaan jasa ekosistem, baik penyediaan makanan dan obat-obatan, sebagai penyangga kehidupan ekosistem, serta memberikan beragam manfaat ekonomi jika dikelola secara bijak. Pengelolaan yang bertanggung jawab memberikan *multiplier effect* yang akan mengantarkan pada kondisi lingkungan pesisir dan pulau kecil yang optimal sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berketahanan pangan, berketahanan iklim dan meningkatkan kesejahteraan.

Wilayah kerja BPSPL Padang memiliki karakteristik perairan yang khas. Di bagian barat, khas dengan ekosistem pesisir yang dipengaruhi oleh dinamika perairan Samudera Hindia, sedangkan di bagian timur, khas dengan beragam tipe ekosistem yang dipengaruhi oleh kondisi perairan Selat Malaka. Kondisi tersebut memberikan beragam potensi keanekaragaman hayati yang melimpah. Berikut adalah beberapa potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah kerja BPSPL Padang:

- 1) Perencanaan Ruang Laut
 - a. Enam provinsi dari tujuh provinsi wilayah kerja BPSPL Padang telah mencapai proses integrasi RTRW Provinsi,
 - b. Telah terbit 442 perizinan KKPR di wilayah kerja BPSPL Padang dalam kurun waktu 2020 s.d. 2024.
- 2) Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut
 - a. Terdapat luas kawasan konservasi perairan daerah sebesar 4,84 Juta Ha di wilayah kerja BPSPL Padang yang perlu didorong pengelolaannya secara optimum;
 - b. Letak Indonesia yang berada di kawasan segitiga terumbu karang dunia (*coral triangle*), menjadikan Indonesia dipertimbangkan sebagai pusat keanekaragaman terumbu karang dunia. Sebanyak sekitar 569 jenis karang yang termasuk dalam 82 genus karang dijumpai di Indonesia. Berdasarkan kebijakan satu peta (*one map policy*) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011, dirilis bahwa luas terumbu karang di Indonesia berdasar analisis dari citra satelit adalah sekitar 2.517.858 Ha, dimana 19% atau sekitar 478.587 Ha diantaranya berada di Perairan Sumatera;
 - c. Terdapat 13 target kehati prioritas pengelolaan KKP di wilayah kerja BPSPL Padang meliputi: Penyu, Kuda Laut, Napoleon, Sidat, Teripang, Lola, Kima, Terubuk, Hiu, Pari dan mamalia laut (Paus, Dugong) serta Karang;
 - d. Keanekaragaman hayati endemik yang hanya dijumpai di selat Malaka, yaitu terubuk jenis *Tenulosa ilisha* yang salah satu habitat pentingnya ada di Labuhan Batu, dan jenis *Tenulosa macrura* yang ada di selat Bengkalis;
 - e. Keberadaan Penyu Belimbing di Betumonga yang merupakan salah satu jenis penyu langka di Wilayah Kerja BPSPL Padang;
 - f. Telah dilakukan upaya monitoring secara berkesinambungan melalui pendataan penyu belimbing di site betumonga (sejak tahun 2019), pendaratan Hiu dan Pari di Sibolga dan Aceh Selatan (sejak tahun 2019) serta Kuda Laut di Bintan (sejak tahun 2018);
 - g. Aksi bersama perlindungan keanekaragaman hayati laut melalui FKPP Sumbar dan Forum Pelestarian Terubuk Riau;
 - h. Terdapat potensi kelompok penggerak konservasi dengan kegiatan berupa perlindungan jenis, kawasan dan ekosistem pesisir di wilayah kerja BPSPL Padang.
 - i. Pangsa pasar internasional produk hiu pari non appendiks CITES meliputi beberapa negara antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, China, Italia. Spanyol, hingga Meksiko.

3) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil

- a. Potensi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sejumlah 39 PPKT di wilayah kerja BPSPL Padang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017;
- b. Potensi luasan ekosistem mangrove di wilayah kerja BPSPL Padang sejumlah 810.171 Ha. Berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, KLHK, tahun 2020, Indonesia memiliki areal seluas 3.329.219 Ha. 16,43% luasan mangrove nasional tersebut berada di wilayah kerja BPSPL Padang, atau seluas 547,022 Ha, yang tersebar di Provinsi Aceh (32.824 Ha), Provinsi Sumatera Utara (57.898 Ha), Provinsi Sumatera Barat (18.084 Ha), Provinsi Sumatera Selatan (158.845 Ha), Provinsi Jambi (10.082 Ha), Provinsi Riau (212.857 Ha), dan Kepulauan Riau (56.432 Ha). Provinsi Riau merupakan Provinsi yang memiliki luasan mangrove terluas di wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu 38,91%, sedangkan Provinsi terendah luasannya adalah Provinsi Jambi yang hanya sebesar 1,84%.
- c. Terdapat potensi kelompok pegiat mangrove di pesisir wilayah kerja BPSPL Padang sejumlah 49 Kelompok.

4) Pemanfaatan Jasa Kelautan

- a. Potensi petambak garam tradisional di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireun Provinsi Aceh;
- b. Potensi distributor dan pengolah garam di Kab. Bireun yang telah berstandar nasional dengan jangkauan pasar regional;
- c. Terdapat potensi jenis biota yang dapat dimanfaatkan sebagai produk biofarmakologi berupa rumput laut, kuda laut dan teripang;
- d. Kawasan pesisir di Sibolga termasuk dala Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Sibolga dan sekitarnya yang dapat didukung pengembangannya melalui Desa Wisata

Seiring dengan perkembangannya, potensi yang dimiliki tersebut dapat menghasilkan tantangan dan permasalahan dalam pengelolaannya. Pada saat ini, BPSPL Padang memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui berbagai program dan kegiatan. Sebagian tantangan tersebut adalah program dan kegiatan yang belum diselesaikan pada periode sebelumnya dan sebagiannya lagi adalah tantangan terhadap dinamika kebijakan program pembangunan yang semakin kompleks. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- 1) Banyaknya kepentingan yang memanfaatkan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil sehingga terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya di dalamnya. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan yang kurang memperhatikan daya tampung dan daya dukungnya. Tarik menarik antar beragam kepentingan terhadap ruang laut, pesisir dan pulau–pulau kecil menyebabkan beberapa provinsi di wilayah kerja BPSPL Padang, menjadi terkendala dalam upaya pengesahan ranperda RZWP3K nya, yang diharapkan mampu menjadi alat pengendalian pemanfaatan potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau–pulau kecil secara berkelanjutan. Dalam rentang waktu 2015–2020, dari 7 Provinsi di wilayah kerja BPSPL Padang, 2 di antaranya masih belum dapat disahkan menjadi produk hukum sehingga perlu program akselerasi dan pendampingan yang lebih intensif, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, tantangan secara lebih spesifik, adalah penyelesaian potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang laut diselesaikan melalui Penyusunan rencana zonasi antara kawasan (RZ KAW), rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (RZ-KSNT);
- 2) Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebabkan perubahan tata Kelola terkait pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau–pulau kecil. Salah satunya adalah amanat untuk mengintegrasikan RTRW dan RZWP3K menjadi satu produk hukum tata ruang sebagai rujukan pemanfaatan ruang dan sumber daya laut, pesisir dan pulau–pulau kecil. Proses integrasi tersebut menjadi tantangan untuk dapat diselesaikan melalui program dan kegiatan akselerasi dan pendampingan penyusunannya. Proses integrasi tersebut merupakan suatu terobosan penting dalam melihat ruang

perairan dan darat dalam satu persepektif integratif dan holistik. Namun demikian ada banyak penyesuaian substansi dan administrasi sehingga menghasilkan suatu produk hukum yang berkualitas, memenuhi kaidah keberlanjutan dan partisipasi masyarakat;

- 3) Pemanfaatan ruang laut dan potensi sumber daya di dalamnya perlu dikelola melalui mekanisme pengendalian dan pengawasan sehingga pemanfaatannya dapat dipastikan mengikuti koridor keberlanjutan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang laut yang disusun. Pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan dengan program dan kegiatan operasionalisasi permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang laut yang diwujudkan melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL);
- 4) Dalam rangka memenuhi Aichi Target yang memandatkan perlunya melakukan konservasi seluas 10% dari luas perairan, pesisir dan pulau kecil atau sekitar 32,5 juta Ha. Di wilayah kerja BPSPL Padang, kawasan konservasi perairan ada di semua Provinsi namun pengelolaannya belum efektif termasuk di dalamnya adalah upaya peningkatan status perlindungan kawasan konservasi yang baru pada status pencadangan dan belum ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana luasan kawasan konservasi yang akan dicapai dapat berjalan beriringan dengan efektivitas pengelolaannya sehingga keberadaan kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan peningkatan kesejahteraan serta nilai ekonomi kawasan. Salah satu program dan kegiatan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- 5) Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES belum optimal. KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu dilakukan penguatan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendix *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendix CITES termasuk di dalamnya pengembangan ilmu dan teknologi. Tantangan selanjutnya adalah terkait adanya rencana pelimpahan kewenangan/managemen *authorities* untuk jenis ikan bersirip (pisces) dari KLHK kepada KKP. Terkait hal itu, maka UPT diharapkan mampu menyelenggarakan issue perdagangan jenis ikan yang sebelumnya dikelola oleh KLHK, dimana di dalamnya mencakup perijinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Salah satu dari jenis ikan tersebut adalah ikan Arwana, dimana komoditas tersebut termasuk banyak diperdagangkan di Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan;
- 6) Wilayah kerja BPSPL Padang, memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi, meliputi kuda laut, teripang, lola, kima, hiu-pari, mamalia laut, napoleon, dugong, penyu, sidat, terumbu karang, terubuk, ikan purba, dan beragam jenis kehati lainnya. Keberadaannya semakin terancam akibat semakin meningkatnya tekanan habitat di alam oleh aktivitas antropogenik meliputi over-eksploitasi, *bycatch*, *spesies invasive*, kerusakan habitat, dan lain sebagainya. Permasalahan ini mendorong perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengelolaan kehati agar dapat terjaga habitat dan keanekaragaman hayati di dalamnya sesuai dengan kerangka rencana aksi dari masing-masing keanekaragaman hayati prioritas pengelolaan. Kondisi tersebut diperparah dengan asih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian biota laut yang dilindungi. Hal ini terus dilakukan kegiatan sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam appendix CITES kepada masyarakat;

- 7) Meningkatnya dampak negatif adanya fenomena perubahan iklim menyebabkan permasalahan ketahanan pesisir, diantaranya adalah ancaman abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir serta kerusakan ekosistem terumbu karang akibat adanya *coral bleaching*. Hal ini dilakukan melalui rehabilitasi pesisir dengan program dan kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pelindung pantai serta penguatan ketahanan sosial masyarakat pesisir melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan ekosistem mangrove. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi upaya mitigasi dan adaptasi terhadap adanya fenomena perubahan iklim di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 8) Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu jalur transportasi laut yang cukup padat. Kondisi tersebut membawa dampak terjadinya peningkatan pencemaran pesisir dan laut dengan meningkatnya intensitas kejadian tumpahan minyak. Kondisi tersebut mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati dan habitatnya. Sehingga perlu adanya program dan kegiatan yang dapat menjawab tantangan dari permasalahan tersebut;
- 9) Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem. BPSPL Padang telah diberikan mandat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penatakelolaan dan pendayagunaan PPKT agar menjadi objek dan asset pembangunan yang bernilai strategis untuk meningkatkan daya guna lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan negara. Dari 111 PPKT, 39 PPKT berada di wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu 7 PPKT di Provinsi Aceh, 3 PPKT di Provinsi Sumatera Utara, 3 PPKT di Provinsi Sumatera Barat, 22 PPKT di Provinsi Kepri, dan 4 PPKT di Provinsi Riau.
- 10) pemanfaatan ekonomi kelautan seperti pengelolaan produksi garam yang belum optimal. Sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu pemanfaatan ekonomi kelautan lainnya seperti biofarmakologi laut dan wisata bahari perlu ditingkatkan kualitas pengelolaannya serta jasa kelautan terkait lainnya

Lebih lanjut, pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal, yang tercantum dalam analisis *strength, weakness, opportunities, threat* (SWOT) berikut ini.



Gambar 3. Analisis SWOT Lingkungan Strategis BPSPL Padang

1.4 Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja ini bertujuan untuk menginformasikan capaian kinerja pada tahun 2025. Adapun capaian kinerja tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum terkait BPSPL Padang beserta perkembangan lingkungan kerja strategis.
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan uraian rencana strategis berisi visi dan misi organisasi serta perjanjian kinerja BPSPL Padang tahun 2025.
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja organisasi beserta analisis-analisis pendukungnya.
4. **Bab IV Penutup**, menyajikan simpulan umum serta langkah-langkah strategis pada masa mendatang.
5. **Lampiran**, melampirkan data-data pendukung laporan.

II. Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis 2025 s.d. 2029

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) 2025 s.d. 2029 belum final ketika laporan ini disusun.

2.2. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Dalam upaya mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), BPSPL Padang memiliki tugas-tugas yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan Tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPSPL Padang berpedoman pada sasaran kegiatan yang di turunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran. Dalam perkembangannya, pada awal tahun 2025 ini terdapat delapan (8) sasaran kegiatan dan 18 indikator kinerja yang dimandatkan kepada BPSPL Padang. Adapun sasaran kegiatan dan IK tersebut termuat dalam Perjanjian Kinerja BPSPL Padang 2025 yang disajikan dalam tabel berikut (secara lengkap ditampilkan dalam Lampiran 1).

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang (Awal)

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang	1 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang (Provinsi)	3
2	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang	2 Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	25
3	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja BPSPL Padang	3 Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1
4	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang dilindungi dan/atau yang dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang	4 Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
5	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Padang	5 Jenis keanekaragaman Hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
6	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	6 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	2
7	Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang	7 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	1
8	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Padang	8 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang (Nilai)	88
		9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Padang (Nilai)	92
		10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL BPSPL Padang (Nilai)	71,5
		11 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4
		12 Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang (Indeks)	87

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang (%)	95
		14 Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100
		15 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Padang (Nilai)	85
		16 Nilai Pengawasan kearsipan internal BPSPL Padang (Nilai)	80
		17 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Padang (%)	76
		18 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang (Nilai)	91

Dalam perkembangannya, setelah adanya restrukturisasi organisasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, maka terdapat penyesuaian Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada Juni 2025. Dalam hal ini, BPSPL Padang memiliki target kinerja pada kedua unit kerja eselon 1 tersebut. Berikut adalah rincian Perjanjian Kinerja BPSPL Padang pasca restrukturisasi organisasi yang terdiri dari sembilan (9) sasaran kegiatan dan 19 indikator kinerja.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	2

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang	1 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang (Provinsi)	3
2	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang	2 Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	25
3	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja BPSPL Padang	3 Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1
4	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang dilindungi dan/atau yang dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang	4 Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
5	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Padang	5 Jenis keanekaragaman Hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
6	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja BPSPL Padang	6 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)	80

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang	7 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	1
8	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Padang	8 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang (Nilai)	70
		9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Padang (Nilai)	89
		10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL BPSPL Padang (Nilai)	71,5
		11 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4
		12 Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang (Indeks)	80
		13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang (%)	95
		14 Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100
		15 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Padang (Nilai)	85
		16 Nilai Pengawasan kearsipan internal BPSPL Padang (Nilai)	80
		17 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Padang (%)	76
		18 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang (Nilai)	91

Dalam perkembangannya, terdapat penyesuaian kembali terhadap Perjanjian Kinerja sehubungan adanya penyesuaian anggaran dan target pada indikator kinerja yang anggaran pendukung kegiatannya terdampak blokir hingga akhir tahun. Perjanjian Kinerja final ini disahkan pada Desember 2025. Pada Perjanjian Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut versi final, tidak ada perubahan pada target, namun ada perubahan pada Kepala BPSPL Padang dan anggaran.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Final)

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang	1 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang (Provinsi)	1
2	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang	2 Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	5
3	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja BPSPL Padang	3 Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1
4	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang dilindungi dan/atau yang dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang	4 Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	3
5	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Padang	5 Jenis keanekaragaman Hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	3

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja BPSPL Padang	6 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)	80
7	Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang	7 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	1
8	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Padang	8 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang (Nilai)	70
		9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Padang (Nilai)	89
		10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL BPSPL Padang (Nilai)	71,5
		11 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4
		12 Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang (Indeks)	80
		13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang (%)	95
		14 Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100
		15 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Padang (Nilai)	85
		16 Nilai Pengawasan kearsipan internal BPSPL Padang (Nilai)	70
		17 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Padang (%)	76
		18 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang (Nilai)	91

Pada tahun 2024 lalu, setelah melalui dinamika revisi Perjanjian Kinerja, terdapat dua puluh dua indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja tahun 2024. Ditinjau dari komposisinya, pada tahun 2025 ini terdapat indikator kinerja yang tidak lagi digunakan dan penambahan beberapa indikator kinerja baru. Perubahan indikator kinerja tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. Perubahan Indikator Kinerja Tahun 2025

Nomor	Indikator Kinerja	Keterangan
1	Nilai PNBSP BPSPL Padang (Rp.000)	Indikator Kinerja yang diukur pada tahun 2024 dan tidak lagi digunakan pada tahun 2025
2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	
3	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kelompok)	
4	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	
5	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	
6	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Padang yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	

Nomor	Indikator Kinerja	Keterangan
7	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Padang (%)	Indikator Kinerja baru pada tahun 2025
8	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Daerah)	
9	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang (Provinsi)	
10	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)	
11	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)	
12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Padang (%)	
13	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang (Nilai)	

2.3. Postur Anggaran 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian target-target kinerja, pada awal tahun 2025 ini BPSPL Padang didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP-DIPA 032.07.2.499346/2025 tanggal 2 Desember 2024 sebesar **Rp17.679.108.000,00** (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, 73,84% bersumber dari Rupiah Murni sementara 26,16% bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun demikian, pada awal tahun terdapat blokir terhadap anggaran tersebut sejumlah Rp4.720.760.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Adanya blokir tersebut tidak mempengaruhi pagu anggaran secara keseluruhan, namun anggaran yang terblokir tersebut belum dapat digunakan. Dalam perkembangannya, terdapat revisi anggaran sebagai tindak lanjut adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, surat Menteri Keuangan Nomor S- 37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dalam hal ini, BPSPL Padang mengalami dua jenis blokir, yaitu blokir efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 (Kode Blokir A) dan blokir penggunaan dana bersumber dana dari Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Kode Blokir 2). **Total dua jenis blokir itu mencapai Rp 4.711.915.000,00.**

Tabel 6. Rincian Blokir Efisiensi (I)

Kode - Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)			Blokir (Rp)			Pagu Efektif (Rp)		
	Rupiah Murni	PNBP	Total	Kode A	Kode 2	Total	Rupiah Murni	PNBP	Total
KKHL		3.400.000	3.400.000	2.703.510	696.490	3.400.000		0	0
P4K		350.000	350.000	Rp277.690	72.310	350.000		0	0
Jaskel			0			0		0	0
PRL		875.000	875.000	619.059	255.941	875.000		0	0

Kode - Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)			Blokir (Rp)			Pagu Efektif (Rp)		
	Rupiah Murni	PNBP	Total	Kode A	Kode 2	Total	Rupiah Murni	PNBP	Total
Dukman	13.054.108		13.054.108	86.915		86.915	12.967.193		12.967.193
Total	13.054.108	4.625.000	17.679.108	3.687.174	1.024.741	4.711.915	12.967.193	0	12.967.193

*dalam ribu rupiah

Kemudian, dalam perkembangannya, kembali terdapat penyesuaian karena adanya pergeseran jenis blokir Kode A menjadi blokir Kode 2. Pergeseran blokir tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Rincian Blokir Efisiensi Pasca Pergeseran Kode Blokir

Kode - Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)			Blokir (Rp)			Pagu Efektif (Rp)		
	Rupiah Murni	PNBP	Total	Kode A	Kode 2	Total	Rupiah Murni	PNBP	Total
KKHL		3.400.000	3.400.000	2.390.480	1.009.511	3.400.000		0	0
P4K		350.000	350.000	127.000	223.000	350.000		0	0
Jaskel			0			0		0	0
PRL		875.000	875.000	339.520	535.480	875.000		0	0
Dukman	13.054.108		13.054.108	86.915		86.915	12.967.193		12.967.193
Total	13.054.108	4.625.000	17.679.108	2.943.924	1.767.991	4.711.915	12.967.193	0	12.967.193

*dalam ribu rupiah

Kemudian, pada revisi RKAKL tanggal 17 Juni 2025, terdapat kebutuhan revisi untuk buka blokir sebesar Rp1.767.991.000,00. Maka dari itu, **total anggaran yang terblokir menjadi Rp2.943.924.000,00.**

Tabel 8. Perkembangan Rincian Blokir pada Juni 2025

Kode - Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)			Blokir (Rp)			Pagu Efektif (Rp)		
	Rupiah Murni	PNBP	Total	Kode A	Kode 2	Total	Rupiah Murni	PNBP	Total
KKHL		3.400.000	3.400.000	2.390.480		2.390.480		1.009.511	1.009.511
P4K		350.000	350.000	127.000		127.000		223.000	223.000
Jaskel			0						0
PRL		875.000	875.000	339.520		339.520		535.480	535.480
Dukman	13.054.108		13.054.108	86.915		86.915	12.967.193		12.967.193
Total	13.054.108	4.625.000	17.679.108	2.943.924	0	2.943.924	12.967.193	1.767.991	14.735.184

*dalam ribu rupiah

Lebih lanjut, pada Oktober 2025 terdapat penambahan pagu pemanfaatan Dana PNBP sebesar Rp4.645.091.000,00 yang diperuntukkan untuk sewa kantor satuan pelayanan di seluruh wilayah kerja BPSPL

Padang (yang akan mengalami penyesuaian organisasi menjadi Balai Penataan Ruang Laut Padang) sebesar Rp600.000.000,00 dan belanja modal sarana pendukung penyelenggaraan penataan ruang laut sebesar Rp4.045.091.000,00.

Tabel 9. Perkembangan Rincian Blokir Pasca Penambahan PNB

Kode - Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)			Blokir (Rp)			Pagu Efektif (Rp)		
	Rupiah Murni	PNBP	Total	Kode A	Kode 2	Total	Rupiah Murni	PNBP	Total
KKHL		3.400.000	3.400.000	2.390.480		2.390.489		1.009.511	1.009.511
P4K		350.000	350.000	127.000		127.000		223.000	223.000
Jaskel			0			0			0
PRL		5.520.091	5.520.091	339.520		339.520		5.180.571	5.180.571
Dukman	12.605.736		13.054.108	86.914		86.914	12.967.193		12.967.193
Total	12.605.736	9.270.091	22.324.199	2.943.924	0	2.943.924	12.967.193	6.413.082	19.380.275

Kemudian, struktur anggaran BPSPL Padang kembali mengalami dinamika pengurangan belanja pegawai, dan penarikan kode blokir A dengan sumber pendanaan Rupiah Murni. Hingga akhir tahun 2025, **pagu anggaran BPSPL Padang menjadi Rp21.875.827.000,00** (Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Tabel 10. Rincian Blokir Final

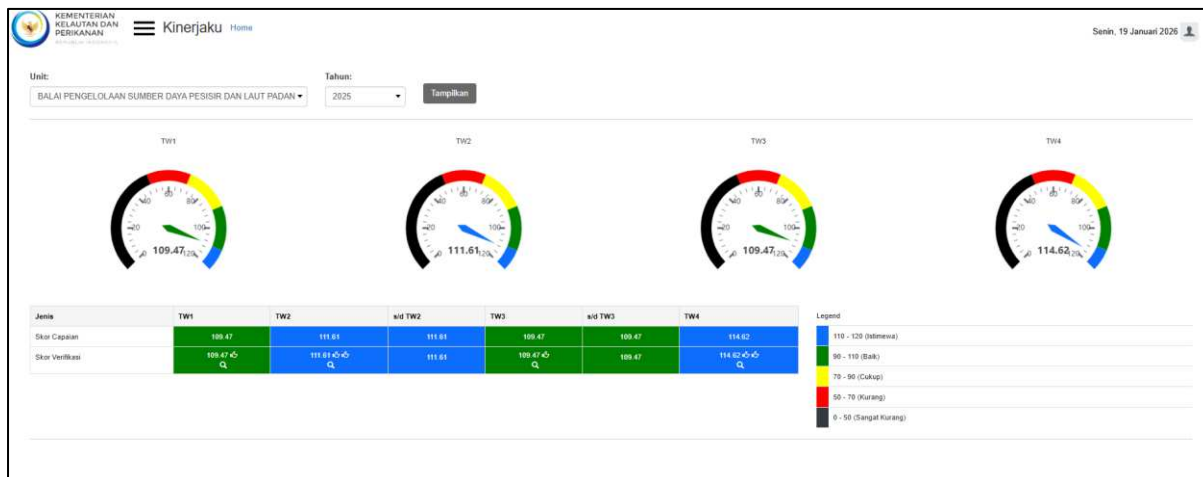
Kode - Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)			Blokir (Rp)			Pagu Efektif (Rp)		
	Rupiah Murni	PNBP	Total	Kode A	Kode 2	Total	Rupiah Murni	PNBP	Total
KKHL		3.400.000	3.400.000	2.390.480		2.390.489		1.009.511	1.009.511
P4K		350.000	350.000	127.000		127.000		223.000	223.000
Jaskel			0			0			0
PRL		5.520.091	5.520.091	339.520		339.520		5.180.571	5.180.571
Dukman	12.605.736		12.605.736	37.905		37.905	12.567.831		12.567.831
Total	12.605.736	9.270.091	21.875.827	2.894.914	0	2.894.914	12.567.831	6.413.082	18.980.913

*dalam ribu rupiah

III. Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Padang dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Adapun pengukuran kinerja ini dilakukan dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh BPSPL Padang periode tahun 2025 adalah **114,62 (kategori istimewa)**.



Gambar 4. NKO BPSPL Padang Tahun 2025

Pada tahun 2025 ini, Perjanjian Kinerja BPSPL Padang terdiri dari sembilan (9) sasaran strategis dan 19 indikator kinerja dengan periode capaian triwulanan, semesteran, dan tahunan. Sementara itu, rincian target dan capaian kinerja BPSPL Padang pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 11. Rincian Capaian Kinerja BPSPL Padang Tahun 2025

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang	1 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang (Provinsi)	1	5	500% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP
2	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang	2 Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	5	6	120%
3	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja BPSPL Padang	3 Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1	2	200% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP
4	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang dilindungi dan/atau yang dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang	4 Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	3	6	200% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	PERSENTASE CAPAIAN (%)
5	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Padang	5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	3	7	233,33% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP
6	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja BPSPL Padang	6 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)	80	96	120%
7	Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	7 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)	1	1	100%
8	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	8 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang	2	2	100%
9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Padang	9 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang (Nilai)	70	94,15	134,5% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP
		10 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Padang (Nilai)	89	98,14	110,27%
		11 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Padang	71,5	97,14	135,86% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP
		12 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4	4	100%
		13 Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80	89,04	111,3%
		14 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang (%)	95	100	105,26%
		15 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100	100	100%
		16 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Padang	85	90,40	106,35%
		17 Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Padang	70	81,50	116,43%
		18 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Padang (%)	76	100	131,58% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku
		19 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang	91	100	109,89%

IKU. 1. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Provinsi)

Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah adalah Provinsi yang didampingi dan difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang. Adapun pencapaian IKU ini diperoleh dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Padang yang didampingi dalam proses penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah.

A. Capaian Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah

Rincian target IKU 1 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 12. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1

IKU 1. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Provinsi)				
Realisasi	Tahun 2025			
2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025
-	1	5	120	-

Pada tahun 2025, capaian IKU ini adalah lima (5) provinsi yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi daerah. Capaian IKU ini didukung oleh Pendampingan Teknis Penilaian EVIKA 2025 terhadap lima provinsi wilayah kerja BPSPL Padang (Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, dan Kepulauan Riau).

Data dukung:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1q4Z-Pa4O61sju1DcgQ9EquwYoQE0K_iF

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

IKU ini tidak digunakan pada tahun 2024. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian kinerja yang dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Sementara itu, Renstra DJPK dan DJPRL 2025 s.d. 2029 belum final ketika laporan ini disusun. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar

Perbandingan Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Daerah dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Makassar, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Fasilitas Penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Daerah dengan BPSPL Makassar

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Makassar	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah (Provinsi)	1	5	4	4

Ditinjau dari capaian kedua unit kerja, baik BPSPL Padang maupun BPSPL Makassar telah mencapai target daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi daerah. Dalam hal ini, target BPSPL Padang lebih rendah dibandingkan dengan BPSPL Makassar yang mendapat dukungan dalam pencapaian IKU ini melalui LAUTRA. Anggaran pendukung kegiatan ini di lingkup BPSPL Padang mengalami

blokir hingga berakhirnya tahun anggaran sehingga mengalami penurunan target dari tiga provinsi menjadi satu provinsi.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

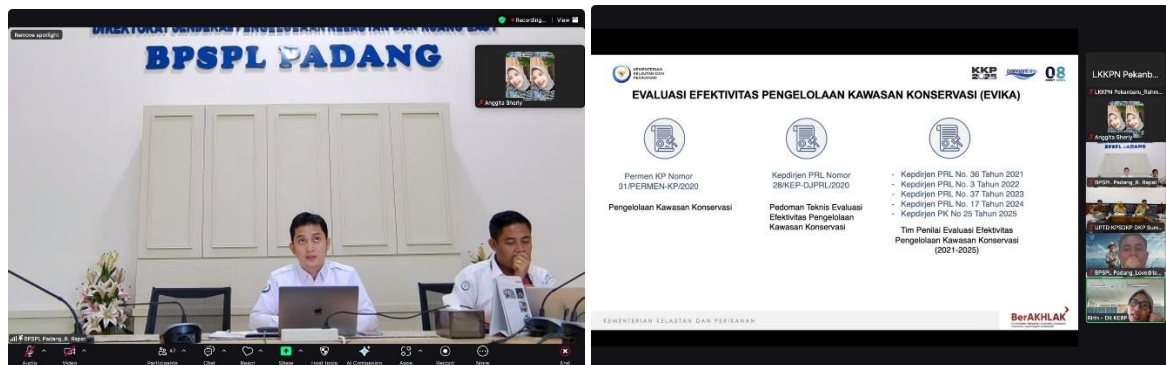
Faktor pendukung dalam upaya pencapaian IKU ini adalah komunikasi dan koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem perihal ruang lingkup kegiatan, mekanisme, jadwal pelaksanaan, dan peran pendampingan BPSPL Padang dalam Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah. Selain itu, BPSPL Padang juga dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang didampingi dalam penilaian untuk mempersiapkan aspek-aspek penilaian yang diperlukan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi yang didukung oleh penggunaan Zoom Meeting dalam pendampingan teknis terhadap lima pemerintah daerah provinsi. Pertemuan secara daring dapat menghemat anggaran dan menjangkau seluruh provinsi yang dinilai evaluasi efektivitas kawasan konservasi daerahnya.

G. Kegiatan Pendukung

Anggaran pendukung kegiatan ini terblokir hingga akhir tahun. Adapun upaya pencapaian IKU ini telah terlaksana melalui kegiatan Pendampingan Teknis Penilaian EVIKA 2025 terhadap lima provinsi wilayah kerja BPSPL Padang (Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, dan Kepulauan Riau) pada 15 September 2025 melalui Zoom Meeting.



Gambar 5. Dokumentasi Pendampingan Teknis Penilaian EVIKA 2025

Sementara itu, BPSPL Padang telah melaksanakan kegiatan pendampingan dalam pengusulan Kawasan Konservasi Daerah sebagaimana berikut.

1. Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Pulau Maspari, Sumatera Selatan melalui Zoom Meeting pada 7 Februari 2025,
2. Rapat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Teknis Penetapan Pulau Maspari sebagai Kawasan Konservasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui Zoom Meeting pada 13 Februari 2025,
3. Rapat Kelompok Kerja Kawasan Konservasi Batam dan Lingga pada 12 Juni 2025 di Ruang Rapat Kerapu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau,
4. Pembahasan Rancangan KEPMEN KP tentang Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Maspari Provinsi Sumatera Selatan pada 12 Juni 2025 melalui Zoom Meeting, dan
5. Lokakarya Persiapan Perancangan Zonasi Kawasan Konservasi di Perairan Batam dan Lingga, Provinsi Kepulauan Riau pada 25 s.d. 26 Juni 2025 di Hotel Aston Tanjungpinang,
6. Rapat Konsultasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Lingga dan Batam Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada 12 September 2025,

7. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pulau Maspari Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan melalui Zoom Meeting pada 8 September 2025,
8. Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Zonasi dan Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Perairan Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara melalui Zoom Meeting pada 23 September 2025,
9. Konsultasi Publik I (KP I) Perencanaan Zonasi Kawasan Konservasi Lingga dan Batam pada 24 s.d. 29 September 2025.

IKU. 2. Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Orang)

Masyarakat di kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan kawasan konservasi adalah masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi peningkatan kapasitas dalam pemanfaat kawasan konservasi melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Adapun pencapaian IKU ini diperoleh dengan menginventarisasi dan menjumlahkan masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang.

A. Capaian Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Rincian target IKU 2 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 14. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2

IKU. 2. Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Orang)				
Realisasi	Tahun 2025			
	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025
-	5	6	120	-

Capaian IKU ini adalah 6 orang dengan persentase capaian 120%. Anggaran pendukung kegiatan ini terdampak blokir. Namun demikian, terdapat upaya pencapaian IKU ini melalui pemberdayaan masyarakat pemanfaat kawasan konservasi perairan melalui peningkatan kapasitas pemetaan sumber daya pesisir dan laut dengan menggunakan *drone* pada 24 Desember 2025 di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tqTW7UCz9OslK9GBs4icPz51F4TtXEHF>

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

IKU ini tidak digunakan pada tahun 2024. Maka dari itu, tidak terdapat capaian kinerja yang dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Sementara itu, Renstra DJPK dan DJPRL 2025 s.d. 2029 belum final ketika laporan ini disusun. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Makassar, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15. Perbandingan Capaian Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi Daerah dengan BPSPL Makassar

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Makassar	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi (Orang)	5	6	40	70

Ditinjau dari capaian kedua unit kerja, baik BPSPL Padang maupun BPSPL Makassar telah mencapai target masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan kawasan konservasi. Dalam hal ini, target BPSPL Padang lebih rendah dibandingkan dengan BPSPL Makassar yang mendapat dukungan dalam pencapaian IKU ini melalui LAUTRA. Anggaran pendukung kegiatan ini di lingkup BPSPL Padang mengalami blokir hingga berakhirnya tahun anggaran sehingga mengalami penurunan target dari 25 orang menjadi 5 orang.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian Indikator Kinerja ini didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat yang diundang pada kegiatan pengembangan kompetensi. Partisipasi aktif tersebut dapat ditunjang oleh penyampaian materi yang menyeluruh, narasumber yang kompeten, dan sesi diskusi yang interaktif. Saat ini, anggaran pendukung kegiatan ini masih dalam kondisi terblokir sehingga belum terdapat perkembangan kegiatan.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada pelaksanaan kegiatan yang memberdayakan staf BPSPL Padang yang kompeten dalam pembekalan peningkatan kapasitas pemetaan kepada masyarakat. Dalam hal ini, terdapat penghematan anggaran dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat pemanfaat Kawasan Konservasi Daerah.

G. Kegiatan Pendukung

Anggaran pendukung kegiatan terdampak blokir. Adapun terdapat upaya pencapaian IKU ini melalui kegiatan Pemberdayaan masyarakat pemanfaat kawasan konservasi perairan melalui peningkatan kapasitas pemetaan sumber daya pesisir dan laut dengan menggunakan drone pada 24 Desember 2025 di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat.



Gambar 6. Dokumentasi Pemberdayaan Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi

IKU. 3. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)

Kegiatan inisiasi penyusunan draft Kerjasama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian

di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Unit Kerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih Lembaga/badan/ organisasi untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama dapat dilakukan dengan kementerian dan Lembaga pemerintah non kementerian. Pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha/ industri/ perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan. Adapun pencapaian IKU ini diperoleh dengan cara Menginventarisasi dan menjumlahkan draft kerja sama yang disusun/difasilitasi penyusunannya di wilayah kerja BPSPL Padang untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon 1.

A. Capaian Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi

Rincian target IKU 3 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 16. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3

IKU 3. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)						
Realisasi			Tahun 2025			
2021	2022	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025
1	2	2	1	2	200 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerja KKP	-

Capaian IKU ini pada 2025 adalah 2 Kesepakatan dengan persentase capaian 200% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerja KKP. Berikut adalah rincian Usulan Perjanjian Kerja Sama yang diinisiasi oleh BPSPL Padang pada 2025.

1. Usulan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dengan PT Mifa Bersaudara dan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi Pusong Diving Club tentang Penguatan Pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi Perairan Aceh Barat Daya dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Rehabilitasi Terumbu Karang di *Coral Stock Center* Pulau Pusong; dan
2. Usulan Perjanjian Kerja Sama antara BPSPL Padang dengan Yayasan Fifan Laut Nusantara tentang Dukungan Penataan Ruang Laut Berbasis Karbon Biru dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Ekosistem Karbon Biru di Wilayah Kerja BPSPL Padang.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bnAXqjKMFITi6GGX6dlzakDHdbDZRiIS>

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja yang berkaitan dengan Kerja Sama Konservasi mengalami dinamika perubahan nomenklatur dan satuan sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, indikator kinerja tersebut adalah Kemitraan/Kerjasama dan Konvensi dalam Mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen). Sementara itu, pada tahun 2021, indikator kinerja memiliki nomenklatur Kesepakatan Jejaring, Kemitraan/Kerjasama dan Konvensi dalam Mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan). Lebih lanjut, pada tahun 2022, indikator kinerja ini memiliki nomenklatur Kerjasama, Jejaring dan/atau Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan). Pada tahun 2023, tidak terdapat indikator kinerja terkait Kerja Sama Konservasi di lingkup BPSPL Padang. Atas dasar hal tersebut, perbandingan IKU ini dapat dilakukan dengan capaian tahun 2021, 2022, dan 2024 yang mana memiliki satuan yang sama, yaitu Kesepakatan.

Ditinjau dari capaian tahun sebelumnya, terdapat peningkatan capaian dari tahun 2021 ke 2025 sebanyak dua kali lipat. Sementara itu, tidak terdapat kenaikan capaian pada tahun 2024 dan tahun 2025. Adanya peningkatan capaian tersebut juga didukung dengan adanya peninjauan kerja sama dengan calon mitra yang meningkat.



Gambar 7. Perbandingan Capaian Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi dengan Tahun Sebelumnya

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Sementara itu, Renstra DJPK dan DJPRL 2025 s.d. 2029 belum final ketika laporan ini disusun. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan BPSPL Makassar

Indikator kinerja ini tidak digunakan di BPSPL Makassar sehingga tidak dapat dibandingkan.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil analisis, pencapaian IKU ini didukung oleh koordinasi aktif dengan calon mitra. Hingga triwulan III 2025, BPSPL Padang telah melaksanakan pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama daring. Dengan dilaksanakan koordinasi berbasis daring, masing-masing pihak dapat mengikuti pembahasan lebih fleksibel. Maka dari itu, pencapaian IKU ini sangat terbantu dengan penggunaan aplikasi Zoom yang dapat memfasilitasi pertemuan berbasis daring.

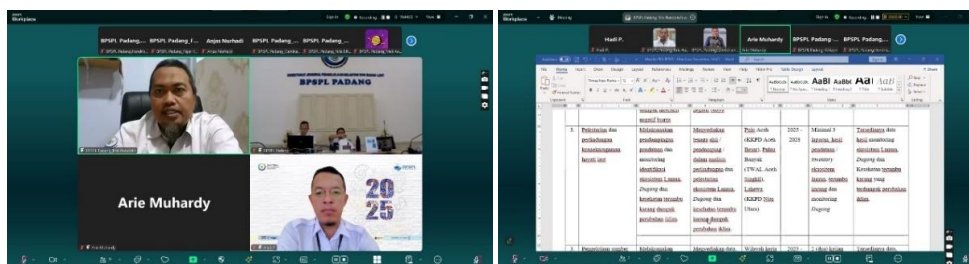
F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada penggunaan aplikasi Zoom dalam pembahasan Perjanjian Kerja Sama secara daring dengan calon mitra. Selain itu, pelibatan tim dari wilayah kerja terdekat juga mendukung efisiensi penggunaan sumber daya.

G. Kegiatan Pendukung

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh serangkaian kegiatan berikut.

1. Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama BPSPL Padang dengan Yayasan Fifi Laut Nusantara melalui Zoom Meeting pada 13 Februari 2025
2. Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama BPSPL Padang dengan Yayasan Fifi Laut Nusantara pada 4 Maret 2025 melalui Zoom Meeting



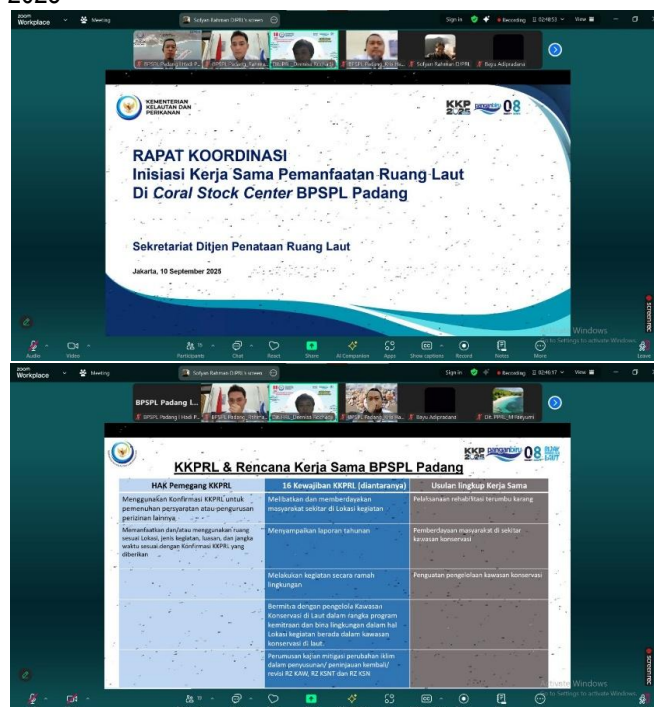
Gambar 8. Dokumentasi Pembahasan Draft PKS dengan Yayasan Fifi Laut Nusantara

3. Pembahasan Inisiasi PKS dengan PT MIFA Bersaudara pada 23 April 2025 melalui Zoom Meeting
4. Penyampaian Draf Perjanjian Kerja Sama antara DJPK dan PT Mifa Bersaudara dan KOMPAK Pusong Diving Club pada 7 Mei 2025

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG JALAN PERTANTIAN SUNGAI LAHEH, KELURAHAN LUBUK MINTURUN, PADANG 25175 TELEPON (0751) 497052, FAKSIMILE (0751) 497053 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpspl.padang@kkp.go.id										
Nomor : B.636/BPSPL/1/TU.210/V/2025 Sifat : Biasa Lampiran : Satu Berkas Hal : Penyalpnaan Draf Perjanjian Kerja Sama	7 Mei 2025										
Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di Jakarta Pusat											
Sehubungan dengan adanya rencana kerja sama yang diinisiasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dengan PT Mifa Bersaudara dan KOMPAK Pusong Diving Club, bersama ini dengan hormat kami sampaikan draf Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sudah dibahas bersama dengan para pihak. Berkaitan dengan hal dimaksud, kami mohon perkenan Bapak untuk memproses lebih lanjut dokumen tersebut. Dapat kami laporkan kepada Bapak, bahwa Perjanjian Kerja Sama disusun dalam rangka memperkuat upaya Rehabilitasi Terumbu Karang di Coral Stock Centre (CSC) Pulau Pusong Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai bagian dari dukungan penguatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan dan dukungan pemberdayaan masyarakatnya. Adapun rencana ruang lingkup yang akan dikerjakan antara lain meliputi dukungan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi terumbu karang; pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan Aceh Barat Daya terkait upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan pulau - pulau kecil; dan penguatan pengelolaan kawasan konservasi perairan Aceh Barat Daya. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami ucapkan terima kasih. Ptl. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang,  Diantadgani Secara Elektronik Hendrisman											
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PT MIFA BERSAUDARA DAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGERAK KONSERVASI PUSONG DIVING CLUB NOMOR: xxx/xxxx/xx.xx.xx/2025 NOMOR: xxx/PS-KS-MIFA/LC/LMD/PT/2025 NOMOR: xxx/xxxx/xx.xx.xx/2025 TENTANG PENGUATAN PENGELOLAAN EFEKTIF KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN ACEH BARAT DAYA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI REHABILITASI TERUMBU KARANG DI CORAL STOCK CENTER PULAU PUSONG Pada hari ini, Jumat tanggal enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima (06-06-2025), bertempat di Banda Aceh, Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">I. Nama : Miftahul Huda</td> <td style="width: 50%;">Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut</td> </tr> <tr> <td>Jabatan : Alamati</td> <td>Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur, No. 16 Gedung Minabarahi III Lt. 9, DKI Jakarta.</td> </tr> </table> dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "PIHAK KESATU". <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">II. Nama : Ricky Nelson</td> <td style="width: 50%;">Jabatan : Direktur Utama PT Mifa Bersaudara</td> </tr> <tr> <td>Jabatan : Alamati</td> <td>Alamat : Jalan Meulaboh - Tapaktuan KM.8, Desa Peunaga Cut Ujong, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.</td> </tr> </table> dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Mifa Bersaudara, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "PIHAK KEDUA".				I. Nama : Miftahul Huda	Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Jabatan : Alamati	Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur, No. 16 Gedung Minabarahi III Lt. 9, DKI Jakarta.	II. Nama : Ricky Nelson	Jabatan : Direktur Utama PT Mifa Bersaudara	Jabatan : Alamati	Alamat : Jalan Meulaboh - Tapaktuan KM.8, Desa Peunaga Cut Ujong, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.
I. Nama : Miftahul Huda	Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut										
Jabatan : Alamati	Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur, No. 16 Gedung Minabarahi III Lt. 9, DKI Jakarta.										
II. Nama : Ricky Nelson	Jabatan : Direktur Utama PT Mifa Bersaudara										
Jabatan : Alamati	Alamat : Jalan Meulaboh - Tapaktuan KM.8, Desa Peunaga Cut Ujong, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.										

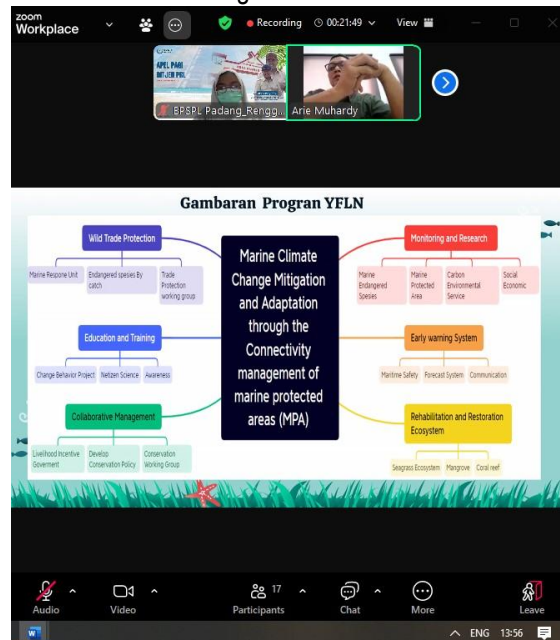
Tabel 17. Penyampaian Draf PKS PT Mifa Bersaudara

5. Koordinasi rencana kerja sama pemanfaatan ruang laut di lokasi Coral Stock Center BPSPL Padang pada 8 September 2025



Gambar 9. Dokumentasi Koordinasi Kerja Sama di CSC BPSPL Padang

6. Pembahasan Inisiasi Kerja Sama BPSPL Padang dengan Yayasan Fifi Laut Nusantara (YFLN) pada 3 November 2025 melalui Zoom Meeting



Gambar 10. Dokumentasi Pembahasan Bersama Yayasan Fifi Laut Nusantara

7. Penyampaian Draf Perjanjian Kerja Sama dengan Yayasan Fifi Laut Nusantara pada 12 Desember 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGLOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG JALAN PERTANIAN SUNGAI LAREH, KELURAHAN LUBUK MINTURUN, PADANG 25175 TELEPON (0751) 497052, FAKSIMILE (0751) 497053 LAMAR www.kkp.go.id SUREL bspl.padang@kkp.go.id Nomor : B.1934/BPSPL.1/TU.210/XII/2025 12 Desember 2025 Sifat : Biasa Lampiran : Satu Berkas Hal : Penyampaian Draf Perjanjian Kerja Sama Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut di Jakarta Pusat Sehubungan dengan adanya rencana kerja sama yang diinisiasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dengan Yayasan Fifi Laut Nusantara, bersama ini dengan hormat kami sampaikan draf Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sudah dibahas bersama dengan para pihak. Berkaitan dengan hal dimaksud, kami mohon perkenan Ibu untuk memproses lebih lanjut dokumen tersebut. Dapat kami laporkan kepada Ibu, bahwa Perjanjian Kerja Sama disusun dalam rangka mendukung penataan ruang laut berbasis karbon biru serta pemanfaatan ruang laut dan keanekaragaman hayati laut pada ekosistem karbon biru di wilayah kerja BPSPL Padang. Adapun rencana ruang lingkup yang akan dikerjasamakan para pihak meliputi penyediaan data/informasi dan/atau analisis dalam mendukung penataan ruang laut berbasis karbon biru; pembinaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau stakeholder terkait pemanfaatan ruang laut di lingkungan ekosistem karbon biru; penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati laut di lingkungan ekosistem karbon biru; serta berbagi pakai data, publikasi dan diseminasi informasi. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Ibu lebih lanjut kami ucapkan terima kasih. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang, Ditandatangani Secara Elektronik Rahmat Irfansyah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara	2 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN YAYASAN FIFI LAUT NUSANTARA NOMOR : XXXX/XXXX/XX.XX.XX/2026 NOMOR : XXXX/XXXX/XX.XX.XX/2026 TENTANG DUKUNGAN PENATAAN RUANG LAUT BERBASIS KARBON BIRU DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT PADA EKOSISTEM KARBON BIRU DI WILAYAH KERJA BPSPL PADANG Pada hari ini, xxxx tanggal xxxxxx bulan xxx tahun xxxxxxxxxxxxxxxx (xx/xx/2026) bertempat di kedudukan masing-masing, Kami yang bertanda tangan dibawah ini: 1. Nama : Rahmat Irfansyah Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang, yang berkedudukan di Jalan Raya Pertanian, Sei Duo-Sungai Lareh, Lubuk Minturun, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU. 2. Nama : Arie Muhandy Jabatan : Direktur Yayasan Fifi Laut Nusantara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Fifi Laut Nusantara, yang berkedudukan di Jalan Prof. Ali Hasyimi No. 6, Pango Raya Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
---	---

Gambar 11. Penyampaian Draf PKS Yayasan Fifi Laut Nusantara

IKU. 4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja kerja BPSPL Padang adalah Jenis ikan yang diintervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi untuk kesinambungan keanekaragaman hayati perairan. Upaya perlindungan dan/atau pelestarian dilaksanakan pada tiga (3) jenis target yaitu: penyu, terubuk, dan belida.

Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis ikan terancam punah dilaksanakan melalui:

1. Pendataan Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis: Penyu, Terubuk, dan Belida.
2. Penyadartahuan/Edukasi/Sosialisasi Keanekaragaman Hayati Perairan Dilindungi/Terancam Punah serta Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis biota laut dilindungi

A. Capaian Jenis Ikan Dilindungi yang Dilakukan Upaya Pengelolaannya

Rincian target IKU 4 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 18. Perbandingan Target dan Capaian IKU 4

IKU 4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)								
Realisasi					Tahun 2025			
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025
4	6	11	10	11	3	6	200 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerja KKP	-(45%)

Capaian IKU ini adalah enam (6) jenis ikan dilindungi yang didukung pengelolaannya dengan persentase capaian 200% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerja KKP. Enam jenis dimaksud, yaitu jenis terubuk, belida, penyu, cetacean, dugong, dan buaya. Adapun kegiatan pendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini secara garis besar meliputi:

1. Penyediaan data informasi jenis ikan dilindungi/terancam punah meliputi jenis terubuk, belida, dan penyu; dan
2. Respon cepat penanganan biota dilindungi/terancam punah meliputi jenis cetacean, dugong, penyu, dan buaya.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sr275XcgjCm33F-NUTCNVZzKJrqL2x87>

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Ditinjau dari capaiannya, terdapat penurunan capaian antara tahun 2024 dan 2025, dari 11 jenis ikan menjadi 6 jenis ikan. Pada tahun 2025 BPSPL Padang melaksanakan pendataan tiga jenis ikan (terubuk, belida, penyu) dan empat jenis yang dilakukan penanganan keterdamparannya (cetacean, dugong, penyu, buaya). Adanya penurunan capaian tersebut dibandingkan dengan tahun 2024 disebabkan oleh terblokirnya anggaran pendukung kegiatan pada tahun ini, yang mana mengurangi jumlah jenis yang didukung pendataannya.

Tabel 19. Rincian Capaian Jenis Ikan Dilindungi yang Dilakukan Upaya Pengelolaannya

Tahun	Capaian Jenis Ikan Dilindungi Melalui Kegiatan Pendataan	Capaian Jenis Ikan Dilindungi Melalui Kegiatan Penanganan Keterdamparan	Capaian Jenis Ikan Dilindungi yang Dilakukan Upaya Pengelolaan Secara Keseluruhan
2020	Karang, terubuk, penyu	Penyu, cetacean	Karang, terubuk, penyu, cetacean

Tahun	Capaian Jenis Ikan Dilindungi Melalui Kegiatan Pendataan	Capaian Jenis Ikan Dilindungi Melalui Kegiatan Penanganan Keterdamparan	Capaian Jenis Ikan Dilindungi yang Dilakukan Upaya Pengelolaan Secara Keseluruhan
2021	Karang, terubuk, penyu, sidat, teripang	Penyu, cetacean	Karang, terubuk, penyu, sidat, teripang, cetacean
2022	Karang, terubuk, penyu, sidat, teripang, belida, ikan bilih	Penyu, dugong, cetacean, hiu paus, pari sungai raksasa	Karang, terubuk, penyu, sidat, teripang, belida, ikan bilih, dugong, cetacean, hiu paus, pari sungai raksasa
2023	Karang, terubuk, penyu, sidat, teripang, belida, ikan bilih	Penyu, dugong, cetacean, hiu paus	Karang, terubuk, penyu, sidat, teripang, belida, ikan bilih, dugong, cetacean, hiu paus
2024	Karang, terubuk, penyu, sidat, teripang, belida, ikan bilih, arwana	Penyu, cetacean, hiu paus, pari sungai raksasa	Karang, terubuk, penyu, sidat, teripang, belida, ikan bilih, arwana, cetacean, hiu paus, pari sungai raksasa
2025	Terubuk, belida, penyu	Cetacean, dugong, penyu, buaya	Terubuk, belida, penyu, cetacean, dugong, dan buaya



Gambar 12. Perbandingan Capaian Jenis Ikan Dilindungi yang Dilakukan Upaya Pengelolaannya dengan Tahun Sebelumnya

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Sementara itu, Renstra DJPK dan DJPRL 2025 s.d. 2029 belum final ketika laporan ini disusun. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar

Indikator kinerja ini tidak digunakan di BPSPL Makassar sehingga tidak dapat dibandingkan.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor pendukung dalam pencapaian IKU ini adalah adanya dukungan dari pihak lain pada kegiatan respon cepat penanganan biota terdampar. Pada kegiatan respon cepat, BPSPL Padang kerap berkolaborasi dengan Kelompok Masyarakat, Dinas, LSM, dan stakeholder setempat lainnya. Terdapat kegiatan pendataan beberapa jenis yang sudah tidak terblokir anggarannya sehingga pendataan dapat dilanjutkan kembali, yaitu jenis

terubuk, belida, dan penyu (pendataan sesuai musimnya mulai November). Anggaran untuk respon cepat penanganan biota dilindungi juga sudah tidak terblokir. Sementara itu, sebagian anggaran pendukung masih dalam kondisi terblokir hingga akhir tahun.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi dalam penyeteroran data dari enumerator berbasis daring. Selain itu, terjalinnya kerja sama dan komunikasi aktif dengan stakeholder lain juga dilakukan untuk penanganan jenis ikan terdampar di lokasi yang terkendala jarak dan akses.

G. Kegiatan Pendukung

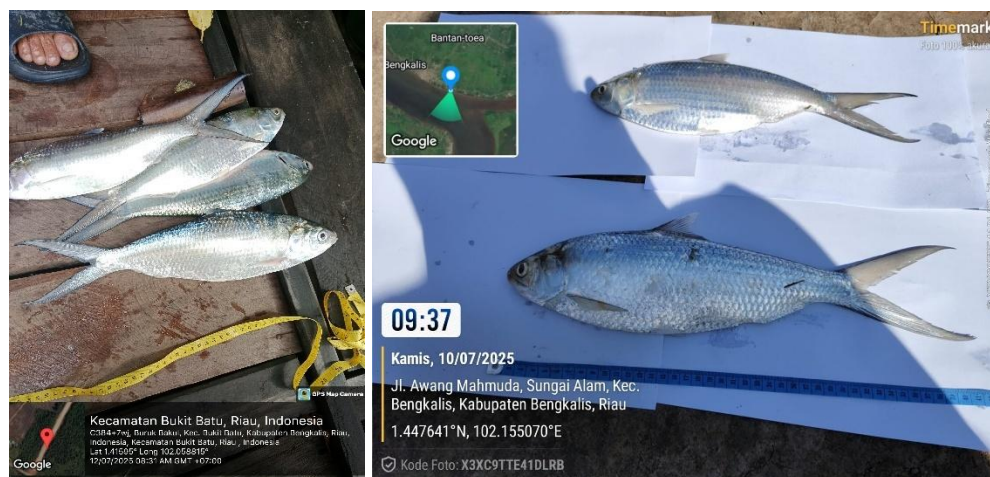
Hingga tahun 2025 berakhir, terdapat beberapa kegiatan pendukung yang belum terlaksana sehubungan dengan anggaran pendukung kegiatan yang masih terblokir. Adapun kegiatan pendukung IKU ini yang telah terlaksana adalah sebagai berikut.

1. Pendataan Terubuk di Provinsi Riau

Di Bengkalis dan Siak, Provinsi Riau pendataan terubuk jenis *Tenualosa macrura* dilakukan pada fase bulan gelap (27, 28, 29, 30) dan bulan terang (13, 14, 15, dan 16) penanggalan hijriah dengan dibantu oleh tenaga enumerator. Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah pendekatan Length Based-Spawning Potential Ratio (LB-SPR) yang dapat menggambarkan status eksploitasi stok perikanan, yang secara umum dapat mengacu kepada kriteria yang ditetapkan oleh NOAA Fisheries dalam Badaruddin (2013). Pendataan dimulai pada Januari, kemudian terhenti sehubungan adanya efisiensi anggaran. Kemudian, pendataan kembali dilanjutkan pada bulan Juni hingga Desember 2025.

SPR	< 30%	30 – 50%	> 50%
Status Eksploitasi	MERAH	KUNING	HIJAU
	Over-exploited	Fully-exploited	Under-exploited

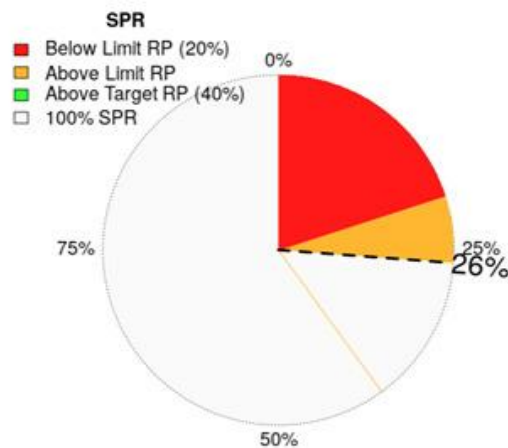
Gambar 13. Status Eksploitasi Perikanan Berdasarkan Nilai SPR



Gambar 14. Pendataan Terubuk di Provinsi Riau

Jumlah ikan terubuk yang terdata selama 8 bulan pendataan ialah sebanyak 2.120 ekor, tetapi hanya 490 ekor ikan yang berhasil diukur panjangnya. Data hasil tangkapan ikan terubuk terbanyak terjadi pada bulan November, yaitu mencapai 683 ekor. Panjang ikan terubuk yang terdata rata-rata sebesar

23,45 cmSL, nilai modus 28 cmSL dengan panjang ikan minimal 8 cmSL dan panjang maksimal 42 cmSL. Sementara itu, Nilai SPR perikanan terubuk diestimasi sebesar 26% yang berarti bahwa status eksploitasi ikan terubuk dalam kondisi *over exploited*, yaitu sudah berada pada batas minimal nilai SPR yang ditetapkan (30%). Nilai SPR di tahun 2025 menunjukkan status tangkap jenuh menandakan bahwa masih terjadi aktivitas penangkapan terhadap ikan terubuk yang siap memijah. Kurva selektivitas alat tangkap menunjukkan bahwa ikan terubuk ditangkap ketika matang gonad. Permodelan LB-SPR menunjukkan bahwa ikan terubuk ditangkap sebelum mencapai matang gonad pertama kali (25,4 cmSL), yaitu pada rata-rata ukuran 23,44 cmSL – 24,7 cmSL.



Gambar 15. SPR Terubuk Riau 2025

2. Pendataan Terubuk di Sumatra Utara

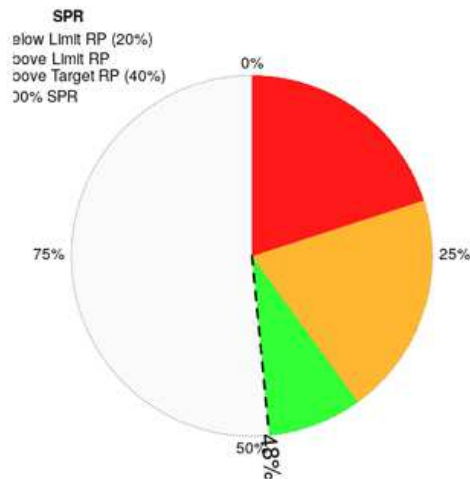
Di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara, dilakukan pendataan ikan terubuk *Tenualosa ilisha*. Pendataan dilaksanakan pada Juli hingga Desember 2025 dibantu oleh tenaga enumerator karena anggaran pendukung kegiatan sempat mengalami blokir pada awal tahun.



Gambar 16. Pendataan Terubuk di Provinsi Sumatra Utara

Berdasarkan hasil pendataan 2025, total data yang diolah adalah sebanyak 5636 data, dengan panjang minimum 26 cm dan panjang maksimum 57 cm. Data panjang total yang paling dominan ada di selang kelas panjang total 34-37 cm, yang masuk dalam cohort pertumbuhan cepat. Perhitungan LB-SPR perikanan terubuk di Labuhanbatu diestimasi sebesar 48% yang berarti status eksploitasi

ikan terubuk dalam kondisi *fully exploited*, yang berarti populasi ikan berada dalam kondisi yang relatif baik dan dapat dianggap berkelanjutan, dimana ikan yang tertangkap sudah matang gonad. Nilai SPR di atas 30% menunjukkan bahwa kapasitas reproduksi ikan masih cukup untuk mendukung rekrutmen yang memadai. Pengelolaan dapat dilanjutkan dengan praktik penangkapan yang ada, tetapi tetap perlu dilakukan pemantauan untuk memastikan bahwa kondisi tetap stabil. Pendataan *Tenualosha ilisha* di tahun 2025 hanya dilaksanakan 6 bulan (Juli s.d. Desember 2025), yang bukan merupakan musim pemijahan. Rentang waktu pendataan ini kurang merepresentasikan life history *Tenualosha ilisha*, karena fase ukuran ikan matang gonad ada di Bulan Januari-April, tidak dilakukan pendataan.



Gambar 17. SPR Terubuk Kabupaten Labuhan Batu 2025

3. Pendataan Belida di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan

Pendataan direncanakan dilakukan dengan penangkapan ikan di Perairan Sungai Belida dengan pengambilan data dilakukan sebanyak 300 kali dalam satu tahun anggaran. Pada pelaksanaannya, pendataan terlaksana pada Januari 2025 selama enam hari pengambilan data lapangan, yang mana terhenti karena anggaran pendukung kegiatan yang terblokir.



Gambar 18. Pendataan Belida di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan

Ikan belida yang tertangkap terdiri dari satu jenis yaitu *Notopterus notopterus* pada distribusi ukuran Panjang 23 cm. Berdasarkan hasil perhitungan jumlah individu jenis ikan *Notopterus notopterus* yang tertangkap di Sungai Belida sebanyak 1 ekor selama 6 hari dalam setahun diketahui nilai kelimpahan relatifnya 100%. Kelimpahan ikan Belida di Sungai Belida berada pada kisaran 1 ekor per 303 hektar, yang mana ditemukan satu ekor ikan dengan luas daerah 30.000 m².

4. Pendataan Belida di Kabupaten Tebo, Jambi

Pendataan terlaksana pada Januari 2025 selama tujuh hari pendataan, namun terhenti karena anggaran pendukung kegiatan yang terblokir.



Gambar 19. Dokumentasi Pendataan Belida di Kabupaten Tebo, Jambi

Jenis ikan Belida yang telah teridentifikasi di Kabupaten Tebo adalah Belida Sumatera (*Chitala cf. hypselonotus*). Akan tetapi selama pendataan tahun 2025, pembantu lapangan tidak memperoleh data tangkapan ikan belida (data bernilai 0). Berdasarkan sata sosial masyarakat yang dihimpun melalui wawancara atau pengisian kuesioner pada tahun 2024 umumnya masyarakat di Provinsi Jambi dan Kabupaten Bungo telah memahami mengenai status perlindungan penuh ikan belida borneo, belida sumatera, belida lopis, dan belida jawa. Saat ini tingkat kepatuhan masyarakat terhadap status perlindungan ikan belida sudah baik mengingat kebanyakan masyarakat sudah tidak berani memanfaatkan ikan belida, akan tetapi ikan Belida masih sering tertangkap secara tidak sengaja (*by catch*) oleh nelayan.

5. Pendataan Penyu di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat

Pendataan biota jenis Penyu di Pantai Buggei Siata, Desa Betumonga biasa dilaksanakan pada bulan Januari, Februari, dan Maret sebagai akhir musim pendaratan periode 2024 s.d. 2025, serta Bulan November dan Desember sebagai awal musim pendaratan periode 2025 s.d. 2026. Kegiatan ini didukung oleh Perjanjian Kerja Sama antara BPSPL Padang dengan Yayasan Penyu Indonesia. Pendataan pada Januari hingga Maret pendataan dilakukan oleh Yayasan Penyu Indonesia, sementara BPSPL Padang melakukan pendataan pada November s.d. Desember sehubungan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada awal tahun.



Gambar 20. Dokumentasi Pendataan Penyu di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Hasil pendataan menunjukkan terdapat 21 aktivitas penyu jenis penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*) dan penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*) yang mendarat dan bersarang di Pantai Buggei Siata. Tabulasi data pendaratan penyu di Site Desa Betumonga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 20. Tabulasi Data Pendaratan Penyu di Desa Betumonga, Kep. Mentawai

Bulan	Σ Penyu	Jenis Penyu			Σ Sarang	Σ Telur	Σ Telur yang Direlokasi	Σ Telur yang Menetas	Σ Tukik yang Dilepaskan
		L	B	S					
Januari	9	2	7	-	9	734	734	306	306
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	1	1	-	-	1	105	105	1	1
April	1	1	-	-	1	122	122	56	56
Mei	1	1	-	-	1	115	115	76	76
November	2	-	2	-	1	142	142	Belum	
Desember	9	2	7	-	9	881	881	Belum	

6. Pendataan Penyu di Kabupaten Simeulue, Aceh

Pendataan penyu di Pulau Salaut Besar berlangsung pada Januari, Februari, Maret, November, dan Desember, yang mana juga didukung oleh Perjanjian Kerja Sama dengan Yayasan Penyu Indonesia. Pendataan pada Januari hingga Maret pendataan dilakukan oleh Yayasan Penyu Indonesia, sementara BPSPL Padang melakukan pendataan pada November s.d. Desember sehubungan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada awal tahun.



Gambar 21. Dokumentasi Pendataan Penyu di Kabupaten Simeulue

Hasil pendataan menunjukkan terdapat 301 aktivitas penyu jenis penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*), dan penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) yang mendarat dan bersarang di Pulau Salaut Besar. Tabulasi data pendaratan penyu di Site Pulau Salaut Besar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 21. Tabulasi Data Pendaratan Penyu di Pulau Salaut Besar, Kab. Simeulue

Bulan	Σ Penyu	Jenis Penyu			Σ Sarang	Σ Telur	Σ Telur yang Direlokasi	Σ Telur yang Menetas	Σ Tukik yang Dilepaskan
		H	B	S					
Januari	39	30	9	-	39	2.132	2.132	-	-
Februari	34	30	3	1	34	1.104	1.104	75	75
Maret	46	46	0	-	46	962	962	3.283	3.283
November	111	108	2	1	111	1.420	1.420	11.333	11.333
Desember	71	67	2	2	71	2.282	1.864	9.021	9.021

7. Respon Cepat Penanganan Biota Dilindungi

Pada tahun 2025, tercatat 10 kejadian mamalia/jenis ikan terdampar di wilayah kerja BPSPL Padang. Tabel berikut menyajikan kejadian yang ditangani langsung oleh BPSPL Padang.

Gambar 22. Penanganan Biota Laut Dilindungi

No	Lokasi	Tanggal	Jenis	Kode	Penanganan
1	Desa Matuptuman Betumonga, Kecamatan Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat	23 Januari 2025	Penyu Hijau (<i>Chelonia mydas</i>)	1	Dilepasliarkan
2	Pantai Desa Angkeo, Kecamatan Teupah Barat, Kab. Simeulue, Provinsi Aceh	11 Maret 2025	Paus Balin Omura (<i>Balaenoptera omurai</i>)	3	Dibiarkan terurai secara alami
3	Pantai Green Salido Park, Kampung Balai Lamo, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Sumatra Barat	25 April 2025	Penyu Hijau (<i>Chelonia mydas</i>)	1	Dilepasliarkan
4	Pantai Green Salido Park, Kampung Balai Lamo, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Sumatra Barat	29 April 2025	Penyu Hijau (<i>Chelonia mydas</i>)	1	Dilepasliarkan
5	Pantai Muaro Anai, Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatra Barat	3 Juni 2025	Lumba-lumba Moncong Panjang (<i>Stenella longirostris</i>)	1	Dilepasliarkan
6	Sungai Batang Anai, Kecamatan Batang Anai, Kab. Padang Pariaman, Sumatra Barat	5 Juni 2025	Lumba-lumba Moncong Panjang (<i>Stenella longirostris</i>)	1	Dipantau ke lokasi
7	Pinggir Pantai Momong Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh	12 Juli 2025	Penyu Hijau (<i>Chelonia mydas</i>)	1	Diberikan perawatan
8	Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau	17 Juli 2025	Dugong (<i>Dugong dugon</i>)	2	Dipantau ke lokasi lalu dikuburkan
9	Pantai Ekowisata Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat	16 Oktober 2025	Lumba-lumba hidung botol (<i>Tursiops truncatus</i>)	3	Dikubur
10	Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau	15 Desember 2025	Lumba-lumba bungkuk	2	Dikubur

Kode kondisi keterdamparan

Kode 1: Terdampar hidup

Kode 2: Terdampar, baru mati

Kode 3: Mulai membusuk

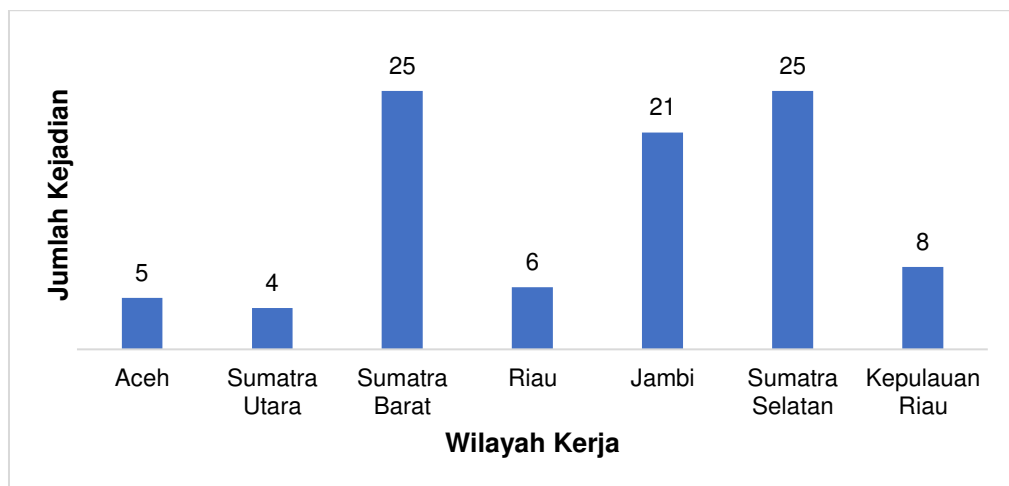
Kode 4: Pembusukan tingkat lanjut

Kode 5: Kerangka atau mumi



Gambar 23. Dokumentasi Penanganan Biota Laut Dilindungi

Sementara itu, BPSPL Padang juga telah merespon 94 kejadian kemunculan buaya di wilayah kerja BPSPL Padang.



Gambar 24. Jumlah Kemunculan Buaya di Wilker BPSPL Padang Tahun 2025



Gambar 25. Penanganan Kemunculan Buaya di Wilayah Kerja BPSPL Padang

IKU. 5. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)

Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

- Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/ atau look alike species (Hiu Apendiks dan Pari Apendiks);
- Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan (Hiu Apendiks, Pari Apendiks, dan Sidat).

Target Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan Pemanfaatan adalah Hiu Apendiks, Pari Apendiks, dan Sidat di wilayah kerja BPSPL Padang. Adapun capaian indikator ini dihitung dari inventarisasi dan penjumlahan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike spesies dan Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Padang.

A. Capaian Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan

Rincian Target IKU 5 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 22. Perbandingan Target dan Capaian IKU 5

IKU 5. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)								
Realisasi					Tahun 2025			
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024 -2025
3	5	6	8	8	3	7	233,33 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP	-(12,5%)

Capaian IKU ini adalah 7 jenis ikan yang didukung dengan pengelolaan pemanfaatannya dengan persentase capaian 233,33% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP. Jenis ikan tersebut meliputi jenis hiu, pari, sidat, teripang, arwana, napoleon, dan karang. Adapun kegiatan pendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini secara garis besar meliputi:

- Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan meliputi jenis hiu, pari, dan sidat; dan
- Pelayanan perizinan pemanfaatan meliputi jenis hiu, pari, teripang, arwana, napoleon, dan karang.

Data dukung:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WP4luhDzVJC8li_ro5jVJtof9Un5Gr2f

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Ditinjau dari capaiannya, terdapat penurunan capaian antara tahun 2024 dan 2025, dari 8 jenis ikan menjadi 7 jenis ikan. Pada tahun 2025 BPSPL Padang melaksanakan pendataan tiga jenis ikan yang dimanfaatkan (hiu, pari, sidat) dan enam jenis ikan yang dilayani perizinan pemanfaatannya (hiu, pari, teripang, arwana, napoleon, karang). Adanya penurunan capaian tersebut dibandingkan dengan tahun 2024 disebabkan oleh terblokirnya anggaran pendukung kegiatan pada tahun ini, yaitu pada kegiatan pendataan kuda laut, napoleon, dan teripang. Dalam hal ini, penurunan capaian terdapat pada jenis kuda laut yang tahun ini tidak terlaksana pendataannya. Sementara itu, jenis napoleon dan teripang tetap menjadi capaian meskipun pendataannya tidak terlaksana karena kedua jenis itu merupakan jenis ikan yang dilayani perizinan pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Padang.

Tabel 23. Rincian Capaian Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan

Tahun	Capaian Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Melalui Pendataan	Capaian Jenis Keanekaragaman hayati Perairan yang Dimanfaatkan Melalui Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan	Capaian Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Keseluruhan
2020	Hiu, pari, kuda laut	Hiu, pari	Hiu, pari, kuda laut
2021	Hiu, pari, kuda laut, napoleon	Hiu, pari, napoleon, arwana	Hiu, pari, kuda laut, napoleon, arwana
2022	Hiu, pari, kuda laut, napoleon,	Hiu, pari, teripang, arwana	Hiu, pari, kuda laut, napoleon, arwana, teripang
2023	Hiu, pari, kuda laut, napoleon, sidat	Hiu, pari, napoleon, arwana, teripang, belida	Hiu, pari, kuda laut, napoleon, arwana, teripang, sidat, belida
2024	Hiu, pari, kuda laut, napoleon sidat	Hiu, pari, arwana, teripang, napoleon, sidat, karang lunak.	Hiu, pari, kuda laut, napoleon, arwana, teripang, sidat, karang lunak
2025	Hiu, pari, sidat	Hiu, pari, teripang, arwana, napoleon, karang	Hiu, pari, sidat, teripang, arwana, napoleon, dan karang



Gambar 26. Perbandingan Capaian Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan dengan Tahun Sebelumnya

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Sementara itu, Renstra DJPK dan DJPRL 2025 s.d. 2029 belum final ketika laporan ini disusun. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Makassar, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 24. Perbandingan Capaian Pengelolaan Jenis Ikan yang Dimanfaatkan dengan BPSPL Makassar

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Makassar	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (Jenis)	3	7	5	10

Ditinjau dari capaian Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan pada kedua unit kerja, baik BPSPL Padang dan BPSPL Makassar telah mencapainya melampaui target dengan persentase capaian melebihi 120%. Adanya capaian yang melebihi target tersebut didukung dengan adanya pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan di masing-masing unit kerja.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Upaya pencapaian IKU ini didukung dengan koordinasi dan verifikasi jarak jauh dalam pelayanan perizinan pemanfaatan ikan sehingga kegiatan pelayanan dapat tetap berjalan secara daring. Hingga akhir tahun, sebagian anggaran pendukung masih dalam kondisi terblokir. Namun demikian, anggaran untuk pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dan pendataan beberapa jenis ikan yang dimanfaatkan sudah tidak terblokir. Adapun kegiatan pendataan yang dapat dilanjutkan meliputi hiu, pari dan sidat.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada perekrutan tenaga enumerator yang kompeten dan mudah diarahkan melalui koordinasi jarak jauh. Selain itu, penggunaan aplikasi e-SAJI dan e-Sultan's juga mendukung kegiatan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan secara sistematis.

G. Kegiatan Pendukung

Hingga tahun 2025 berakhir, terdapat beberapa kegiatan pendukung yang belum terlaksana sehubungan dengan anggaran pendukung kegiatan yang masih terblokir. Adapun kegiatan pendukung IKU ini yang telah terlaksana adalah sebagai berikut.

1. Pelayanan Perizinan Jenis Ikan yang Dimanfaatkan

Kegiatan pelayanan perizinan jenis ikan yang dimanfaatkan dilaksanakan di tujuh provinsi wilayah kerja BPSPL Padang, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sepanjang tahun 2025, BPSPL Padang telah melayani perizinan pemanfaatan jenis hiu, pari, arwana, dan teripang melalui penerbitan 319 Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN) dan 514 Rekomendasi.

Berikut adalah rekapitulasi pelayanan berdasarkan dari penerbitan SAJI dan rekomendasi.

Tabel 25. Rekapitulasi Pelayanan Jenis Ikan yang Dimanfaatkan Tahun 2025

Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen yang Terbit
Rekomendasi	514
SAJI Dalam Negeri	319
Total	833



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 01 s.d. 12

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	5,523,465	0	0	1,309,532	0	6,832,997
2	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	0	0	0
3	425259 Pendapatan Perizinan Lainnya	0	265,815,000	0	0	0	(675,000)	265,140,000
4	425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	464,258,838	0	0	0	(1,713,100)	462,545,738
GRAND TOTAL		0	735,597,303	0	0	1,309,532	(2,388,100)	734,518,735

Gambar 27. Perolehan PNBP BPSPL Padang Tahun 2025
(Sumber: Aplikasi OM SPAN, Januari 2026)

2. Pendataan Hiu dan Pari di Banda Aceh

Pendataan dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo dengan dibantu oleh tenaga enumerator pada bulan Januari, kemudian dilanjutkan kembali pada Juni hingga Desember 2025 dengan jumlah hari pendataan selama 25 hari setiap bulannya. Adapun terhentinya pendataan tersebut disebabkan oleh adanya blokir pada anggaran pendukung kegiatan.

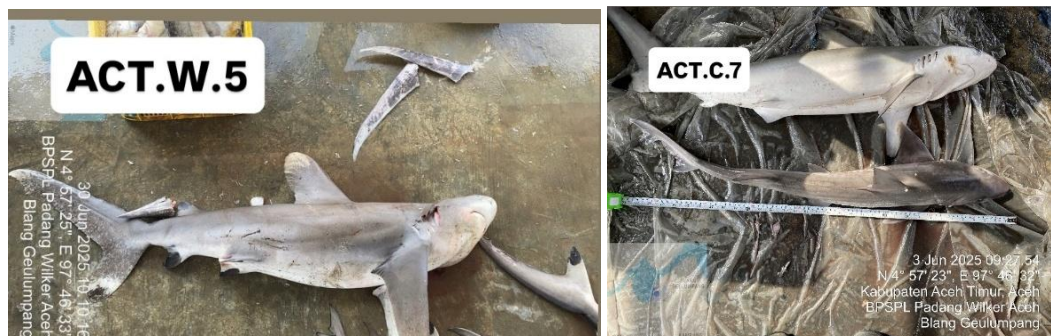


Gambar 28. Pendataan Hiu dan Pari di PPS Lampulo, Banda Aceh

Jumlah hiu yang mendarat selama pendataan tahun 2025 berjumlah 43 spesies yang terdiri dari 13 famili dengan jumlah total individu 2.255 ekor ikan hiu. Dari 43 spesies tersebut, jenis yang paling sering dijumpai adalah *Loxodon macrorhinus* yang merupakan jenis yang masuk dalam appendiks II CITES. Sementara itu, jumlah pari yang mendarat selama pendataan tahun 2025 berjumlah 32 spesies yang terdiri dari tujuh famili dengan jumlah total individu 1.708 ekor ikan pari. Dari 32 spesies tersebut, jenis yang paling sering dijumpai adalah *Neotrygon orientalis* dan bukan merupakan jenis yang masuk dalam appendiks CITES.

3. Pendataan Hiu dan Pari di Aceh Timur

Pendataan dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Idi Rayeuk dengan dibantu oleh tenaga enumerator pada bulan Januari, kemudian dilanjutkan kembali pada Juni hingga Desember 2025. Adapun terhentinya pendataan tersebut disebabkan oleh adanya blokir pada anggaran pendukung kegiatan pada awal tahun.



Gambar 29. Pendataan Hiu dan Pari di PPN Idi, Aceh Timur

Hasil pendataan hiu-pari di Pelabuhan Perikanan Idi Aceh Timur periode Januari – Desember 2025, didapatkan 3.276 individu hiu yang terdiri dari 6 famili dan 14 Species. *Carcharhinus sorrah* adalah

species yang paling banyak tertangkap yaitu sejumlah 3.092 individu, mengalami kenaikan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan hasil pendataan di tahun 2022 sebanyak 1.005 ekor, atau sebesar 30,7% dari total tangkapan. Jenis hiu yang lain yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Idi jumlahnya tidak begitu signifikan.

Dari hasil pendataan, tercatat ada 1.839 individu pari yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Idi, Aceh Timur. Jumlah individu pari yang berhasil didata oleh enumerator lebih sedikit dibandingkan dengan hasil pendataan hiu. Jumlah individu pari yang berhasil di data di tahun 2025 lebih banyak apabila dibandingkan dengan hasil pendataan di tahun 2022 yaitu, yang hanya terdata sejumlah 174 individu. Dari hasil pendataan dapat diidentifikasi 4 famili dan 15 species. Selama pendataan, terdapat empat jenis pari yang masuk dalam apendiks CITES yaitu *R. Australiae*, *R. laevis*, *Rhina ancylostoma* dan *Rhinobatos borneensis*. Berdasarkan status IUCN redlist, terdapat tiga jenis pari yang masuk dalam kategori *critically endangered* (*R. Australiae*, *R. laevis*, *Rhina ancylostoma* dan *Rhinobatos borneensis*), tiga jenis pari kategori *endangered* (*M. gerrardi*, *P. jenkinskii*, dan *G. zonura*).

4. Pendataan Hiu dan Pari di Aceh Barat Daya

Pendataan dilaksanakan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Susoh Ujung Serangga dengan dibantu oleh tenaga enumerator pada bulan Januari, kemudian dilanjutkan kembali pada Juni hingga Desember 2025 dengan total keseluruhan jumlah hari pendataan sebanyak 199 hari. Adapun terhentinya pendataan tersebut disebabkan oleh adanya blokir pada anggaran pendukung kegiatan pada awal tahun.



Gambar 30. Pendataan Hiu dan Pari di Ujung Serangga, Aceh Barat Daya

Jumlah hiu yang mendarat selama pendataan tahun 2025 menunjukkan total 1466 individu yang terbagi ke dalam delapan famili dan 28 spesies. Adapun jenis hiu yang tertangkap didominasi oleh *Carcharhinus sorrah* sebanyak 30% dan *Sphyrna lewini* sebanyak 24%. Sementara itu, jumlah pari yang mendarat selama pendataan tahun 2025 menunjukkan total 230 individu yang terbagi ke dalam tujuh famili dan 18 spesies. Adapun jenis pari yang tertangkap didominasi oleh *Neotrygon orientalis* sebanyak 28% dan *Rhynchobatus australiae* sebanyak 28%.

5. Pendataan Hiu dan Pari di Aceh Jaya

Pendataan dilaksanakan di PPI Calang dan Rigaih dengan dibantu oleh tenaga enumerator pada bulan Juni hingga Desember 2025 dengan total keseluruhan jumlah hari pendataan sebanyak 180 hari. Adapun dimulainya pendataan pada Juni disebabkan oleh adanya blokir pada anggaran pendukung kegiatan pada awal tahun.



Gambar 31. Pendataan Hiu dan Pari di Aceh Jaya

Jumlah hiu yang mendarat selama pendataan tahun 2025 menunjukkan total 1.683 individu yang terbagi ke dalam enam famili dan 18 spesies. Adapun jenis hiu yang tertangkap didominasi oleh *Sphyrna lewini* sebanyak 46,21% dan *Loxodon macrorhinus* sebanyak 15,90%. Sementara itu, jumlah pari yang mendarat selama pendataan tahun 2025 menunjukkan total 399 individu yang terbagi ke dalam lima famili dan 17 spesies. Adapun jenis pari yang tertangkap didominasi oleh *Neotrygon caeruleopunctata* sebanyak 20,55% dan *Neotrygon orientalis* sebanyak 18,30%.

6. Pendataan Hiu dan Pari di Aceh Barat

Pendataan dilaksanakan di PPI Ujung Baroh dengan dibantu oleh tenaga enumerator pada bulan Juli hingga Desember 2025 dengan jumlah hari pendataan 155 hari. Adapun dimulainya pendataan pada Juli disebabkan oleh adanya blokir pada anggaran pendukung kegiatan pada awal tahun.



Gambar 32. Pendataan Hiu dan Pari di Aceh Barat

Jumlah hiu yang mendarat selama pendataan tahun 2025 menunjukkan total 2.305 individu yang terbagi ke dalam Sembilan famili dan 23 spesies. Adapun jenis hiu yang tertangkap didominasi oleh *Sphyrna lewini* sebanyak 42%, *Carcharhinus falciformis* sebanyak 22%, dan *Loxodon macrorhinus* sebanyak 18%. Sementara itu, jumlah pari yang mendarat selama pendataan tahun 2025 menunjukkan total 2.442 individu yang terbagi ke dalam tujuh famili dan 22 spesies. Adapun jenis pari yang tertangkap didominasi oleh *Maculabatis gerrardi* sebanyak 85%.

7. Pendataan Hiu dan Pari di Sibolga

Pendataan dilaksanakan di Pendaratan Ikan Pasar Jalan Dalam dengan dibantu oleh tenaga enumerator pada bulan Agustus hingga Desember 2025. Adapun dimulainya pendataan pada Agustus disebabkan oleh adanya blokir pada anggaran pendukung kegiatan pada awal tahun.



Gambar 33. Pendataan Hiu dan Pari di Sibolga

Hasil pendataan di Sibolga menunjukkan komposisi jenis hiu dan pari sepanjang pendataan tahun 2025 dengan total tangkapan untuk jenis hiu yang berjumlah 4.385 ekor dan pari sejumlah 4.850 ekor. 52,36% dari hasil tangkapan hiu berjenis kelamin betina dan 47,64% berjenis kelamin jantan. Sementara itu, terdapat 2.821 ekor hasil tangkapan pari jenis kelamin betina dan 2.029 ekor pari jantan.

Meskipun masuk kategori appendiks CITES, jenis hiu yang paling banyak tertangkap yaitu *Carcharhinus sorrah* dengan total tangkapan 752 ekor. Sementara itu, untuk jenis pari *Neotrygon orientalis* menjadi yang paling tinggi jumlah tangkapannya dengan total 1.602 ekor.

8. Pendataan Hiu dan Pari di Bintan

Pendataan dilaksanakan di Pelabuhan Tangkahan Perikanan milik UD Tang Seng dengan dibantu oleh tenaga enumerator pada bulan Juni hingga Desember 2025 dengan jumlah hari pendataan selama 175 hari. Adapun dimulainya pendataan pada Juni disebabkan oleh adanya blokir pada anggaran pendukung kegiatan pada awal tahun.



Gambar 34. Pendataan Hiu dan Pari di Kelurahan Kawal, Kabupaten Bintan

Jumlah ikan yang terdata selama pendataan adalah 11.727 ekor terdiri dari sepuluh famili dan 27 spesies. Berdasarkan pendataan tersebut diperoleh data bahwa hiu yang terdata sebanyak 5.920 individu yang terbagi dalam lima famili dan 13 spesies, sedangkan pari teridentifikasi sebanyak 5.807 individu yang terbagi ke dalam lima famili dan 14 spesies. Terdapat enam spesies hiu dan tiga spesies pari yang masuk ke dalam kategori Appendiks II CITES.

9. Pendataan Hiu dan Pari di Bengkalis

Pendataan dilaksanakan di tempat pendaratan ikan Pantai Penampar dan Pantai Selat Baru dengan dibantu oleh tenaga enumerator pada bulan Januari, kemudian dilanjutkan kembali pada Juni hingga

Desember 2025. Adapun terhentinya pendataan tersebut disebabkan oleh adanya blokir pada anggaran pendukung kegiatan pada awal tahun.



Gambar 35. Pendataan Hiu dan Pari di Pantai Penampar, Kabupaten Bengkalis

Jumlah hiu yang terdata selama pendataan tahun 2025 berjumlah 236 ekor individu yang terbagi ke dalam dua famili dan tiga spesies. Spesies hiu yang paling banyak terdata adalah *Scoliodon macrorhynchos* yaitu 228 ekor. Sementara itu, total pari yang terdata selama pendataan tahun 2025 berjumlah 268 ekor individu yang terbagi ke dalam tiga famili dan sembilan spesies. Spesies pari yang paling banyak terdata adalah *Pateobatis uarnacoides* yaitu sebanyak 87 ekor.

10. Pendataan Sidat di Agam

Pendataan dilaksanakan dengan dibantu oleh tenaga enumerator pada bulan Januari, kemudian dilanjutkan kembali pada Juli hingga Desember 2025. Adapun terhentinya pendataan tersebut disebabkan oleh adanya blokir pada anggaran pendukung kegiatan pada awal tahun.



Gambar 36. Pendataan Sidat di Kabupaten Agam

Hasil pendataan sidat pada tahun 2025 di Kabupaten Agam ditemukan 21 ekor *Anguilla bicolor* dan 26 ekor *Anguilla marmorata*. Data tangkapan sidat dewasa jenis *Anguilla marmorata* tertinggi yakni pada Januari sebanyak 14 ekor dan paling sedikit pada Oktober sebanyak 2 ekor dengan kisaran Panjang 79-158 cm dan berat 2100-9000 gram. Data tangkapan sidat dewasa jenis *Anguilla bicolor* paling banyak pada November sebanyak 9 ekor dan paling sedikit pada Januari sebanyak 4 ekor dengan kisaran Panjang 34-72 dan berat 350-1800 gram.

Berdasarkan analisis pola pertumbuhan sidat untuk jenis *Anguilla marmorata* dan *Anguilla bicolor* dihasilkan secara keseluruhan merupakan pola pertumbuhan alometrik negatif, yang artinya laju

pertumbuhan panjang dan berat tidak seimbang, di mana laju pertambahan panjang lebih cepat daripada pertambahan berat dengan karakteristik golongan ikan yang memiliki badan kurang pipih/kurus.

IKU. 6. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)

Nilai minimum kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan 43enetic merupakan nilai terendah yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan 43enetic. Adapun pencapaian IKU ini diperoleh dari penjumlahan nilai indikator dari 4 aspek penilaian yang terdiri dari (SIPJI (Verifikasi lapangan), SAJI-DN, SKM dan penerapan konvensi). Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$KPP = \sum (bobot\ aspek \times \sum A) + \sum (bobot\ aspek \times \sum B) + \sum (bobot\ aspek \times \sum C) + \sum (bobot\ aspek \times \sum D)$$

Keterangan:

KPP : Kinerja Pelayanan Perizinan

(bobot aspek x $\sum A$) : Hasil aspek Proses Verifikasi lapangan untuk Penerbitan SIPJI

(bobot aspek x $\sum B$) : Hasil aspek Proses Penerbitan SAJI-DN

(bobot aspek x $\sum C$) : Hasil aspek Survei Kepuasan Masyarakat

(bobot aspek x $\sum D$) : Hasil aspek Penerapan Konvensi

A. Capaian Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan

Rincian target IKU 6 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 26. Perbandingan Target dan Capaian IKU 6

IKU. 6. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)				
Realisasi	Tahun 2025			
2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024 – 2025
-	80	96	120	-

Capaian IKU ini adalah 96 dari target 80 dengan persentase capaian 120%. Capaian IKU ini dinilai dari aspek proses verifikasi lapangan untuk penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI), proses penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN), survei kepuasan masyarakat, dan penerapan konvensi.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18jspi2LvBY2xPuOEfzYn7hxmCK9K9bKI>

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

IKU ini merupakan IKU baru yang tidak terdapat pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Sementara itu, Renstra DJPK dan DJPRL 2025 s.d. 2029 belum final ketika laporan ini disusun. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Makassar, disajikan pada table berikut.

Tabel 27. Perbandingan Capaian Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan dengan BPSPL Makassar

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Makassar	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)	80	96	80	99,91

Ditinjau dari capaian kedua unit kerja, baik BPSPL Padang maupun BPSPL Makassar telah mencapai Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan melampaui target dengan nilai di atas 90. Dalam hal ini, kedua unit kerja telah menjalankan budaya pelayanan prima dalam pelayanan perizinan jenis ikan yang dimanfaatkan di wilayah kerja masing-masing.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil analisis, pencapaian IKU ini didukung oleh kinerja petugas pelayanan BPSPL Padang dalam perizinan pemanfaatan jenis ikan. Selain kinerja dalam penerbitan produk layanan, kepuasan masyarakat juga merupakan aspek yang dinilai. Dalam praktiknya, BPSPL Padang senantiasa menerapkan pelayanan prima dan mengapresiasi petugas pelayanan terbaik setiap triwulannya.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada penggunaan aplikasi e-SAJI dan e-Sultan's dalam kegiatan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan secara sistematis. Selain itu, terdapat juga efisiensi pada pembentukan wilayah kerja dan gerai pelayanan lingkup BPSPL Padang yang memudahkan fungsi pelayanan.

G. Kegiatan Pendukung

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh kegiatan berikut.

1. Apresiasi Petugas Pelayanan Terbaik BPSPL Padang



Gambar 37. Piagam Penghargaan Petugas Pelayanan Terbaik Triwulan I 2025



Gambar 38. Piagam Penghargaan Petugas Pelayanan Terbaik Triwulan II Tahun 2025

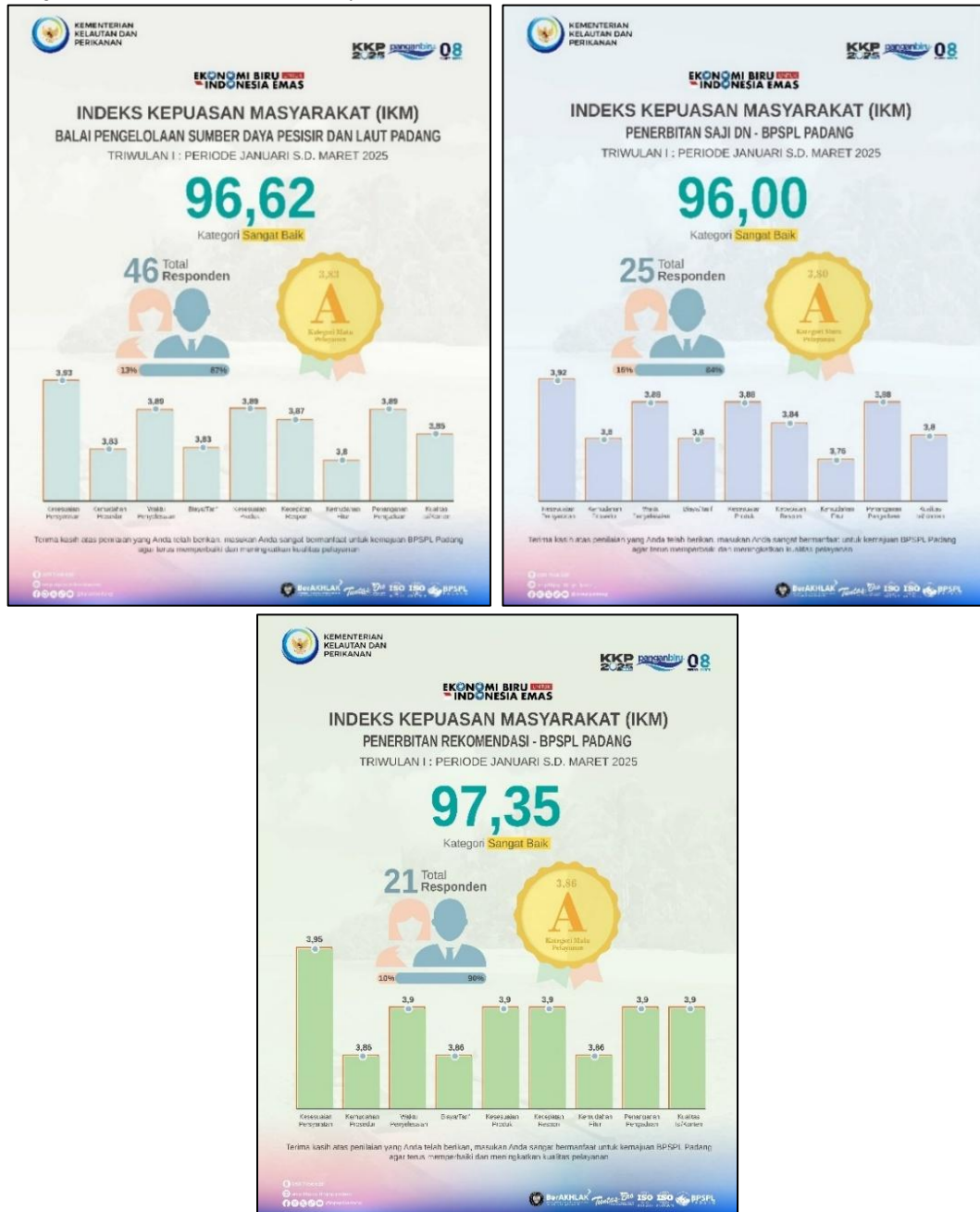


Gambar 39. Piagam Penghargaan Petugas Pelayanan Terbaik Triwulan III Tahun 2025

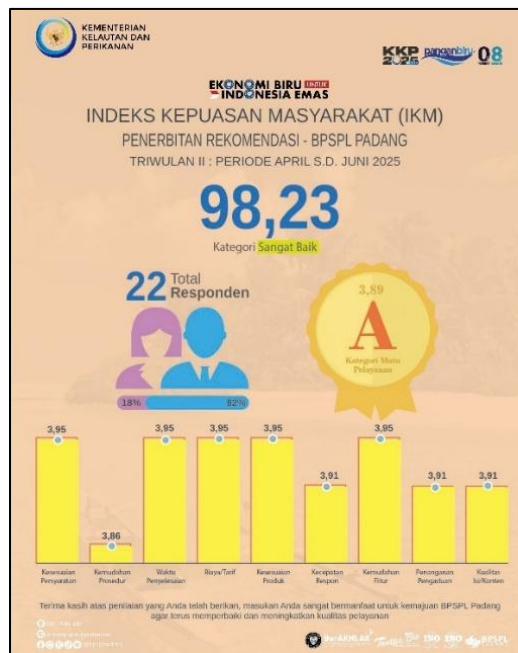
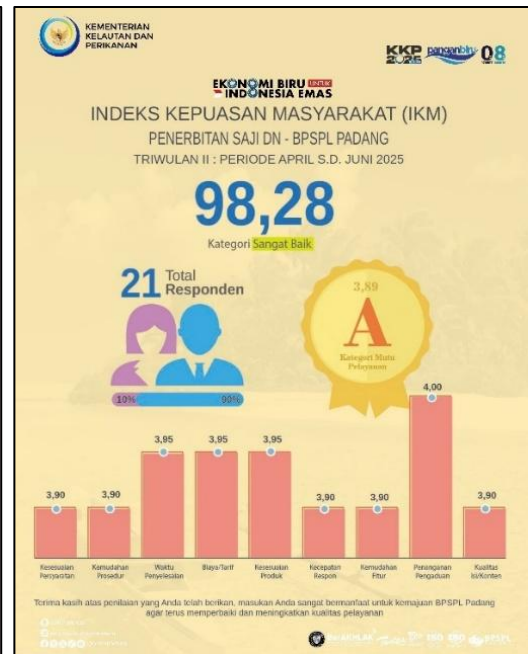
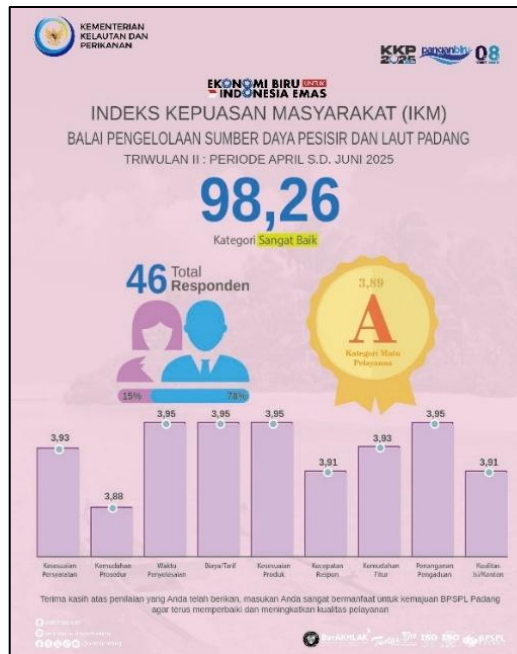


Gambar 40. Piagam Penghargaan Petugas Pelayanan Terbaik Triwulan IV Tahun 2025

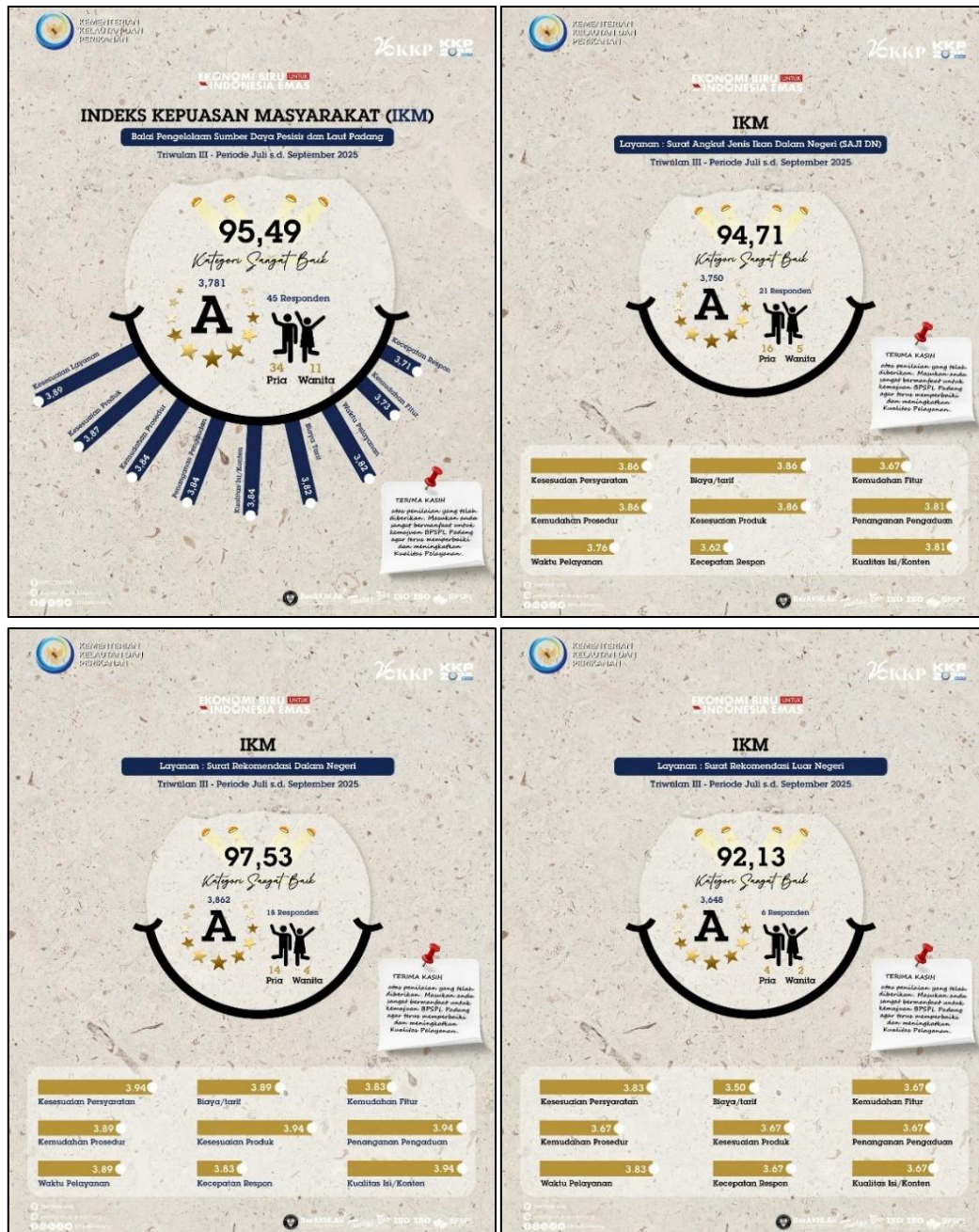
2. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat



Gambar 41. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I 2025



Gambar 42. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II 2025



Gambar 43. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III 2025

IKU. 7. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)

Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil. Adapun pencapaian IKU ini diperoleh dari menjumlahkan dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Padang.

A. Capaian Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun

Rincian target IKU 7 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 28. Perbandingan Target dan Capaian IKU 7

IKU 7. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)				
Realisasi	Tahun 2025			
2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024 –2025
-	1	1	100	-

Capaian IKU ini adalah satu (1) dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan persentase capaian 100%. BPSPL Padang telah mengidentifikasi pemanfaatan 33 pulau-pulau kecil di Batam, Bintan, Simeulue, Jambi, Kepulauan Mentawai, dan Pesisir Selatan. Adapun estimasi PNBPN yang dapat diperoleh dari pemanfaatan pulau-pulau kecil ini mencapai 24,1 Miliar Rupiah.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TO5KggZldoUI4zfcNWovUc-h9xINFhcc>

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

IKU ini tidak digunakan pada tahun 2024 sehingga tidak terdapat perbandingan capaian kinerja.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Sementara itu, Renstra DJPK dan DJPRL 2025 s.d. 2029 belum final ketika laporan ini disusun. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Makassar, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 29. Perbandingan Capaian Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan BPSPL Makassar

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Makassar	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	1

Ditinjau dari capaian kedua unit kerja, baik BPSPL Padang maupun BPSPL Makassar telah mencapai dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai target, yaitu satu dokumen.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Anggaran pendukung kegiatan ini sempat terdampak blokir pada awal tahun. Blokir pada anggaran pendukung kegiatan telah dibuka sehingga kegiatan pendukung dapat terlaksana. Pencapaian IKU ini didukung dengan kapabilitas SDM, peralatan identifikasi yang memadai, dan kondisi cuaca yang baik dalam melaksanakan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil secara menyeluruh.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada pelibatan tim wilayah kerja terdekat untuk mendampingi identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil. Selain itu, efisiensi juga terdapat dalam penggunaan Zoom Meeting untuk persiapan kegiatan.

G. Kegiatan Pendukung

Pencapaian IKU ini didukung oleh identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang telah terlaksana di Wilayah Kerja BPSPL Padang.

1. Identifikasi Pemanfaatan Pulau Kecil di Nias Barat dan Kota Sibolga pada 14 s.d. 19 Juli 2025



Gambar 44. Dokumentasi Identifikasi Pemanfaatan Pulau Kecil di Nias Barat

2. Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar di Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 21 s.d. 25 Juli 2025



Gambar 45. Dokumentasi Identifikasi Pemanfaatan Pulau Kecil di Kepulauan Mentawai

3. Identifikasi dan Pendataan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya di Kawasan Pariwisata Lagoi Kabupaten Bintan pada 29 Juli 2025



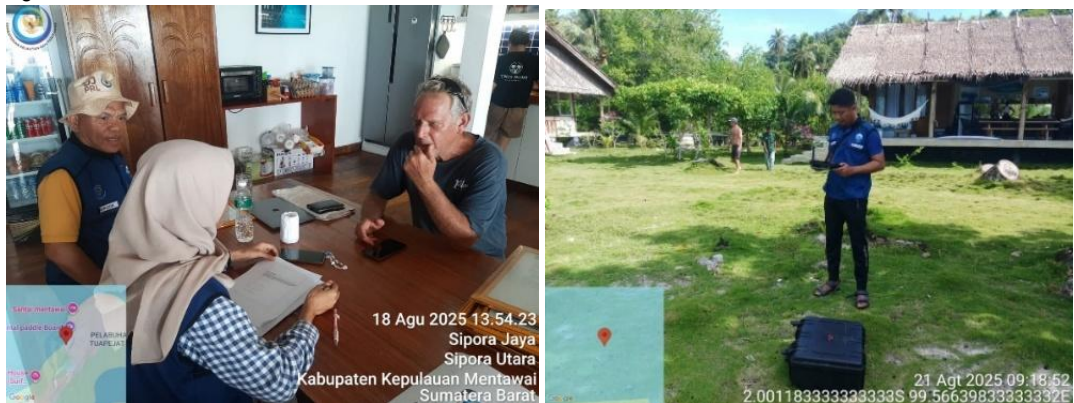
Gambar 46. Dokumentasi Identifikasi Pemanfaatan Pulau Kecil di Bintan

4. Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di KKD Lingga bagian Utara (Pulau Benan, Seranggas Laut dan Sekitarnya) dan KKD Timur Bintan (Pulau Bintan bagian Timur, Pulau Penyusuk) pada 3 s.d. 8 Agustus 2025



Gambar 47. Dokumentasi Identifikasi Pemanfaatan Pulau Kecil di Lingga

5. Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 18 s.d. 22 Agustus 2025



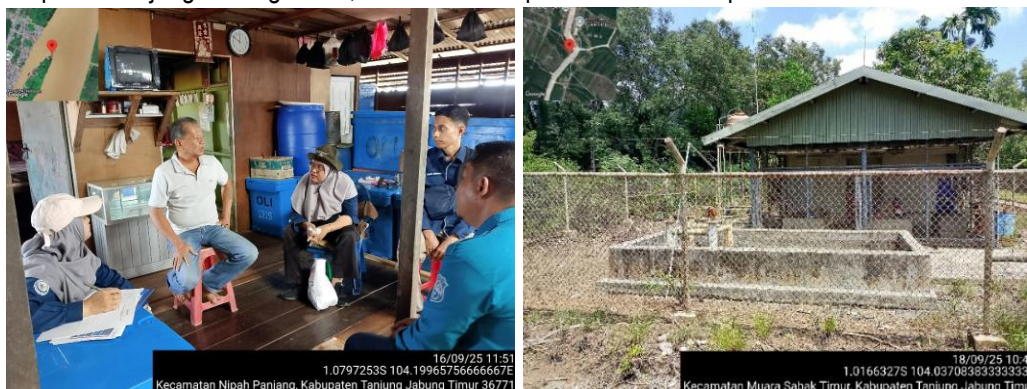
Gambar 48. Dokumentasi Identifikasi Pemanfaatan Pulau Kecil di Kepulauan Mentawai

6. Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil di Pulau Simeulue, Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh pada 1 s.d. 5 September 2025



Gambar 49. Dokumentasi Identifikasi Pemanfaatan Pulau Kecil di Simeulue

7. Identifikasi Pemanfaatan Kegiatan Berusaha Pulau–Pulau Kecil dan Lingkungan Sekitarnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi pada 14 s.d. 19 September 2025



Gambar 50. Dokumentasi Identifikasi Pemanfaatan Pulau Kecil di Tanjung Jabung Timur

8. Identifikasi Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil dan Lingkungannya di Kota Batam pada 15 s.d. 19 September 2025



Gambar 51. Dokumentasi Identifikasi Pemanfaatan Pulau Kecil di Batam

9. Identifikasi Pemanfaatan Kegiatan Berusaha Pulau – Pulau Kecil dan Lingkungan Sekitarnya di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat pada 22 s.d. 24 September 2025



Gambar 52. Dokumentasi Identifikasi Pemanfaatan Pulau Kecil di Pesisir Selatan

IKU. 8. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi/verifikasi dan monitoring/pengendalian pemanfaatan ruang laut. Adapun pencapaian IKU ini diperoleh dari Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi/verifikasi dan monitoring/pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A. Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut

Rincian target IKU 8 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 30. Perbandingan Target dan Capaian IKU 8

IKU 8. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)					
Realisasi		Tahun 2025			
2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024 –2025
3	3	2	2	100	-

Capaian IKU ini adalah dua (2) dokumen yang terdiri dari dokumen identifikasi/verifikasi dan monitoring perizinan pemanfaatan ruang laut dengan persentase capaian 100%.

1. Identifikasi/Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

- BPSPL Padang telah melaksanakan identifikasi pemanfaatan ruang laut terhadap 10 subjek hukum. Adapun identifikasi ini dilakukan terhadap pelaku usaha pemanfaat ruang laut yang belum memiliki PKKPR.
- BPSPL Padang terlibat dalam 208 Verifikasi Teknis permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan BPSPL Padang.
- BPSPL Padang terlibat dalam 4 Verifikasi Lapangan permohonan PKKPR.

2. Monitoring Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut

Pengendalian pemanfaatan ruang laut dilakukan terhadap subjek hukum yang telah mengantongi izin PKKPR. Pada tahun 2025, BPSPL Padang telah melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang laut terhadap 34 subjek hukum. Adapun hasil kepatuhan pelaksanaan KPR berdasarkan hasil pengendalian adalah 12 izin terbit dinilai taat; 9 izin terbit dinilai tidak taat; dan 13 izin terbit dinilai taat dengan catatan.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mqbEK8H0r0IzBbU-U51pCKOcpqPOaktI>

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Ditinjau dari capaiannya, terdapat penurunan jumlah dokumen pada tahun 2025. Adapun penurunan capaian tersebut disebabkan dengan adanya penurunan target. Pada prinsipnya, sejak tahun 2023 IKU ini tercapai dengan persentase 100%.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Sementara itu, Renstra DJPK dan DJPRL 2025 s.d. 2029 belum final ketika laporan ini disusun. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar

Perbandingan capaian dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Makassar, disajikan pada table berikut.

Tabel 31. Perbandingan Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut dengan BPSPL Makassar

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Makassar	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun (Dokumen)	2	2	2	3

Berdasarkan perbandingan capaian antara dua unit kerja, capaian BPSPL Makassar lebih tinggi dengan adanya dokumen sosialisasi pemanfaatan ruang laut yang dihasilkan. Adapun kegiatan sosialisasi tersebut terealisasi melalui dukungan anggaran kegiatan LAUTRA, yang mana tidak BPSPL Padang dapatkan.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil analisis, pencapaian IKU ini didukung oleh kelengkapan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dan kooperasi dari pelaku usaha pemanfaatan ruang laut. Sepanjang tahun 2025, BPSPL Padang telah melaksanakan penilaian teknis, penilaian lapangan dan asistensi dalam lingkup perizinan pemanfaatan ruang laut. Selain itu, anggaran pendukung kegiatan ini sudah tidak terblokir sehingga pelaksanaan kegiatan pendukung dapat berjalan kembali.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

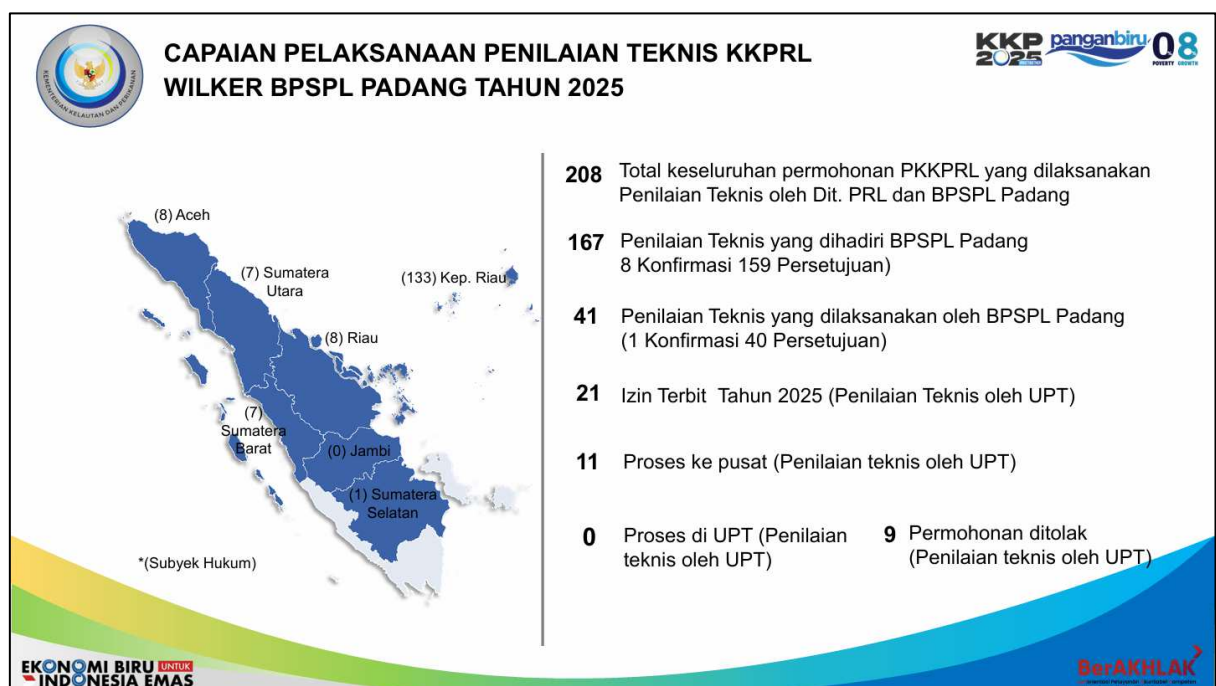
Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada pelibatan tim dari wilayah kerja terdekat untuk mendampingi identifikasi ataupun verifikasi lapangan. Selain itu, efisiensi juga didukung dengan penggunaan aplikasi zoom sebagai media dalam pelaksanaan penilaian teknis permohonan pemanfaatan ruang laut.

G. Kegiatan Pendukung

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh kegiatan berikut.

1. Penilaian Teknis Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)

Penilaian teknis merupakan salah satu tahapan dalam pemrosesan izin KKPRL yang dimohonkan oleh pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (PRKPD) dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dan BPSPL Padang berperan sebagai penyelenggara penilaian teknis. Rekapitulasi verifikasi teknis perizinan kesesuaian ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam ilustrasi di bawah ini.



Gambar 53. Penilaian Teknis KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2025

I	PIC UPLOAD	QUALITY CONTROL	NOMOR PERMOHONAN	NOMOR PENGUTARAN	NOMOR PENILAIAN	SUBYEK HUKUM	REKOM HASIL PENILAIAN TEKNIS	HASIL	STATUS	TANGGAL MELAKUKAKAN DRAFT BERTA ACARA/REMO	UPLOAD BAP TERDIT (PILAT)
30 Januari 2025	Rtly	Rua	20240917162058273820	24.11.A.02860	24.12.10040	AKEL ANG	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
	Rtly	Rua	202409191506181932265			PT APNAL MAJULUR JAYA	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
	Rtly	Rua	202412121011301179722			DODI	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
	Rtly	Rua	202401251514444849739			TJAGUS THAMIRN	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
	Rtly	Rua	202211301127358128386			TJAGUS THAMIRN	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
	Rtly	Rua	202411241638483747560			CV GASION INDAH	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
31 Januari 2025	Rtly	Rua	202411281431032102890			DODI	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
	Rtly	Rua	202411281431032102890								
	Rtly	Rua	202411281431032102890								
12 Februari 2025	Rtly	Rua	202411281431032102890			YULANI	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
	Rtly	Rua	24.11.B.00089	24.11.B.00089		WINDA	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
	Rtly	Rua	202501120844071506544	25.11.A.00081	25.12.10009	IRAN SYUKPUTRA	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
	Rtly	Rua	202501081031372898953	25.11.A.00037	25.12.10010	UKI	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
	Rtly	Rua	20241227051054026025	25.11.A.00863	25.12.10011	PT LABUAN SUNDAY MANDEH	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
	Rtly	Rua	20250507205485872531	25.11.A.00174	25.12.10013	PT ALAM INDAH BINTAN	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
24 Februari 2025	Rtly	Rua	202505071638483687253	25.11.A.00286	25.12.10014	HERU FANTA	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
	Rtly	Rua	20241115158196808024	25.11.A.00283	25.12.10015	HENDRIK	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
	Rtly	Rua	202401251332085143575	24.11.A.01981	25.12.10016	TJAGUS THAMIRN	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
16 Mei 2025	Rtly	Rua	202503131431032102890	25.11.A.00837	25.12.10017	PT SINDAYA MITRA PERKASA	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
	Rtly	Rua	202503281027040303028	25.11.A.00513	25.12.10018	PT SINDAYA MITRA PERKASA	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
	Rtly	Rua	20250306183401961475	25.11.A.00389	25.12.10019	PT SINDAYA MITRA PERKASA	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
	Rtly	Rua	24.11.B.00386	24.11.B.00386 AC	25.12.10020	DINAS PERHUBUNGAN KAB. SIMEULUE	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
	Rtly	Rua	202503191301280501998	25.11.A.00961	25.12.10021	HENDRIK	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
	Rtly	Rua	202503081615103868802	25.11.A.00773	25.12.10022	UKI	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
8 Juli 2025	Rtly	Rua	20250312102036509875	25.11.A.00918	25.12.10023	PT MARINO UTAMA LESTARI	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
	Rtly	Rua	202503081437100062939	25.11.A.00586	25.12.10024	FIRMAN	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
	Rtly	Rua	20250312102036509875	25.11.A.00918	25.12.10023	PT SURF LAND RESORTS	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
14 Agustus 2025	Rtly	Rua	202503191830354486558	25.11.A.00493	25.12.10025	JOHARI AMAN	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒
	Rtly	Rua	202411071208484849739	25.11.A.00490	25.12.10027	CV EKY'S MOMONG RESORT	Diternak Disetujui	Terkait	Selamat		☒

Gambar 54. Penilaian Teknis yang Dilaksanakan oleh BPSPL Padang Tahun 2025

2. Verifikasi Lapangan KKPRL

Verifikasi lapangan merupakan tahapan lanjutan dalam pemrosesan izin KKPRL setelah penilaian teknis ketika terdapat hal-hal yang perlu ditinjau kembali di lapangan. Berikut adalah rincian kegiatan verifikasi lapangan KKPRL yang BPSPL Padang laksanakan pada tahun 2025.

Wilayah Kerja	Jumlah Verifikasi Lapangan KKPRL	Detail Kegiatan
(1) Aceh	4	Verifikasi Lapangan PKKPRL 1. PT Labuan Sunday Mandeh 2. PT Batam Swadaya Mandiri 3. CV Eky's Momong Resort 4. PT Indahia Aquaculture 5. George Santos
(0) Sumatera Utara	8	Verifikasi Lapangan Uji Petik BPK PKKPRL 1. PT Batam Sentralindo 2. PT Taman Nongsa Indah Village 3. PT Uma Berkah 4. PT Vesinter 5. PT Citra Shipyard 6. PT Megah Bangun Sejahtera 7. PT Nanindah Mutiara Shipyard 8. PT Seraya Terminal
(2) Kep. Riau	8	Pedampingan Pengawasan PSDKP
(0) Riau	11	Asistensi KKPRL Pasca PP 25 1. PT BAHTERA BAHARI SHIPYARD 2. PT JUTAM READYMIX CONCRETE 3. PT GRAHA TRISAKA INDUSTRI 4. PT DUTA PERKASA MAS 5. PT MCDERMOTT INDONESIA 6. PT PANDAN BAHARI SHIPYARD 7. PT DOK WARISAN PERTAMA 8. PT BATAM STEEL INDONESIA 9. PT NANINDAH MUTIARA SHIPYARD 10. PT LA ENGINEERING 11. PT DUTA KOPAK JAYA
(2) Sumatera Barat	1	Kunjungan ITJEN KKP PT Limas Griya Raya
(0) Jambi		
(0) Sumatera Selatan		

Gambar 55. Verifikasi Lapangan KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2025

3. Identifikasi KKPRL

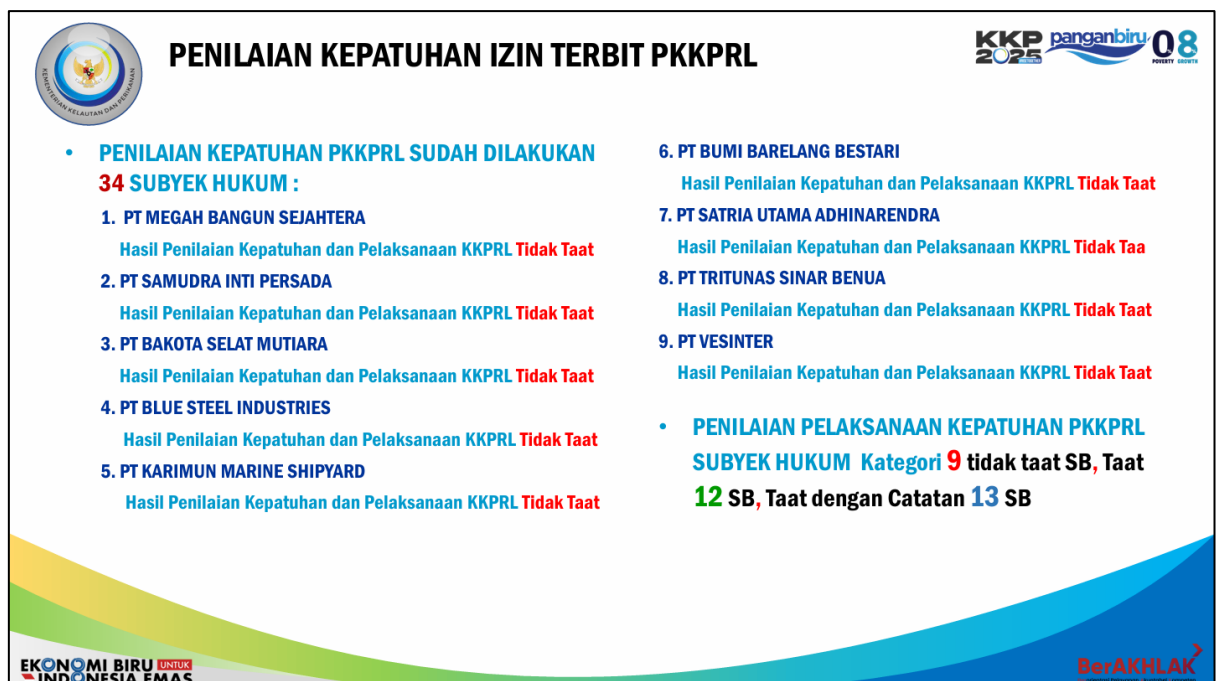
Identifikasi KKPRL dilaksanakan terhadap pelaku usaha pemanfaat ruang laut yang belum memiliki PKKPR. Rekapitulasi identifikasi pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang disajikan dalam ilustrasi di bawah ini.



Gambar 56. Identifikasi KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2025

4. Pengendalian KKPRL

Pengendalian KKPRL dilaksanakan kepada pelaku usaha pemegang izin KKPRL untuk memantau perkembangan kesesuaian kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 57. Pengendalian KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2025

IKM. 9. Nilai PM SAKIP BPSPL Padang (Nilai)

Nilai PM SAKIP BPSPL Padang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP BPSPL Padang merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkup BPSPL Padang. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I atau Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Data capaian rilis melalui surat dari Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL.

Adapun kategori nilai PM SAKIP antara lain sebagai berikut:

1. predikat AA dengan nilai >90-100 dengan kategori Sangat Memuaskan;
2. predikat A dengan nilai >80-90 dengan kategori Memuaskan;
3. predikat BB dengan nilai >70-80 dengan kategori Sangat Baik;
4. predikat B dengan nilai >60-70 dengan kategori Baik;
5. predikat CC dengan nilai >50-60 dengan kategori Cukup;
6. predikat C dengan nilai >30-50 dengan kategori Kurang;
7. predikat D dengan nilai 0-30 dengan kategori Sangat Kurang.

A. Capaian Nilai PM SAKIP BPSPL Padang

Rincian target IKM 9 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 32. Perbandingan Target dan Capaian IKM 9

IKM 9. Nilai PM SAKIP BPSPL Padang (Nilai)					
Realisasi		Tahun 2025			
2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024 - 2025
88,2	89,85	70	94,15	134,5 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerjaaku	4,79

Capaian nilai PM SAKIP BPSPL Padang adalah 94,15% dengan persentase capaian 134,5% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaaku. Evaluasi AKIP tahun 2025 di lingkungan DJPK/RL telah dilaksanakan pada 27 s.d 28 Oktober 2025, dilanjutkan dengan Pleno pembahasannya pada 1 s.d. 3 Desember 2025.

Tabel 33. Nilai AKIP BPSPL Padang 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot (%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	28,50	95%
1.a	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	6,00	6,00	100%
1.b	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9,00	8,10	90%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,50	90%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	27,60	92%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	6,00	100%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,10	90%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	13,50	90%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	13,80	92%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja	3,00	3,00	100%

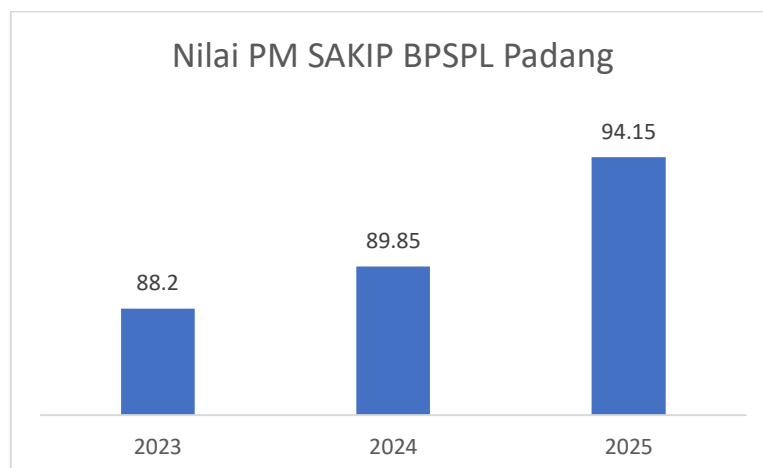
No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot (%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya	4,50	4,05	90%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,75	90%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	24,25	97%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	5	100%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,75	90%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja	12,50	12,50	100%

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vVwXGcqZKUhp7Ye8gZ57C2FINMeh3AjH>

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan perbandingan capaian dengan tahun 2024, terdapat kenaikan capaian sebesar 4,79%. Kenaikan capaian ini didukung dengan adanya peningkatan pada nilai komponen Perencanaan dan Pengukuran pada evaluasi AKIP, yaitu dalam penyediaan dokumen kinerja sejak tahun 2020, penerapan inovasi platform Rumah Gadang BPSPL Padang yang dimanfaatkan dalam pelaporan, replikasi KOMPAK Plus oleh Pemda dan Kelompok Masyarakat, diakuinya inovasi KOMPAK Plus di level nasional (KemenPAN RB), dan predikat WBK yang diakui secara nasional.



Gambar 58. Perbandingan Nilai PM SAKIP dengan Tahun Sebelumnya

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Sementara itu, Renstra DJPK dan DJPRL 2025 s.d. 2029 belum final ketika laporan ini disusun. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Makassar, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 34. Perbandingan Nilai PM SAKIP dengan BPSPL Makassar

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Makassar	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai PM SAKIP (Nilai)	70	94,15	70	92

Berdasarkan perbandingan nilai PM SAKIP pada kedua unit kerja, nilai PM SAKIP BPSPL Padang lebih tinggi dibandingkan dengan BPSPL Makassar. Perolehan nilai PM SAKIP BPSPL Padang didukung oleh penerapan inovasi platform Rumah Gadang BPSPL Padang yang dimanfaatkan dalam pelaporan, replikasi KOMPAK Plus oleh Pemda dan Kelompok Masyarakat, diakuinya inovasi KOMPAK Plus di level nasional (KemenPAN RB), dan predikat WBK yang diakui secara nasional.

Tabel 35. Perbandingan Komponen Penilaian PM SAKIP

Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Nilai Hasil Evaluasi
BPSPL Padang	28,50	27,60	13,80	24,25	94,15
BPSPL Makassar	27,60	27,60	13,80	23	92

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian IKM ini dapat didukung oleh adanya harmonisasi antara tim pengelola kinerja, dari sub-tim perencanaan, pengukuran, evaluasi, hingga pelaporan. Selain itu, pemahaman tim pengelola kinerja mengenai aspek-aspek evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga diperlukan agar pencapaian nilai dapat maksimal.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi dalam upaya pencapaian IKM ini berupa pemanfaatan teknologi dalam media penyimpanan dokumen dan aplikasi untuk pertemuan virtual. Di samping itu, dokumen pendukung SAKIP juga telah tertata dalam media penyimpanan google drive sehingga tidak tercecer dan terkumpul dengan baik.

G. Kegiatan Pendukung

Upaya pencapaian IKM ini dapat ditunjang dengan adanya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup BPSPL Padang secara konsisten dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, verifikasi, hingga evaluasi kinerja. Selain itu, kepatuhan pelaporan dan pendokumentasian data dukung kinerja juga dapat mendukung perolehan nilai SAKIP.

IKM. 10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA BPSPL Padang (Nilai)

Indikator ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Adapun indikator penilaian IKPA adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA, bobot 10%,
2. Deviasi RPD, bobot 15%,
3. Penyerapan Anggaran, bobot 20%,
4. Belanja Kontraktual, bobot 10%,
5. Penyelesaian Tagihan, bobot 10%,
6. Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%,

7. Dispensasi SPM, pengurang nilai IKPA,
8. Capaian output, bobot 25%,

A. Capaian Nilai IKPA BPSPL Padang

Rincian target IKM 10 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 36. Perbandingan Target dan Capaian IKM 10

IKM. 10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA BPSPL Padang								
Realisasi					Tahun 2025			
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024 - 2025
91,53	89,08	90,90	95,34	99,61	89	98,14	110,27	-(1,48)

Capaian IKPA tahun 2025 adalah 98,14 dengan persentase capaian 110,27%. Pada penilaian IKPA tahun 2025 ini, BPSPL Padang telah memperoleh nilai maksimal pada 5 indikator dari total 7 indikator yang diukur. Dalam hal ini, BPSPL Padang telah memenuhi aspek penilaian IKPA secara maksimal pada indikator revisi DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dan capaian output. Sementara itu, pada indikator deviasi halaman III DIPA dan pengelolaan UP dan TUP, nilai yang diperoleh belum mencapai nilai tertinggi namun telah mencapai 92.

Rincian nilai setiap indikator penilaian IKPA yang dicapai BPSPL Padang disajikan pada gambar berikut.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

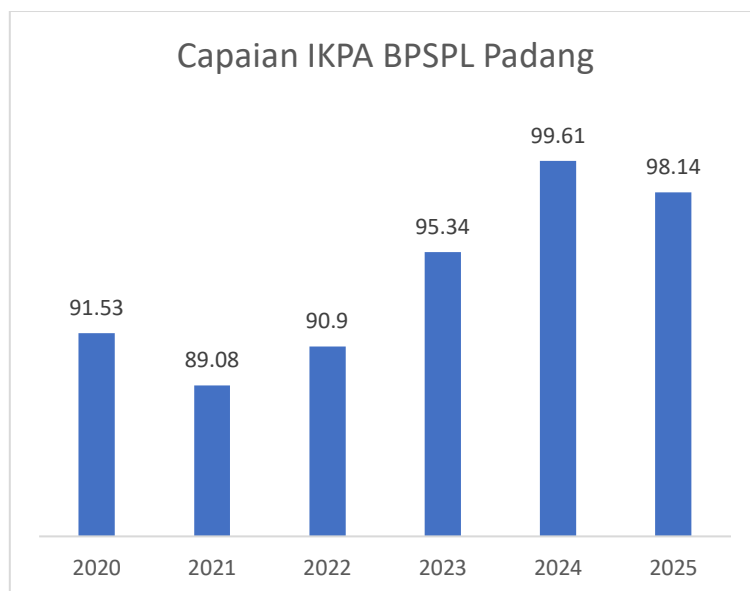
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	010	032	499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Nilai	100.00	92.84	100.00	100.00	100.00	92.12	100.00	98.14	100%	0.00	98.14
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.93	20.00	10.00	10.00	9.21	25.00				
					Nilai Aspek	96.42		98.03				100.00				

Tabel 37. Perbandingan Indikator Penilaian IKPA Tahun 2020 s.d. 2025

Tahun	Indikator Penilaian IKPA
2020	1. Dispensasi SPM 2. UP 3. Data Kontrak 4. Kesalahan SPM 5. Retur 6. Hal 3 DIPA 7. Revisi DIPA 8. Kemajuan Tagihan 9. Rekon LPJ 10. Realisasi 11. Renkas 12. Pagu Minus 13. Capaian Output
2021	1. Revisi DIPA 2. Deviasi Halaman III DIPA 3. Pagu Minus 4. Data Kontrak 5. Pengelolaan UP dan TUP/LPJ Bendahara 6. Dispensasi SPM 7. Penyerapan Anggaran 8. Penyelesaian tagihan 9. Capaian Output 10. Retur SP2D Renkas 11. Kesalahan SPM
2022	1. Revisi DIPA 2. Deviasi Halaman III DIPA 3. Penyerapan Anggaran 4. Belanja Kontraktual 5. Penyelesaian tagihan 6. Pengelolaan UP dan TUP 7. Dispensasi SPM 8. Capaian Output
2023	1. Revisi DIPA 2. Deviasi Halaman III DIPA 3. Penyerapan Anggaran 4. Belanja Kontraktual 5. Penyelesaian tagihan 6. Pengelolaan UP dan TUP 7. Dispensasi SPM 8. Capaian Output
2024 s.d. 2025	1. Revisi DIPA 2. Deviasi Halaman III DIPA 3. Penyerapan Anggaran 4. Belanja Kontraktual 5. Penyelesaian tagihan 6. Pengelolaan UP dan TUP 7. Capaian Output



Gambar 60. Perbandingan Capaian Nilai IKPA dengan Tahun Sebelumnya

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan target Rencana Jangka Menengah

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Sementara itu, Renstra DJPK dan DJPRL 2025 s.d. 2029 belum final ketika laporan ini disusun. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Makassar, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 38. Perbandingan Nilai IKPA dengan BPSPL Makassar

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Makassar	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Nilai)	89	98,14	89	89,73

Berdasarkan perbandingan Nilai IKPA, BPSPL Padang memiliki nilai IKPA lebih tinggi dibandingkan dengan BPSPL Makassar. Secara garis besar, perbedaan nilai antar komponen yang paling mencolok terletak pada komponen penyerapan anggaran, yang mana BPSPL Padang memperoleh nilai maksimal 20 sementara BPSPL Makassar memperoleh nilai 13,2. Pada komponen lain, perolehan nilai kedua unit kerja tidak berbeda secara signifikan.

Tabel 39. Perbandingan Komponen Penilaian IKPA

Unit Kerja	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total
BPSPL Padang	10	13,93	20	10	10	9,21	25	98,14
BPSPL Makassar	10	12,48	13,2	9,3	10	9,73	25	89,73

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Upaya pencapaian IKM ini didukung dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan indikator penilaian. Dalam hal ini, kedisiplinan, konsistensi, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam unsur-unsur

pelaksanaan anggaran sangat penting dalam pencapaian nilai IKPA yang baik. Dalam pelaksanaan anggaran, acapkali ditemukan permasalahan-permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA. Untuk mengatasi hal tersebut, tim pengelola keuangan dapat melakukan monitoring secara berkala, khususnya dalam hal menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan. Dengan adanya sistem monitoring tersebut, permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan dimonitor perkembangan tindak lanjutnya.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaannya, terdapat efisiensi dalam upaya pencapaian IKM 12 berupa penggunaan teknologi informasi dalam monitoring pengelolaan keuangan menggunakan form excel dan whatsapp group. Adanya ruang khusus tersebut dapat membantu staf pengelola keuangan untuk memantau perkembangan pelaporan keuangan, mengidentifikasi masalah, dan menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan. Selain itu, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) melalui <https://sakti.kemenkeu.go.id/> untuk penyampaian usulan revisi DIPA dan Hal III DIPA dan aplikasi <https://espm.kemenkeu.go.id/> untuk pengajuan SPM. Sebelum terdapat aplikasi, kegiatan tersebut dilakukan secara luring ke KPPN dan Kantor Wilayah Perbendaharaan yang lebih memakan waktu dan tenaga.

G. Kegiatan Pendukung

Keberhasilan pencapaian IKM ini dapat ditunjang dengan metode pengawasan yang berjenjang. Dalam hal pelaksanaan anggaran, tim pengelola keuangan BPSPL Padang menerapkan sistem monitoring yang berguna untuk memantau perkembangan catatan-catatan yang ditemukan dalam pelaksanaan anggaran. Adanya sistem tersebut dapat mempermudah tim untuk mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti solusi yang dirumuskan.

IKM. 11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPKRL BPSPL Padang (Nilai)

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

A. Capaian NKPA BPSPL Padang

Rincian target IKM 11 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 40. Perbandingan Target dan Capaian IKM 11

IKM 11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPKRL BPSPL Padang (Nilai)				
Realisasi	Tahun 2025			
2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024 - 2025
98,32	71,5	97,14	135,86 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP	-(1,2%)

Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Padang pada tahun 2025 adalah 97,14 dengan persentase capaian 135,86% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku KKP. Perolehan nilai tersebut diperoleh dari capaian rincian output, penggunaan SBK, dan efisiensi SBK. Pada penilaian capaian rincian output dan efisiensi SBK, BPSPL Padang telah memperoleh penilaian maksimal dengan perolehan nilai 100. Sementara itu, pada penilaian penggunaan SBK, BPSPL Padang memperoleh nilai 71,43.

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Role

Pilih TA (2025)

Logout

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satuan Kerja

Download Excel

Tampilkan10entri

Car:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	832.07.499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	97,14	100,00	71,43	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya1Selanjutnya

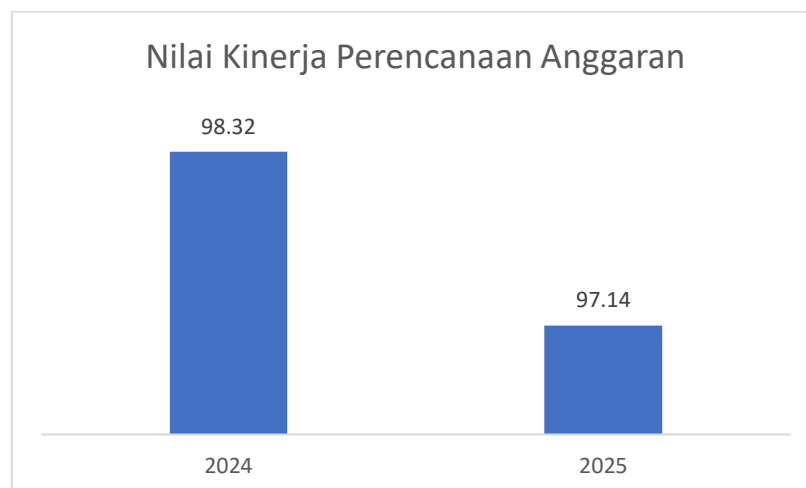
Gambar 61. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025
Sumber: Monev Kemenkeu, Januari 2026

Data dukung:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tpKBUXNTxqcTZw0_J8LIRARt-c5WGhyF

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Ditinjau dari perbandingan dengan capaian tahun 2024, pada tahun ini terdapat penurunan sebesar 1,2%. Pada tahun ini, terdapat penurunan nilai komponen Penggunaan SBK yang sebelumnya diperoleh dengan maksimal. Sementara itu, komponen Efisiensi SBK mengalami peningkatan hingga memperoleh nilai maksimal pada tahun ini.



Gambar 62. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Tahun Sebelumnya

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Sementara itu, Renstra DJPK dan DJPRL 2025 s.d. 2029 belum final ketika laporan ini disusun. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Makassar, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 41. Perbandingan NKPA dengan BPSPL Makassar

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Makassar	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (Nilai)	71,5	97,14	71,5	100

Berdasarkan perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, BPSPL Padang memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan BPSPL Makassar. BPSPL Makassar memperoleh Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran secara maksimal.

Tabel 42. Perbandingan Komponen Penilaian NKPA

Unit Kerja	Capaian Rincian Output	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	Nilai Total
BPSPL Padang	100	71,43	100	97,14
BPSPL Makassar	100	100	100	100

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini juga didukung dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan aspek penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran. Pada tahun 2025, penyajian data pada aplikasi SMART DJA telah terkoneksi dengan pengisian rincian output ke aplikasi SAKTI. Dalam hal ini, BPSPL Padang senantiasa melakukan koordinasi dengan pengelola aplikasi terkait hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka kesesuaian penyajian rincian output.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi dalam upaya pencapaian IKM ini berupa penggunaan aplikasi SMART DJA yang telah terintegrasi dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya sehingga operator SMART DJA tidak perlu menginput realisasi keuangan dan hanya perlu melengkapi capaian rincian output setiap bulannya. Selain itu, perhitungan NKA yang berbasis aplikasi tidak perlu melakukan perhitungan manual.

G. Kegiatan Pendukung

Pencapaian IKM ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan berikut, yaitu:

- Verifikasi Pelaporan Online SMART DJA,
- Penginputan Capaian Output pada aplikasi SAKTI setiap bulannya,
- Penyesuaian Pelaksanaan kegiatan dengan Rencana Penarikan Dana.

IKM. 12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen)

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Ditjen PKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025. Adapun capaian Indikator Kinerja ini diperoleh dari Menginventarisasi dan Menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

A. Capaian Laporan SPIP yang Disusun

Rincian target IKM 12 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 43. Perbandingan Target dan Capaian IKM 12

IKM. 12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang						
Realisasi			Tahun 2025			
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024 - 2025
4	4	4	4	4	100	-

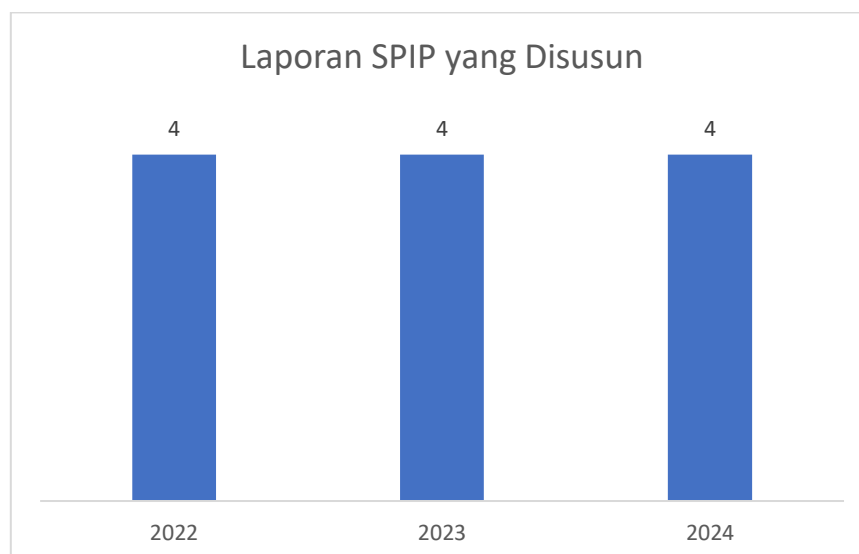
Capaian IKM 12 pada tahun 2025 telah sesuai target 4 dokumen dengan persentase capaian 100%, yaitu melalui penyusunan Laporan SPIP BPSPL Padang Triwulan IV 2024, Triwulan I 2025, Triwulan II 2025, dan Triwulan III 2025.

Data dukung:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DUG_P7IF0YUf08gKWwgw9wl5SVaLkrVw

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat persentase kenaikan capaian pada tahun 2024-2025 karena indikator ini memiliki realisasi capaian yang sama.



Gambar 63. Perbandingan Laporan SPIP yang Disusun dengan Tahun Sebelumnya

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Sementara itu, Renstra DJPK dan DJPRL 2025 s.d. 2029 belum final ketika laporan ini disusun. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Makassar, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 44. Perbandingan Laporan SPIP yang Disusun dengan BPSPL Makassar

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Makassar	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Laporan SPIP yang disusun (Dokumen)	4	4	4	4

Berdasarkan perbandingan capaian antara dua unit kerja, baik BPSPL Padang dan BPSPL Makassar telah mencapai Laporan SPIP yang Disusun sesuai target, yaitu 4 Dokumen. Dalam hal ini, kedua unit kerja telah menyusun dan menyampaikan Laporan SPIP setiap triwulannya.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung dengan adanya kegiatan pengendalian rutin, berkala, dan Manajemen Risiko dalam pengendalian intern di lingkup BPSPL Padang. Sementara itu, untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi, dilakukan FGD Manajemen Risiko. Pengendalian Risiko Kegiatan BPSPL Padang dibuat berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk diantisipasi dan dijadikan bahan masukan dalam persiapan kegiatan.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada kegiatan monitoring upaya pengendalian di BPSPL Padang yang secara umum memanfaatkan teknologi komunikasi dan media penyimpanan data berbasis daring. Selain itu, dalam pelaksanaannya pun tim didukung dengan aplikasi-aplikasi penunjang pelaksanaan anggaran, pelayanan peredaran jenis, pemungutan PNBP, hingga pelaporan berkala.

G. Kegiatan Pendukung

Pencapaian IKM ini didukung dengan implementasi pengendalian intern dan manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan dengan menyertakan data dukung yang dilaporkan secara berkala. Lebih lanjut, BPSPL Padang juga menerapkan implementasi penguatan integritas dan pemantauan risiko secara berkala dan menyeluruh.

IKM. 13. Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang (Indeks)

Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Adapun bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- Kualifikasi, yang diukur dari indikator Riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, memiliki bobot 25%,
- Kompetensi, yang diukur dari indikator Riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, memiliki bobot 40%,
- Kinerja, yang diukur dari indikator penilaian prestasi kerja, memiliki bobot 30%,
- Disiplin, yang diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin, memiliki bobot 5%.

Penjumlahan dari nilai masing-masing dimensi akan menghasilkan Indeks Profesionalitas ASN dengan kategori penilaian sebagai berikut:

- 91-100: Sangat Profesional/Sangat Tinggi,
- 81-90: Cenderung Profesional/Tinggi,
- 71-80: Rentan Tidak Profesional/Sedang,
- 61-70: Cenderung Tidak Profesional/Rendah,
- ≤60: Sangat Tidak Profesional/Sangat Rendah.

A. Capaian IP ASN BPSPL Padang

Rincian target IKM 13 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 45. Perbandingan Target dan Capaian IKM 13

IKM. 13. Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang (Indeks)								
Realisasi					Tahun 2025			
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024 - 2025
82,62	83,54	84,9	90,82	92,85	80	89,04	111,3	-(4,10)

Capaian IP ASN 2025 adalah 89,04 dengan persentase capaian 111,3%. Adapun rincian perolehan nilai tersebut adalah 21,75 untuk aspek Kualifikasi, 35,18 untuk aspek Kompetensi, 27,11 untuk aspek Kinerja, dan 5 untuk aspek Disiplin. Pada aspek disiplin, BPSPL Padang memperoleh nilai maksimal sehubungan dengan tidak adanya pegawai BPSPL Padang yang dijatuhi hukuman disiplin. Sementara itu, aspek Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja BPSPL Padang belum memperoleh nilai maksimal. Pada aspek Kualifikasi, diperlukan adanya peningkatan jenjang pendidikan formal di lingkup BPSPL Padang. Sementara itu, pada aspek Kompetensi, diperlukan pengembangan kompetensi maksimal pada setiap pegawai. Pada aspek Kinerja, diperlukan peningkatan hasil penilaian kinerja individu.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN	46	23,04	92,16 %	28,86	72,15 %	24,67	82,23 %	5	100 %	81,58	TINGGI
2	DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM	27	22,78	91,12 %	33,62	84,05 %	25	83,33 %	5	100 %	86,4	TINGGI
3	DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK	31	23,55	94,2 %	32,1	80,25 %	25	83,33 %	5	100 %	85,65	TINGGI
4	DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	44	23,52	94,08 %	28,93	72,32 %	25,91	86,37 %	5	100 %	83,36	TINGGI
5	DIREKTORAT JASA BAHARI	30	23,67	94,68 %	30	75 %	26,33	87,77 %	5	100 %	85	TINGGI
6	DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN	38	23,03	92,12 %	31,36	78,4 %	26,45	88,17 %	5	100 %	85,83	TINGGI
7	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PADANG	57	21,75	87 %	35,18	87,95 %	27,11	90,37 %	5	100 %	89,04	TINGGI
8	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PONTIANAK	44	21,93	87,72 %	34,73	86,83 %	24,77	82,57 %	5	100 %	86,43	TINGGI
9	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT MAKASSAR	50	22,5	90 %	34,52	86,3 %	27,8	92,67 %	5	100 %	89,82	TINGGI
10	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT DENPASAR	49	21,94	87,76 %	34,5	86,25 %	25,41	84,7 %	5	100 %	86,85	TINGGI
11	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SORONG	28	21,79	87,16 %	34,02	85,05 %	25,18	83,93 %	5	100 %	85,98	TINGGI
12	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG	47	21,49	85,96 %	34,68	86,7 %	26,28	87,6 %	4,91	98,2 %	87,36	TINGGI
13	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	39	22,18	88,72 %	37,05	92,62 %	27,82	92,73 %	5	100 %	92,05	SANGAT TINGGI
14	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SERANG	50	22,5	90 %	33,42	83,55 %	27,5	91,67 %	5	100 %	88,42	TINGGI

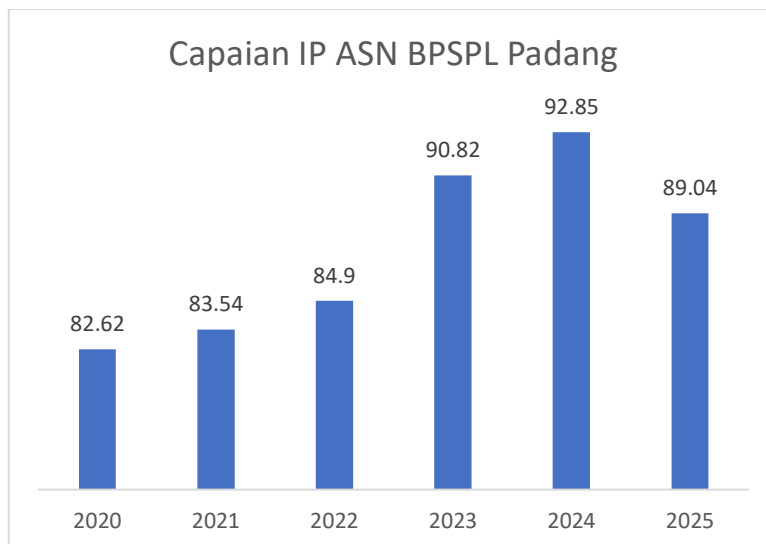
Gambar 64. IP ASN Tahun 2025
Sumber: Ropeg KKP, Januari 2026

Data dukung:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MTv7UdnOFHNex0MDxE_MdX88-3RMs3Lb

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024-2025, terdapat penurunan capaian sebesar 4,10%. Penurunan tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh pemenuhan kompetensi. Pada tahun 2025, PPPK di lingkup BPSPL Padang belum dapat memenuhi pengembangan kompetensi pada diklat fungsional karena mereka langsung diangkat dengan jabatan fungsional. Selain itu, pemenuhan kompetensi juga belum maksimal pada diklat pimpinan yang belum terealisasi hingga akhir tahun.



Gambar 65. Perbandingan IP ASN dengan Tahun Sebelumnya

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Sementara itu, Renstra DJPK dan DJPRL 2025 s.d. 2029 belum final ketika laporan ini disusun. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Makassar, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 46. Perbandingan IP ASN dengan BPSPL Makassar

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Makassar	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80	89,04	80	89,82

Berdasarkan perbandingan Indeks Profesionalitas ASN pada kedua unit kerja, IP ASN BPSPL Makassar lebih tinggi dibandingkan IP ASN BPSPL Padang. Dalam penilaian IP ASN, komponen kualifikasi dan kinerja pada BPSPL Makassar lebih tinggi dibandingkan BPSPL Padang.

Tabel 47. Perbandingan Penilaian Komponen IP ASN

Unit Kerja	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
BPSPL Padang	21,75	35,18	27,11	5	89,04
BPSPL Makassar	22,5	34,52	27,8	5	89,82

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung dengan adanya kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat diikuti pegawai. Setiap pegawai dapat memenuhi diklat 20 JP-nya melalui kegiatan pengembangan diri yang tersedia secara luring dan daring untuk mendorong perolehan Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang. Namun demikian, pencapaian IP ASN BPSPL Padang tidak meningkat secara signifikan karena tidak ada tambahan pegawai yang meningkat kualifikasi pendidikannya. Maka dari itu, alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IP ASN BPSPL Padang adalah mendorong pegawai yang telah selesai izin dan tugas belajar untuk segera menyelesaikan tahapan administrasi akhirnya agar gelarnya dapat segera diakui.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi dalam keikutsertaan pegawai BPSPL Padang dalam pengembangan kompetensi berbasis daring. Adanya kegiatan pengembangan kompetensi secara daring ini dapat memperluas kesempatan bagi seluruh pegawai tanpa dibatasi oleh ketersediaan anggaran.

G. Kegiatan Pendukung

Pencapaian IKM ini didukung oleh keaktifan pegawai dalam mengikuti pengembangan kompetensi workshop/diklat yang diinput ke dalam SIASN. Untuk itu, BPSPL Padang senantiasa melakukan monitor pencapaian IP ASN masing-masing pegawai. Monitoring tersebut dilakukan dengan pengunggahan bukti dukung nilai IP ASN masing-masing pegawai ke laman *google drive* untuk memudahkan pemantauan.

IKM. 14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BPSPL Padang. Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. Jika tidak ada ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian 100. Selain itu, 2. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan capaian 100.

A. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja

Rincian target IKM 14 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 48. Perbandingan Target dan Capaian IKM 14

IKM. 14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang (%)				
Realisasi	Tahun 2025			
2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024 - 2025
100	95	100	105,26	-

Capaian IKM 14 pada tahun 2025 adalah 100%. Capaian tersebut menghasilkan persentase capaian 105,26%. Adapun dalam perkembangannya, pada tahun 2024 BPSPL Padang telah menindaklanjuti dengan tuntas rekomendasi-rekomendasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana terlampir.

Tabel 49. Status Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan pada Tahun 2025

No	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Objek Pengawasan	Jumlah Rekomendasi	Status
1	Evaluasi	T.98/ITJ.1/HP.410/III/2025	Evaluasi Pengelolaan BMN dan PNPB Tahun 2024 – 2025 pada Satker BPSPL Padang	9	Tuntas

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1f7S1OavWN7Z47V4ZvlgwIhdmbLz9RINr>

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Tanggal Register	Objek Pengawasan	STATUS	Aksi
3691	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	T.98/ITJ.1/HP.410/III/2025	2025-03-17	Evaluasi Pengelolaan BMN dan PNPB Tahun 2024 - 2025 pada Satker BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
3096	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	100/ITJ.1/HP.430/IV/2024	2024-05-28	Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang	TUNTAS	Q Detail
2950	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Pemantauan	T.44/ITJ.3/HP.550/II/2024	2024-01-25	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
2609	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	T.430/ITJ.3/HP.470/VIII/2023	2023-08-31	Laporan Hasil Evaluasi PNPB TA 2022-2023 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
2606	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	T.427/ITJ.3/HP.430/VIII/2023	2023-08-29	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
2467	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	T.162/ITJ.3/HP.460/IV/2023	2023-04-14	Laporan Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2023 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
2366	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Audit	T.82/ITJ.3/HP.110/II/2023	2023-02-21	Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2022 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
2143	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	T.239/ITJ.3/HP.430/IX/2022	2022-09-07	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2022 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
1875	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Audit	T.85/ITJ.3/HP.110/III/2022	2022-03-30	Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2021 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
1517	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	4908/ITJ/HP.322/IV/2021	2021-04-19	Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Tracking Mangrove pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang di Provinsi Sumatera Barat	TUNTAS	Q Detail
1510	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Pemantauan	4905/ITJ/HP.550/IV/2021	2021-04-13	Pemantauan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang	TUNTAS	Q Detail
1497	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	5075/ITJ/HP.440/VII/2021	2021-07-19	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir (BPSPL) Padang Tahun 2021	TUNTAS	Q Detail
351	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Pemantauan	4143/ITJ/HP.550/VII/2019	2019-08-28	Pemantauan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBKM pada BPSPL Padang, Provinsi Sumatera Barat	TUNTAS	Q Detail

Gambar 66. Status Tindak Lanjut Hasil Pemantauan terhadap BPSPL Padang
(Sumber: Aplikasi SIDAK, Januari 2026)

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya, indikator sejenis ini memiliki nomenklatur Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan. Terkait hal tersebut, capaian indikator kinerja tersebut tidak dapat dibandingkan. Pada prinsipnya, seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti secara tuntas 100% dan dipertahankan setidaknya selama lima tahun terakhir.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Sementara itu, Renstra DJPK dan DJPRL 2025 s.d. 2029 belum final ketika laporan ini disusun. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Makassar, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 50. Perbandingan Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja dengan BPSPL Makassar

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Makassar	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja (%)	95	100	95	100

Berdasarkan perbandingan capaian antara dua unit kerja, baik BPSPL Padang dan BPSPL Makassar telah mencapai Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja dengan melampaui target, yaitu dengan realisasi 100%. Dalam hal ini, kedua unit kerja telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan dengan tuntas.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM ini didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Padang. Dalam tindak lanjutnya, tim BPSPL Padang dimudahkan dengan adanya aplikasi SIDAK <https://sidak.kkp.go.id/> yang dapat menampilkan data temuan beserta status tindak

lanjutnya. Dalam hal ini, penanggung jawab temuan harus menindaklanjuti catatan dari Inspektorat Jenderal sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada pencapaian IKM 14 melalui penggunaan aplikasi SIDAK <https://sidak.kkp.go.id/> yang memudahkan BPSPL Padang dan tim Inspektorat Jenderal untuk memantau proses tindak lanjut hasil pengawasan. Aplikasi SIDAK juga telah mengakomodir penyampaian dokumen tindak lanjut tersebut sehingga dokumentasi menjadi lebih terarsip dengan rapi.

G. Kegiatan Pendukung

Keberhasilan pencapaian IKM ini dapat ditunjang oleh adanya upaya pendampingan oleh APIP terhadap kegiatan di BPSPL Padang. Dengan adanya pendampingan tersebut, ke depannya BPSPL Padang dapat meminimalisir jumlah temuan pada kegiatan serupa.

IKM. 15. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Padang (%)

Temuan LHP BPK BPSPL Padang yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Padang Tahun 2023. Capaian IKM ini dihitung dari persentase perbandingan jumlah temuan LHP yang diselesaikan dengan Jumlah temuan, sebagaimana rumus berikut.

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK BPSPL Padang yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK BPSPL Padang}} \times 100\%$$

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

A. Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK

Rincian target IKM 15 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 51. Perbandingan Target dan Capaian IKM 15

IKM. 15. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Padang (%)				
Realisasi	Tahun 2025			
2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024 - 2025
100	100	100	100	-

Capaian IKM ini adalah 100%. Pada tahun 2025, tidak terdapat pemeriksaan oleh BPK terhadap BPSPL Padang sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 100%.

Data dukung:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11esWQ4cxoijy2zfKZT3SwXE7iRnSr_JgH

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Sejak tahun 2020 hingga 2025, tidak terdapat kenaikan capaian karena Indikator Kinerja ini memiliki realisasi capaian yang sama. Dalam periode lima tahun tersebut, tidak terdapat pemeriksaan oleh BPK terhadap BPSPL Padang sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 100%.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Sementara itu, Renstra DJPK dan DJPRL 2025 s.d. 2029 belum final ketika laporan ini disusun. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Makassar, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 52. Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK dengan BPSPL Makassar

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Makassar	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase Penyelesaian Temuan BPK (%)	100	100	100	100

Berdasarkan perbandingan capaian antara dua unit kerja, baik BPSPL Padang dan BPSPL Pontianak telah mencapai Persentase Penyelesaian Temuan BPK sesuai target, yaitu dengan realisasi 100%. Dalam hal ini, tidak terdapat pemeriksaan oleh BPK pada kedua unit kerja tersebut.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Perlu dilakukan pengawasan secara berjenjang dalam penggunaan anggaran oleh Kepala BPSPL Padang. Setiap pertanggungjawaban keuangan harus mencantumkan bukti otentik dan konfirmasi langsung kepada pengguna anggaran. Sebagai antisipasi, BPSPL Padang perlu senantiasa menjalankan tugas dan fungsinya dengan disertai penerapan nilai-nilai akuntabilitas untuk meminimalisir temuan.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan anggaran, terdapat efisiensi pada penggunaan Pemegang Uang Muka Kegiatan sebagai upaya mencegah penggunaan anggaran yang melebihi pagu. Selain itu, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan juga telah dilaksanakan secara berjenjang.

G. Kegiatan Pendukung

Keberhasilan pencapaian IKM 15 dapat ditunjang dengan adanya evaluasi kinerja dan anggaran yang dilaksanakan setiap triwulannya. Pada kesempatan tersebut, dibahas secara tuntas perkembangan isu yang terdapat di BPSPL Padang, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam hal ini, BPSPL Padang memperhatikan aspek kinerja dan referensi keuangan yang sesuai.

IKM. 16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Padang (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh Unit Kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM):

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85 dengan minimal nilai pengungkit adalah 48;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 75% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil "Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel" minimal 19,50, dengan nilai sub komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya" minimal 3,75;
4. Memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 15,75.

Adapun capaian IK ini diperoleh dari Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (inspektorat V) dan/atau inspektorat mitra DJPKRL dan/atau tim pembangunan zona integritas DJPKRL. Jika pada tahun anggaran berjalan tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian yang digunakan adalah capaian nilai WBK tahun sebelumnya

A. Capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM

Rincian target IKM 16 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 53. Perbandingan Target dan Capaian IKM 16

IKM. 16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Padang (Nilai)									
Realisasi					Tahun 2025				
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024 - 2025	
87,25	83,20	85,23	93,31	90,40	85	90,40	106,35	-	

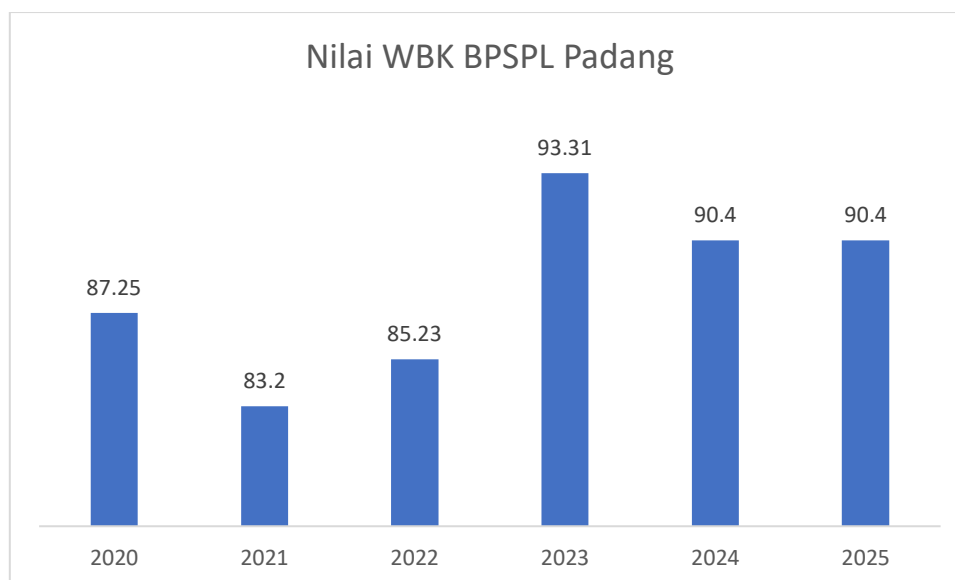
Capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat menuju WBBM BPSPL Padang adalah 90,40% dengan persentase capaian 106,35%. Nilai tersebut diperoleh dari hasil penilaian oleh Tim Penilai Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengusulan BPSPL Padang sebagai Unit Kerja Menuju WBK Nasional di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 lalu. Dalam hal ini, BPSPL Padang meraih predikat Menuju WBK Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Desember 2024.

Data dukung:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cu7_bVZal8cw-Vt1xShWwUJPNmkKjM01

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Dalam perkembangan BPSPL Padang dalam membangun zona integritas pada periode 2020 s.d. 2025, perolehan nilai WBK BPSPL Padang mengalami fluktuasi. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perubahan Petunjuk Teknis penilaian WBK yang mempengaruhi bobot penilaian, aspek yang harus dipenuhi, dan adanya penambahan aspek reform dalam penilaian. Selain itu, perubahan petunjuk teknis tersebut juga dapat mempengaruhi pemahaman Tim Penilai Internal sehingga sangat mungkin setiap penilai memiliki pemahaman yang berbeda, yang mana mempengaruhi hasil penilaian yang berbeda setiap tahunnya. Sehubungan dengan digunakannya hasil penilaian pada tahun 2024 pada tahun ini, tidak terdapat kenaikan maupun penurunan capaian pada tahun 2025.



Gambar 67. Perbandingan Nilai WBK dengan Tahun Sebelumnya

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Sementara itu, Renstra DJPK dan DJPRL 2025 s.d. 2029 belum final ketika laporan ini disusun. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Makassar, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 54. Perbandingan Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM dengan BPSPL Makassar

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Makassar	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM (Nilai)	85	90,40	75	87,41

Berdasarkan perbandingan nilai WBK pada kedua unit kerja, nilai WBK BPSPL Padang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai WBK BPSPL Makassar. Selain itu, terdapat perbedaan target antara kedua unit kerja karena BPSPL Padang telah memperoleh predikat Unit Kerja WBK dari KemenPAN RB. Selain itu, sumber data yang digunakan sebagai capaian kedua unit kerja juga berbeda. Nilai WBK BPSPL Padang diperoleh berdasarkan Hasil Seleksi Pengusulan WBK TPN oleh Inspektorat Jenderal tanggal 20 September 2024. Sementara itu, Nilai yang digunakan sebagai capaian BPSPL Makassar merupakan Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP Tahun 2022.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sebagai upaya pencapaian nilai Unit Kerja menuju WBBM yang maksimal, BPSPL Padang melaksanakan monitoring pembangunan zona integritas secara berkala untuk memantau perkembangan dan pemenuhan masing-masing area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat menyelaraskan pemahaman dalam pemenuhan dokumen sehingga dokumen tersebut dapat disusun sesuai dengan kriteria Petunjuk Teknis.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi dalam upaya pencapaian IKM 14 dengan adanya pemantauan oleh Inspektorat Jenderal secara daring. Dalam upaya kontrol secara internal, BPSPL Padang juga menerapkan rapat daring yang dapat diikuti oleh seluruh tim yang tersebar di wilayah kerja BPSPL Padang.

G. Kegiatan Pendukung

Dalam upaya pencapaian IKM ini, BPSPL Padang menerapkan sistem monitoring secara berkala. Pada kegiatan ini, Ketua Pembangunan Zona Integritas BPSPL Padang memimpin sesi pembahasan yang mencakup evaluasi mandiri, pengecekan dokumen secara menyeluruh, hingga monitoring dari tindak lanjutnya. Adanya kegiatan ini dapat mendukung kedisiplinan tim dalam membangun area pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

IKM. 17. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Padang (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan

Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Padang akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.

A. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

Rincian target IKM 17 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 55. Perbandingan Target dan Capaian IKM 17

IKM. 17. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Padang (Nilai)				
Realisasi	Tahun 2025			
2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024 - 2025
83,78	70	81,5	116,43	-(2,72)

Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal adalah 81,5 dengan persentase capaian 116,43%. Nilai tersebut diperoleh dari penilaian aspek Pengelolaan Arsip Dinamis sebesar 63 dan aspek Sumber Daya Kearsipan sebesar 18,5 sebagaimana hasil dari Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 56. Capaian Nilai Pengawasan Internal Kearsipan BPSPL Padang

Unit Kerja	Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis	Nilai Aspek Sumber Daya Kearsipan	Total	Kategori
BPSPL Padang	63	18,5	81,5	A (Memuaskan)

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16CMz7H9CsOH1iFhwf3SSigdg4QR5USRz>

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Ditinjau dari perbandingannya dengan capaian tahun 2024, terdapat penurunan capaian pada tahun ini sebesar 2,72%. Penurunan ini disebabkan adanya perubahan bobot penilaian dan perolehan nilai yang belum maksimal pada subaspek penyusutan arsip dan SDM kearsipan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Sementara itu, Renstra DJPK dan DJPRL 2025 s.d. 2029 belum final ketika laporan ini disusun. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Makassar, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 57. Perbandingan Nilai Pengawasan Internal Kearsipan dengan BPSPL Makassar

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Makassar	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Pengawasan Internal Kearsipan (Nilai)	70	81,5	70	85

Berdasarkan perbandingan Nilai Pengawasan Internal Kearsipan kedua unit kerja, capaian BPSPL Padang lebih rendah dibandingkan dengan BPSPL Makassar. Dalam hal ini, penilaian aspek pengelolaan arsip dinamis BPSPL Padang lebih rendah dibandingkan BPSPL Makassar. Sementara itu, pada aspek Sumber Daya Kearsipan, nilai BPSPL Padang lebih tinggi dibandingkan dengan BPSPL Makassar.

Tabel 58. Perbandingan Penilaian Komponen Nilai Pengawasan Internal Kearsipan

Unit Kerja	Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis	Nilai Aspek Sumber Daya Kearsipan	Total
BPSPL Padang	63	18,5	81,5
BPSPL Makassar	70	15	85

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung oleh pengelolaan arsip yang memenuhi kriteria penilaian. Dalam hal ini, pengelolaan arsip yang selaras didukung oleh sumber daya manusia dan sarana yang menunjang pengelolaan arsip.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada penggunaan fitur Korespondensi pada laman portal.kkp.go.id yang membantu proses persuratan secara sistematis.

G. Kegiatan Pendukung

Pengelolaan arsip didukung dengan kecakapan dan keterampilan arsiparis dalam pengelolaan arsip. Selain itu, pemahaman pegawai BPSPL Padang dalam menggunakan fitur Korespondensi pada aplikasi *Portal Collaboration Office* dalam persuratan juga dapat mendukung pengelolaan arsip lingkup BPSPL Padang.

IKM. 18. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Padang (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

A. Capaian Persentase RUP PBJ yang Diumumkan pada SIRUP

Rincian target IKM 18 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 59. Perbandingan Target dan Capaian IKM 18

IKM. 18 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPSPL Padang (%)				
Realisasi	Tahun 2025			
2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024 - 2025
-	76	100	131.58% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaaku	-

Capaian Persentase RUP PBJ yang Diumumkan pada SIRUP pada tahun 2025 adalah 100%. Capaian tersebut menghasilkan persentase capaian 131,58% atau 120% berdasarkan aplikasi Kinerjaku.

Dokumen pendukung:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SJS-Gypr7m-X0HkiSxoVz_SHllergj2L

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

IK ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Jangka Menengah

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Sementara itu, Renstra DJPK dan DJPRL 2025 s.d. 2029 belum final ketika laporan ini disusun. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Makassar, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 60. Perbandingan Capaian Persentase RUP PBJ yang Diumumkan dengan BPSPL Makassar

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Makassar	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan (%)	76	100	76	100

Berdasarkan perbandingan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ kedua unit kerja, capaian BPSPL Padang dan BPSPL Makassar telah maksimal dengan perolehan persentase 100%.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung dengan pembaharuan pada aplikasi SIRUP secara berkala. Selain itu, pembaharuan yang dilakukan juga memperhatikan dinamika yang terjadi, seperti akun-akun anggaran yang terdampak blokir akibat efisiensi anggaran.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada updating SIRUP secara berkala yang dapat dilakukan oleh operator secara daring.

G. Kegiatan Pendukung

Pencapaian IKM ini didukung dengan pembaharuan pada aplikasi SIRUP secara berkala setiap adanya revisi RKA-K/L.

IKM. 19. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang (Nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa movev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023.

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu:

1. Mengumumkan informasi publik
2. Menyediakan informasi publik
3. Sarana dan Prasarana
4. Kelembagaan
5. Digitalisasi

A. Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Rincian target IKM 19 BPSPL Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 61. Perbandingan Target dan Capaian IKM 19

IKM. 19. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang (Nilai)				
Realisasi	Tahun 2025			
	2024	Target	Realisasi	% Kenaikan 2024 –2025
-	91	100	109,9	-

Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 adalah 100 dengan persentase capaian 109,9%.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FJmb-S9hOzB7ONseLwkdEHvHBTfOI7MA>

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

IK ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Sementara itu, Renstra DJPK dan DJPRL 2025 s.d. 2029 belum final ketika laporan ini disusun. Maka dari itu, tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target jangka menengah.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan BPSPL Makassar

Perbandingan dengan unit kerja lain, yaitu BPSPL Makassar, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 62. Perbandingan Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan BPSPL Makassar

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Makassar	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	91	100	91	100

Berdasarkan perbandingan capaian kedua unit kerja, baik BPSPL Padang maupun BPSPL Makassar telah memperoleh capaian maksimal dengan memperoleh nilai 100 untuk Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung oleh pengelolaan *website* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan media sosial BPSPL Padang dalam menyampaikan informasi publik sesuai dengan aspek penilaian yang ditetapkan.

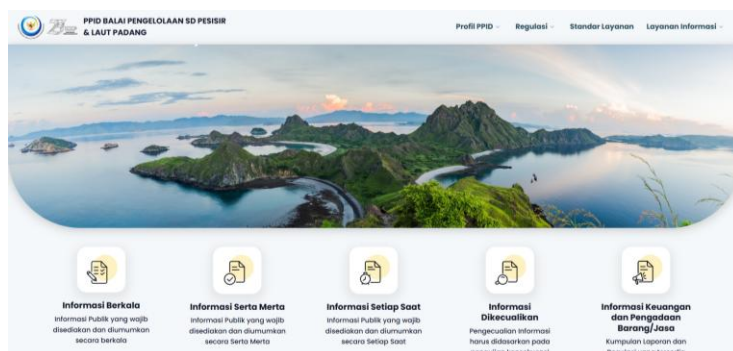
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi dalam pengelolaan media sosial yang dilakukan secara daring. Selain itu, penyusunan konten publikasi yang disampaikan melalui *website* PPID dan media sosial juga dikelola oleh tim BPSPL Padang yang juga menjangkau wilayah kerja.

G. Kegiatan Pendukung

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian IKM ini adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan konten publikasi yang wajib disampaikan melalui *website* PPID dan media sosial,
2. Pengelolaan *website* PPID, dan
3. Pengelolaan media sosial.



Gambar 68. Tampilan Website PPID BPSPL Padang

3. 2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2025 ini BPSPL Padang didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP-DIPA 032.07.2.499346/2025 sebesar **Rp21.875.827.000,00** (Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, 57,7% bersumber dari Rupiah Murni sementara 42,3% bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hingga akhir tahun 2025, **terdapat blokir terhadap anggaran tersebut sejumlah Rp 2.894.914.000** (Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah). Blokir tersebut merupakan blokir efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 (Kode Blokir A).

Pada tahun 2025, realisasi anggaran mencapai **Rp18.739.962.530,00** (Delapan Belas Juta Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ratus Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan **persentase 85,67%**. Adapun realisasi anggaran BPSPL Padang secara rinci disajikan dengan rincian sebagai berikut.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

Bulan : 01 s.d. 12

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	2362 Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	PAGU	0	3,400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000,000
		REALISASI	0.00%	1,002,961,136 (29.50%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,002,961,136 (29.50%)
		SISA	0	2,397,038,864	0	0	0	0	0	0	0	2,397,038,864
2	2365 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PAGU	0	350,000,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000,000
		REALISASI	0.00%	222,186,858 (63.48%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	222,186,858 (63.48%)
		SISA	0	127,813,142	0	0	0	0	0	0	0	127,813,142
3	2366 Perencanaan Ruang Laut	PAGU	0	1,475,000,000	4,045,091,000	0	0	0	0	0	0	5,520,091,000
		REALISASI	0.00%	1,134,057,445 (76.89%)	4,044,754,706 (99.99%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5,178,812,151 (93.82%)
		SISA	0	340,942,555	336,294	0	0	0	0	0	0	341,278,849
4	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	PAGU	9,066,638,000	3,539,098,000	0	0	0	0	0	0	0	12,605,736,000
		REALISASI	8,841,471,557 (97.52%)	3,494,530,828 (98.74%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12,336,002,385 (97.86%)
		SISA	225,166,443	44,567,172	0	0	0	0	0	0	0	269,733,615
GRAND TOTAL		PAGU	9,066,638,000	8,764,098,000	4,045,091,000	0	0	0	0	0	0	21,875,827,000
		REALISASI	8,841,471,557 (97.52%)	5,853,736,267 (66.79%)	4,044,754,706 (99.99%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	18,739,962,530 (85.67%)
		SISA	225,166,443	2,910,361,733	336,294	0	0	0	0	0	0	3,135,864,470

Gambar 69. Realisasi Anggaran Tahun 2025
(Sumber: Aplikasi OM SPAN, Januari 2026)

Tabel 63. Realisasi Anggaran BPSPL Padang Tahun 2025

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Total Blokir (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang		21.875.827.000,00	2.894.914.000,00	18.739.962.530,00	85,67%
2362 Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan					
2362.PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem	155.000.000,00	155.000.000,00	-	-
2362.PCA.002	Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	2.010.000.000,00	1.274.209.000,00	730.550.585,00	36,35%
2362.PEE.001	Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem	70.000.000,00	56.320.000,00	13.667.500,00	19,53%
2362.QMA.002	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	815.000.000,00	733.060.000,00	81.232.555,00	9,97%
2362.REB.001	Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appeniks CITES	250.000.000,00	71.900.000,00	179.230.496,00	71,70%
2362.SCC.002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
2365 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
2365.PBW.001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar	350.000.000,00	127.000.000,00	222.186.858,00	63,48%
2366 Penataan Ruang Laut					
2366.PBT.009	Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Berisiko Rendah	1.475.000.000,00	339.520.000,00	1.134.057.445,00	76,88%
2366.RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	4.045.091.000,00	-	4.044.754.706,00	99,99%

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Total Blokir (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2367					
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
2367.EBA.956	Layanan BMN	56.120.000,00	-	55.828.748,00	99,48%
2367.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	18.020.000,00	-	18.019.814,00	100%
2367.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	122.948.000,00	-	122.404.403,00	99,56%
2367.EBA.962	Layanan Umum	14.890.000,00	-	14.865.581,00	99,84%
2367.EBA.994	Layanan Perkantoran	12.119.638.000,00	37.905.000,00	11.864.527.112,00	97,89%
2367.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	54.780.000,00	-	54.768.920,00	99,98%
2367.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	87.030.000,00	-	87.022.505,00	99,99%
2367.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	72.170.000,00	-	71.786.575,00	99,47%
2367.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	60.140.000,00	-	60.126.160,00	99,98%

IV. Penutup

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengukuran kinerja tahun 2025, terdapat 19 Indikator Kinerja (IK) di lingkup BPSPL Padang dengan jangka waktu target bersifat triwulanan, semesteran, dan tahunan yang juga disampaikan perkembangan kegiatannya. Adapun hasil pengukuran kinerja menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://kinerjaku.kkp.go.id/> menunjukkan **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh BPSPL Padang tahun 2025 adalah 114,62 (kategori istimewa).**

Berikut disampaikan capaian masing-masing indikator kinerja BPSPL Padang tahun 2025:

1. Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Daerah yang Difasilitasi Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan satu (1) Provinsi telah tercapai sebanyak lima (5) provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.
2. Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan lima (5) Orang telah tercapai sebanyak enam (6) orang masyarakat pemanfaat kawasan konservasi di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat.
3. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan 1 Kesepakatan telah tercapai sebanyak dua (2) kesepakatan yaitu usulan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Mifa Bersaudara dan Yayasan Fifi Laut Nusantara.
4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan tiga (3) Jenis telah tercapai sebanyak enam (6) jenis yaitu terubuk, belida, penyu, cetacean, dugong, dan buaya.
5. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan tiga (3) Jenis telah tercapai sebanyak tujuh (7) jenis yaitu hiu, pari, sidat, teripang, arwana, napoleon, dan karang.
6. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan dengan target tahunan 80 telah tercapai dengan nilai 96.
7. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan satu (1) Dokumen telah tercapai sebanyak satu (1) Dokumen.
8. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan dua (2) Dokumen telah tercapai dua (2) dokumen yaitu identifikasi/verifikasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut.
9. Nilai PM SAKIP BPSPL Padang dengan target tahunan 70 telah tercapai dengan nilai 94,15.
10. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Padang dengan target tahunan 89 telah tercapai dengan nilai 98,14.
11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL BPSPL Padang dengan target tahunan 71,5 telah tercapai dengan nilai 97,14.
12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang dengan target tahunan empat (4) Dokumen telah tercapai sesuai target empat (4) Dokumen.
13. Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang dengan target tahunan 80 telah tercapai dengan nilai 89,04.
14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang dengan target 95% telah tercapai dengan persentase 100%.
15. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Padang dengan target tahunan 100% telah tercapai dengan persentase 100%.
16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Padang dengan target tahunan 85 telah tercapai dengan nilai 90,40.

17. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPSPL Padang dengan target tahunan 80 telah tercapai dengan nilai 81,5.
18. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Padang dengan target 76% telah tercapai 100%.
19. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang dengan target tahunan 91 telah tercapai dengan nilai 100.

Berdasarkan uraian capaian tersebut, BPSPL Padang telah mencapai seluruh indikator kinerja yang dijadwalkan pada tahun 2025 dengan persentase $\geq 100\%$. Pencapaian tersebut juga didukung dengan adanya **alokasi pagu anggaran sejumlah Rp21.875.827.000,00** (Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, 57,7% bersumber dari Rupiah Murni sementara 42,3% bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hingga akhir tahun 2025, **terdapat blokir terhadap anggaran tersebut sejumlah Rp 2.894.914.000** (Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah). Blokir tersebut merupakan blokir efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 (Kode Blokir A). Pada tahun 2025, **realisasi anggaran mencapai Rp18.739.962.530,00** (Delapan Belas Juta Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan persentase 85,67%.

4.2. Rekomendasi

Dalam perkembangannya, tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian target tahun 2025. Namun demikian, dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja periode selanjutnya, terdapat rekomendasi untuk melaksanakan dialog kinerja sehubungan dengan adanya transformasi unit kerja BPSPL Padang menjadi Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang.

4.3. Tindak Lanjut Rekomendasi

Berikut disajikan rekapitulasi rekomendasi beserta tindak lanjutnya.

Periode Pelaporan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
Triwulan IV 2024	Melaksanakan dialog kinerja untuk membahas penjenjangan kinerja serta kegiatan yang terdampak blokir anggaran	BPSPL Padang telah melaksanakan dialog kinerja yang diselenggarakan setelah apel pagi untuk membahas penjenjangan kinerja serta strategi yang dapat dilaksanakan dalam menghadapi kendala efisiensi anggaran	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1whxUBC6mD0AsfNQoZ4iyHhwnlpXtz69I
Triwulan I 2025	Pemantauan kinerja anggaran	BPSPL Padang telah melaksanakan pemantauan kinerja anggaran secara berkala (dua minggu hingga 1 bulan sekali) dengan cara pemantauan realisasi, perbandingan dengan RPD, serta dan catatan-catatan yang perlu ditindaklanjuti.	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sB5IY03N43VRzy1jOcg-cRIMthCqtcS8
	Melengkapi pengembangan kompetensi 20 JP	BPSPL Padang telah mensosialisasikan pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP kepada seluruh pegawai.	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Uh2Nph9KDNf9YZAVH84M17vhPTZpiWbZ
Triwulan II 2025	Melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis yang anggaran pendukungnya sudah tidak terdampak blokir	BPSPL Padang telah melaksanakan kegiatan yang anggarannya sudah tidak terdampak blokir	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZgBjlqHWqFq4HPywxBWI-HN3YW6jqxYH

Periode Pelaporan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
Triwulan III 2025	Berkoordinasi dengan Tim Kerja Program Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan sehubungan dengan indikator kinerja yang terdampak oleh blokir anggaran	BPSPL Padang melakukan koordinasi dengan Tim Kerja Program Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan perihal penyesuaian target indikator kinerja yang anggaran pendukungnya terdampak blokir hingga akhir tahun.	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1d4KrYtGPMr_JVqxfP-jo-hs9K3aXOvC6

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang Tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sesprdirjenpri@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 **BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)** **PADANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fajar Kurniawan**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang

Fajar Kurniawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang	1.	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang (Provinsi)	3
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang	2.	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	25
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Padang	3.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1
4.	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang dilindungi dan/atau yang dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang	4.	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
5.	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Padang	5.	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
6.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	6.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	2
7.	Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	7.	Dokumen identifikasi pemanfaatan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
8.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Padang	8.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang (Nilai)	88
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Padang (Nilai)	92
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL BPSPL Padang (Nilai)	71,5
		11.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4
		12.	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang (Indeks)	87
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang (%)	95
		14.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100
		15.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Padang (Nilai)	85
		16.	Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Padang (Nilai)	80
		17.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Padang (%)	76
		18.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang (Nilai)	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	875.000.000
2.	Konservasi Ekosistem Biota dan Perairan	3.400.000.000
3.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	350.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	13.054.108.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2025		17.679.108.000

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang

Fajar Kurniawan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
(BPSPL) PADANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hendrisman**

Jabatan : **Plt. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : **Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Balai Pengelolaan Sumber
Daya Pesisir dan Laut Padang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hendrisman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
(BPSPL) PADANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	2

3

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penataan Ruang Laut	875.000.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2025		875.000.000

Keterangan: Blokir anggaran sebesar Rp339.520.000 sehingga Pagu Efektif BPSPL Padang Tahun 2025 sebesar Rp535.480.000.

Jakarta, Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Balai Pengelolaan Sumber
Daya Pesisir dan Laut Padang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hendrisman



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
PADANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hendrisman**

Jabatan : Plt. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Pengelolaan Sumber
Daya Pesisir dan Laut Padang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hendrisman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
PADANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang	1.	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang (Provinsi)	3
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang	2.	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	25
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Padang	3.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1
4.	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang dilindungi dan/atau yang dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang	4.	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
5.	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Padang	5.	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
6.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja BPSPL Padang	6.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)	80
7.	Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	7.	Dokumen identifikasi pemanfaatan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
8.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Padang	8.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang (Nilai)	70
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Padang (Nilai)	89
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL BPSPL Padang (Nilai)	71,5
		11.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4
		12.	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang (Indeks)	80
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang (%)	95
		14.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100
		15.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Padang (Nilai)	85
		16.	Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Padang (Nilai)	80
		17.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Padang (%)	76
		18.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang (Nilai)	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Konservasi Ekosistem Biota dan Perairan	3.400.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	350.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	13.054.108.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2025		16.804.108.000

Jakarta, 30 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Pengelolaan Sumber
Daya Pesisir dan Laut Padang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hendrisman



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahmat Irfansyah**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
(BPSPL) PADANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	2

3

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penataan Ruang Laut	5.520.091.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2025		5.520.091.000

Keterangan: Blokir anggaran sebesar Rp339.520.000 sehingga Pagu Efektif BPSPL Padang Tahun 2025 sebesar Rp5.180.571.000.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
PADANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahmat Irfansyah**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



A. Koswara

Ditandatangani
Secara Elektronik

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang



Rahmat Irfansyah

Ditandatangani
Secara Elektronik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang	1.	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Padang (Provinsi)	1
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang	2.	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	5
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Padang	3.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1
4.	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang dilindungi dan/atau yang dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang	4.	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	3
5.	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Padang	5.	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	3
6.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja BPSPL Padang	6.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)	80
7.	Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	7.	Dokumen identifikasi pemanfaatan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
8.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Padang	8.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang (Nilai)	70
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Padang (Nilai)	89
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Padang (Nilai)	71.5
		11.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4
		12.	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang (Indeks)	80
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPSPL Padang (%)	95
		14.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100
		15.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BPSPL Padang (Nilai)	85
		16.	Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Padang (Nilai)	70
		17.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Padang (%)	76
		18.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPSPL Padang (Nilai)	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Konservasi Ekosistem Biota dan Perairan	3.400.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	350.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	12.605.736.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2025		16.355.736.000

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat Irfansyah

Lampiran 2. Penghargaan BPSPL Padang





